



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja KKP tahun 2025 yang terdiri atas:
- a. arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program dan indikator sasaran program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta dukungan terhadap prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. matriks Renja KKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi eselon I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- KEDUA : Renja KKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit organisasi eselon I untuk dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2025.
- KETIGA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit organisasi eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.
- KELIMA : Pimpinan unit organisasi eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Renja KKP tahun 2025 setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

A. Arah Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	1. Tingkat pengelolaan konservasi (nilai)	63,7
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Nilai kontribusi sektor kelautan terhadap PDB maritim (triliun rupiah)	2,25
		2. Pertumbuhan PDB perikanan (%)	4,00-6,00
		3. Volume produksi perikanan (juta ton)	24,58
		4. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (skala 0-1)	0,49
		5. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6
		6. Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan (Indeks)	80,67
		7. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤80
3.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	1. Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD Miliar)	6,25
		2. Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	26,26
		3. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan (%)	70,00

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET 2025
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75,00
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP	90,05

C. Program Tahun 2025

Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program priority*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

Nomenklatur program KKP tahun 2025 beserta sasaran program, indikator sasaran program, target, dan satuan sebagai berikut:

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Persentase lulusan pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri dan/atau dunia kerja	85	persen
		02-Persentase lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri dan/atau dunia kerja	75	persen
		03-Rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya	6,5	persen
	02-Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat	01-Ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	54	paket
		02-Desa Perikanan Cerdas (<i>smart fisheries village</i>) yang menerapkan ilmu dan	1	desa

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		pengetahuan teknologi hasil penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan		
		03-Percontohan penyuluhan dan pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan	17	kelompok
	03-Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Aparatur penyelenggara kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	550	orang
		02-Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang mendukung penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	13	NSPK
		03-Sarana dan prasarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitasnya	17	paket
		04-Lembaga penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tersertifikasi/ terakreditasi	26	lembaga
		05-Hasil pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	1	laporan
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	01-Meningkatnya Ekspor Produk Perikanan, Konsumsi Ikan dan Kelas Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Nilai ekspor rumput laut	0,574	USD miliar
		02-Nilai ekspor produk perikanan lainnya	5,676	USD miliar
		03-Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri	310,51	Rp triliun
		04-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	5	persen

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	02-Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	01-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen
		02-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen
		03-Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41	Negara
		04-Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI	70	persen
		05-Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70	persen
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	01-Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i>	01-Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	30	juta hektar
		02-Nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	50	nilai
		03-Nilai efektifitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau <i>Appendix CITES</i> (25 jenis)	68,30	nilai
	02-Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	01-Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	18	ton
03-Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	55	nilai	
HB-Program Pengelolaan	01-Kesejahteraan Nelayan Meningkat	01-Nilai tukar nelayan	105-108	indeks

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
Perikanan dan Kelautan	02-Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	80	indeks
	03-Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	01-Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	80	indeks
		02-Persentase keaktifan pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	90	persen
		03-Tingkat Keterlibatan Masyarakat (<i>engagement rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	>1	persen
	04-Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	01-Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	82	indeks
		02-Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak berizin	82	indeks
	05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	92	indeks
		02-Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	80	indeks
	06-Tata kelola sumber daya Perikanan tangkap berkelanjutan	01-Persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan	80	persen
	07-Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan	01-Volume produksi ikan air tawar	3,92	juta ton
		02-Volume produksi ikan air payau	2,54	juta ton
		03-Volume produksi ikan air laut	0,29	juta ton

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		04-Volume produksi rumput laut	11,64	juta ton
	08-Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	11,32	persen
		02-Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)	19,51	persen
		03-Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)	8	indeks
	09-Tersedianya perumusan kebijakan kelautan dan perikanan yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	01-Jumlah hasil perumusan kebijakan responsif kelautan dan perikanan yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	8	rekomen dasi kebijakan
	10-Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	01-Volume produksi garam (Juta Ton)	2,25	ton
		02- Persentase pulau-pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)	20	persen
	12-Meningkatnya kelas usaha kelautan dan perikanan	01-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas	5	persen
	13-Produktivitas perikanan tangkap meningkat	01-Volume produksi perikanan tangkap	6,19	juta ton
WA-Program Dukungan Manajemen	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	01-Indeks reformasi birokrasi KKP	90,05	indeks
		02-Indeks profesionalitas ASN lingkup KKP	88	indeks
		03-Nilai keterbukaan informasi publik	94	nilai
		04-Nilai kinerja perencanaan anggaran KKP	85	nilai
		05-Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	76	nilai

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan KKP	≤0,5	persen
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	85	persen
		08-Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal	7	unit kerja
	02-PNBP BLU sektor kelautan dan perikanan meningkat	01-Persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP	97	persen
		02-Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	90	persen
	03-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja KKP	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan KKP	≤0,5	persen
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup KKP	86	persen
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	85	persen
		04-Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja pengawasan inspektorat jenderal	4,05	indeks
	04-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai kapabilitas pengawasan inspektorat jenderal	3,60	nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup inspektorat jenderal	80	persen
		03-Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	86	persen
	05-Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan	86	nilai

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	SATUAN
	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang laut	Kelautan dan Ruang Laut		
	06-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Perikanan Tangkap	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap	86	nilai
	07-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	86	nilai
	08-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP	86	nilai
	09-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budi Daya	86	nilai
	10-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen PSDKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP	86	nilai
	11-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPSDMKP	01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDMKP	86	nilai

D. Kegiatan Tahun 2025

Kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Nomenklatur kegiatan KKP pada tahun 2025 beserta sasaran, indikator, target, dan satuannya adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja	17.804	orang
		02-Sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi	740	orang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	02-Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelatihan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Materi pelatihan kelautan dan perikanan berbasis kaji widya	1	paket
	03-Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan	01-Sarana pelatihan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	paket
		02-Prasarana pelatihan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	2	paket
	04-Terselenggaranya tata kelola pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan	01-Sertifikasi kelembagaan pelatihan sesuai standar lembaga Pelatihan	10	lembaga
		02-Norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan masyarakat yang disusun	3	NSPK
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	01-Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja	2.134	orang
		02-Lulusan satuan pendidikan kementerian kelautan dan perikanan	2.507	orang
	02-Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	01-Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	51	paket
		02-Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	14	kelompok
	03-Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	01-Peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	5	paket
		02-Prasarana pendidikan menengah dan tinggi kelautan dan perikanan yang	3	paket

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		ditingkatkan kapasitasnya		
	04-Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	01-Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi	16	lembaga
		02-Tenaga pendidik kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	500	orang
		03-Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pendidikan kelautan dan perikanan	6	NSPK
		04-Lembaga pendidikan kelautan dan perikanan yang terkelola	16	lembaga
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh	35.000	kelompok
		02-Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	1.157	kelompok
		03-Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	4.100	kelompok
	02-Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekomendasi dan model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Rekomendasi dan model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan	1	paket
		02-Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan	3	kelompok
		03-Inovasi yang diterapkan untuk penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan	1	paket
	03-Tersedianya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) di lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	01-Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyuluhan kelautan	1	desa

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		dan perikanan		
	04-Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan	01-Sarana penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	paket
		02-Prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	paket
	05-Terselenggaranya tata kelola penyuluhan kelautan dan perikanan	01- Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyuluhan kelautan dan perikanan	4	NSPK
		02-Penyuluh perikanan yang kompeten	50	orang
		03-Hasil pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di lokasi program prioritas KKP	1	laporan

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya pangsa pasar produk olahan rumput laut	01-Proporsi ekspor produk rumput laut olahan	46,5	persen
	02-Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di luar negeri	01-Pertumbuhan ekspor produk perikanan	4,23	persen
	03-Meningkatnya kontribusi protein ikan dalam pemenuhan protein hewani	01-Kontribusi protein ikan terhadap sumber protein hewani	53	persen
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	01-Persentase utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan	68,70	persen
	02-Meningkatnya produksi olahan kelautan dan perikanan	01-Produksi olahan kelautan dan perikanan	3,71	juta ton
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	01-Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan	70	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Kelautan dan Perikanan		skala UMKM dan menengah besar		
		02-Jumlah sertifikat <i>hazard analysis critical control point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	sertifikat
		03-Persentase MOU/MRA sistem jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan	70	persen
		04-Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen
		05-Persentase unit usaha pembenihan ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen
		06-Persentase unit usaha produksi dan distribusi obat ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen
		07-Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen
		09-Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen
7010-Manajemen Mutu	01-Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	01-Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	70	persen
		02-Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Nilai kualitas penerapan manajemen laboratorium sistem mutu	75	nilai
		04-Nilai kualitas penerapan manajemen lembaga inspeksi sistem mutu	75	nilai
		05-Standar Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir Sistem Mutu dan Hasil Perikanan	3	standar sistem
		06-Harmonisasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor Sistem Mutu dan Hasil Perikanan	8	dokumen
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian	01-Persentase produk yang memenuhi persyaratan standar pengujian	70	persen
7025-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya penerapan ketertelusuran produk perikanan	01-Persentase peningkatan pelaku usaha yang menerapkan sistem ketelusuran produk perikanan	27,2	persen
	02-Meningkatnya kinerja logistik ikan dalam negeri	01-Kinerja logistik ikan	72	indeks
7026-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	01-Nilai investasi kelautan dan perikanan	7,24	Rp triliun
	02-Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	01-Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya	5	persen

3. Program Kualitas Lingkungan Hidup

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2362-Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	01-Terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau <i>Appendix CITES</i>	01-Luas kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru	700.000	hektar
		02-Luas kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola	18,50	juta hektar
		03-Tingkat kinerja pengelolaan kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	86	nilai
		04-Tingkat kinerja pengelolaan konservasi biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau <i>Appendix CITES</i> (25 jenis)	66,39	nilai
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	01-Volume pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut	3	ton
		02-Volume sampah plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	15	ton
	02-Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana	01-Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	55	nilai
		02-Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim	55	nilai
		03-Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana	55	nilai

4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	01-Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan	01-Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi	13	persen
		02-Petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi	120	orang
		03-Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan	3	dokumen
		04-Persentase permohonan persetujuan pengadaan kapal perikanan	100	persen
		05-Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	92	persen
		06-Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi	30	orang
		07-Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	11.000	unit
		08-Standar permesinan kapal perikanan yang diterbitkan	1	dokumen
		09-Persentase awak kapal perikanan di atas 30 GT yang terlindungi	13	persen
		10-Kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan	1.300	kapal
		11-Kapal perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	1.600	unit
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	01-Pengelolaan pelabuhan perikanan yang optimal dan bertanggung jawab	01-Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA) (Persen)	78	persen
		02-Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	79	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan	49	persen
		04-Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan <i>fish market</i> bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri	100	persen
		05-Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep <i>eco fishing port</i> yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri	100	persen
		06-Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan	2	dokumen
		07-Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum	29	persen
		08-Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	79	persen
		09-Persentase lokasi pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan	37	persen
		10-Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	42	persen
		11-Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	15	persen
		12-Persentase operasional SKPT	86	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	01-Pengelolaan perizinan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan	01-Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	alokasi kapal
		02-Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000	dokumen
		03-Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	persen
		04-Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	indeks
		05-Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	91	persen
		06-Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	96	persen
		07-Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	persen
	02-Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing	01-Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya	100	persen
		02-Jumlah Nelayan yang diidentifikasi dalam rangka perlindungan nelayan	50.000	orang
		03-Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui	5.000	orang

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		program sertifikasi tanah nelayan		
		04-Persentase nelayan yang terlindungi	100	persen
		05-Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan modern	1	lokasi
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	01-Pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan	01-Persentase zona penangkapan ikan yang dihitung alokasi kuotanya	100	persen
		02-Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan	67	persen
		03-Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	86	nilai
		04-Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	100	persen
		05-Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan	100	persen
		06-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional	100	persen
		07-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	78	persen
		08-Persentase <i>harvest strategy</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun	76	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		09-Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	81	persen
		10-Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas	83	persen
		11-Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat	100	persen
		12-Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun	100	persen
	02-Produktivitas perikanan perairan darat meningkat	01-Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya	75	persen
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang operasi armada dan peningkatan prasarana dan sarana PSDKP	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana PSDKP	100	persen
	02-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	01-Indeks kinerja operasi pesawat patroli	95	indeks
		02-Indeks kinerja operasi kapal pengawas	92	indeks
		03-Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas	92	indeks
		04-Indeks kesiapan logistik dan awak kapal pengawas	100	indeks
	03-Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan	01-Persentase prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	persen
		02-Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	100	indeks
		03-Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	82	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	100	persen
2351-Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	indeks
		02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	indeks
		03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	81	indeks
	02-Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	01-Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	80	persen
		02-Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa	76	persen
	03-Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	01-Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	81	indeks
		02-Indeks kualitas supervisi dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan	75	indeks
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	71	indeks
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	100	persen
	04-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	sektor kelautan dan perikanan	penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan		
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	01-Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	indeks
		02-Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	indeks
		03-Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	indeks
	02-Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	01-Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPPNRI	100	persen
		02-Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP	75	nilai
		03-Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan	82	indeks
	03-Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	01-Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	nilai
		02-Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan	75	nilai
	04-Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	01-Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan	82	indeks
		02-Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100	indeks
		03-Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan	82	indeks
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan	62	indeks
	06-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
2353- Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	01-Terbentuknya regulasi tata kelola kelautan dan perikanan yang memiliki efek gentar	01-Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan pengenaan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan	Ada	ada/ tidak ada	
	02-Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	01-Tingkat kualitas respon/pemahaman <i>audiens</i> sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	80	nilai	
	03-Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	indeks	
		02-Indeks kualitas supervisi pembinaan pokmaswas	82	indeks	
	04-Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	01-Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5	konten/ minggu	
		02-Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	85	persen	
	2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01-Meningkatnya produktivitas lahan garam rakyat	01-Produktivitas lahan garam rakyat	83	ton/ha
			02-Korporasi petambak garam yang dikembangkan	-	korporasi
02-Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan		01-Persentase pemanfaatan air laut dan biofarmakologi produk kelautan (kumulatif)	-	persen	
		02-Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut	3	kawasan	
		03-Persentase pengendalian reklamasi dan sumber material reklamasi	100	persen	
		04-Nilai efektivitas pengelolaan wisata bahari	70	nilai	
		05-Persentase penyelesaian perizinan berusaha jasa kelautan	100	persen	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	01-Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif)	19	pulau
		02-Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya	1	pulau
		03-Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif	55	kelompok
	03-Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat	01-Nilai kemandirian masyarakat hukum adat	50	kelompok
2366-Perencanaan Ruang Laut	01-Tersusunnya perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir	01-Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW)	3	lokasi
		02-Kawasan strategis nasional yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional (RZ KSN)	3	lokasi
		03-Kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	3	lokasi
		04-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	1	dokumen
		05-Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan	2	lokasi
		06-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	8	provinsi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
	02-Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut	01-Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan	17,39	persen
		02-Persentase KKPRL yang dimonitoring dan evaluasi	20	persen
	03-Terfasilitasnya hasil sedimentasi di laut	01-Wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi	5	dokumen
		02-Persentase lokasi yang difasilitasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut	100	persen
7021-Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	01-Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	170	unit
		02-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	6	rekomendasi kebijakan
		03-Bibit rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	31.798	kg/unit
		04-Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	1	unit
		05-Unit Budi Daya yang dibina penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	14	lembaga
7022-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Payau	01-Produksi Induk Unggul Ikan Air Payau untuk bantuan dan operasional UPT	6.411	ekor
		02-Produksi Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT	191.744	ekor
		03-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	2.964.669	ekor

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	40.058.988	ekor
		05-Benih Ikan Air Payau yang diproduksi	3.382.065	ekor
		06-Benih Udang yang diproduksi	35.870.400	ekor
		07-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	94.670	unit
		08-Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi	223.542	unit
		09-Unit Budidaya Ikan Air Payau yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budidaya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	207	lembaga
		10-Sampel penyakit ikan, pakan dan obat ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	5.003	sampel
		11-Sampel Monitoring Residu, Penyakit Ikan, dan <i>Surveillance</i> Resistensi Anti Mikroba (AMU/AMR) yang diuji	596	sampel
		12-Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)	7	unit
		13-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	25	unit
		14-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Air Payau	6	rekomen dasi kebijakan
7023-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Laut	01-Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk bantuan dan operasional UPT	10.037	ekor
		02-Produksi Induk Unggul Kepiting untuk bantuan dan operasional UPT	89	ekor

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	1.774.489	ekor
		04-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	174.574	ekor
		05-Benih Ikan Air Laut yang diproduksi	170.811	ekor
		06-Benih Kepiting yang diproduksi	189.790	ekor
		07-Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT	13.927	unit
		08-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	20	unit
		09-Unit Budidaya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budidaya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	23	lembaga
		10-Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1.993	sampel
		11-Sampel Monitoring residu dan monitoring penyakit ikan yang diuji	129	sampel
		12-Kluster Komoditas Unggulan Ikan Air Laut berbasis kawasan	1	unit
		13-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	6	rekomendasi kebijakan
7024-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	01-Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Tawar	01-Produksi Induk Unggul Ikan Air Tawar untuk bantuan dan operasional UPT	274.658	ekor
		02-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	27.108.670	ekor
		03-Benih Ikan Air tawar yang diproduksi	7.401.833	ekor

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	147.806	unit
		05-Unit Budi daya Ikan Air Tawar yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi daya (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB)	375	lembaga
		06-Sampel penyakit ikan air tawar yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	2.832	sampel
		07-Sampel pakan dan obat ikan yang diuji	128	sampel
		08-Sampel Monitoring Residu dan monitoring penyakit ikan yang diuji	286	sampel
		09- Perikanan budi daya yang berkelanjutan dan bebas konversi	1	unit
		10-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	219	unit
		11-Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	38	produk
		12-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	6	rekomen dasi kebijakan

4. Program Dukungan Manajemen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2322-Legislati, Litigasi, dan Kerja Sama	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang penyiapan produk hukum KKP	01-Indeks reformasi hukum KKP	85	indeks
		02-Indeks kualitas kebijakan KKP	85	indeks
		03-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	persen
		04-Permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Kementerian	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		Kelautan dan Perikanan yang ditangani		
		05-Permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangani	100	persen
		06-Perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani	100	persen
		07-Instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum	100	persen
		08-Nilai kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	92	nilai
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerjasama antarlembaga	01-Persentase kontribusi kerja sama bidang kelautan dan perikanan terhadap program prioritas	82	persen
		02-Persentase dokumen/naskah kerja sama yang disetujui pimpinan para pihak	95	persen
		03-Persentase posisi/rekomendasi/pra karsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	94	persen
	03-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	03-Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95	persen
		04-Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	persen
		05-Persentase posisi/rekomendasi/pra karsa Indonesia di bidang kelautan dan	93	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		perikanan yang diterima di forum internasional		
		06-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100	persen
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di pengelolaan SDM aparatur dan organisasi	01-Nilai implementasi RB KKP	86	nilai
		02-Indeks sistem merit KKP	394	indeks
		03-Indeks profesionalitas ASN setjen	87	indeks
		04-Indeks implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) manajemen ASN	85	indeks
		05-Indeks pembinaan JF KKP	72	indeks
		06-Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP	70	nilai
		07-Persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP	100	persen
		08-Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional	5	nilai
		09-Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP	5	nilai
		10-Indeks berAKHLAK KKP	70	indeks
		11-Persentase rekomendasi kebutuhan JF daerah	82	persen
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi	01-Nilai SAKIP KKP	85	nilai
		02-Persentase proyek PHLN KKP yang berstatus at risk	<59	persen
		03-Persentase dokumen pendanaan luar negeri KKP yang teregister	95	persen
		04-Capaian IKU KKP	75	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Capaian prioritas nasional KKP	91	nilai
		06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	1,8	nilai
		07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	83	persen
		08-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP	92	indeks
		09-Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	87	nilai
		10-Persentase peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif dalam rangka mendukung ekonomi biru	10	persen
		11-Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional	95	persen
	04-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN	01-Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	opini
		02-Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	level
		03-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	92	nilai
		04-Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,36	indeks
		05-Indeks pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	indeks
		06-Persentase Pengelolaan PNBPN sektor kelautan dan perikanan	100	persen
		07-Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan realisasi anggaran sekretariat jenderal TA 2024	<0,5	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		08-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja di lingkungan sekretariat jenderal	95	persen
		09-Nilai kinerja perencanaan anggaran sekretariat jenderal	81,5	nilai
		10-Persentase implementasi standar biaya keluaran KKP	100	persen
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi, dan informasi publik	01-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	95	indeks
		02-Nilai penilaian mandiri keterbukaan informasi publik KKP	94	nilai
		03-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	95	persen
		04-Nilai kepuasan terhadap layanan perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	90	nilai
	02-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi, pengadaan barang/jasa dan ketatausahaan pimpinan	01-Tingkat digitalisasi arsip KKP	85	nilai
		02-Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KKP	85	indeks
		03-Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP	5	nilai
		04-Nilai survei kepuasan masyarakat layanan protokoler dan ketatausahaan pimpinan	85	nilai
		05-Indeks survei kepuasan masyarakat layanan kerumahtanggaan kantor pusat	85	indeks
		06-Nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	80	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		07-Persentase rencana umum pengadaan Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada SiRUP	80	persen
		08-Persentase pelaksanaan manajemen hemat energi KKP	75	persen
		09-Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPBJ KKP	100	persen
	03-Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup level II Setjen	01-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi	75	nilai
		02-Nilai PM SAKIP level II Setjen	87	nilai
		03-Indeks profesionalitas ASN level II Setjen	87	indeks
		04-Persentase penyelesaian temuan BPK level II setjen	100	persen
		05-Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja level II Setjen	85	persen
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-Undangan level II setjen	100	persen
		07-Persentase penyerapan anggaran level II Setjen	>95	persen
2329-Pengelolaan Data dan Informasi	01-Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan data dan informasi KP	01-Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan	91	persen
		02-Indeks layanan aplikasi sistem informasi	3,5	indeks
		03-Persentase layanan sistem informasi pusat kontrol maritim	77	persen
		04-Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,85	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		05-Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	76	nilai
		06-Persentase pemenuhan data citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	90	persen
		07-Persentase pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi	100	persen
		08-Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	3	indeks
		09-Tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan	70	persen
		10-Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP	3	nilai
		11-Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP	2,75	nilai
		12-Indeks pelayanan publik KKP	4,6	indeks
		13-Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP	88,87	nilai
		14-Survei kepuasan masyarakat (SKM) KKP	89,6	nilai
		15-Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	persen
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	01-Terkelolanya modal usaha kelautan dan perikanan	01-Realisasi PNBP badan layanan umum	30	Rp miliar
		02-Realisasi penyaluran pinjaman Dana bergulir lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan	1,7	Rp triliun
		03-Persentase hasil perhitungan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Penyelesaian modernisasi Badan Layanan Umum (BLU)	81	nilai
		05-Nilai kepuasan pemanfaatan atas layanan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan	86	nilai
		07-Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan atau pendampingan usaha	81	persen
2335-Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	01-Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja mitra	01-Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan mitra inspektorat	≤0,5	persen
		02-Persentase implementasi reformasi birokrasi lingkup mitra inspektorat	86	persen
		03-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra inspektorat	85	persen
		04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengawasan kepada mitra itjen KKP	18	rekomen dasi
		05- Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Integritas lingkup KKP	76	nilai
		06-Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat lingkup KKP	100	persen
	02-Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal	01-Nilai hasil telaah sejawat inspektorat lingkup Inspektorat jenderal	85	nilai
		02-Persentase implementasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	80	persen
		03-Tingkat kepatuhan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	01-Manajemen kinerja inspektorat jenderal yang akuntabel	01-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Inspektorat Jenderal	≤0,5	persen
		02-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal	85	persen
		03-Penilaian mandiri SAKIP Inspektorat Jenderal	88	nilai
		04-Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal	92	nilai
		05-Nilai kinerja perencanaan anggaran Inspektorat Jenderal	81,5	nilai
		06-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal	3,5	nilai
		07-Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	88	indeks
		08-Nilai pengawasan kearsipan internal Inspektorat Jenderal	80	nilai
		09-Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP Inspektorat Jenderal	76	persen
		10-Indeks kepuasan mitra terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal	4,05	indeks
		11-Persentase penyelesaian rancangan regulasi dan tata kelola lingkup Inspektorat Jenderal	100	persen
		12-Persentase pemenuhan dukungan layanan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	100	persen
		13-Persentase fasilitasi sistem informasi manajemen pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal	80	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		14-Nilai penilaian mandiri pembangunan integritas lingkup inspektorat jenderal	76	nilai
2342-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	01-Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	81,5	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	87	indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	88	persen
		04-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap	81	persen
		05-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	3,5	nilai
		06-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	76	persen
		07-Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	81	persen
		08-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Tangkap	90	persen
		09-Persentase implementasi kerja sama bidang perikanan tangkap	82	persen
		10-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	85	persen
		11-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	≤ 0,5	persen
		12-Nilai survey Kepuasan masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	88,5	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		13-Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	100	persen
		14-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang perikanan tangkap	100	persen
		15-Persentase penyelesaian masalah hukum	100	nilai
		16-Persentase unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	54	persen
		17-Unit kerja lingkup ditjen perikanan tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	unit kerja
		18-Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	80	nilai
		19-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92	nilai
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	01-Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	84	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	87	indeks
		03-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	85	persen
		04-Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	81,50	nilai
		05-Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen Perikanan Budi Daya	96	persen
		06-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan	100	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		menteri di bidang perikanan budi daya		
		07-Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	80	nilai
		08-Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	3,5	nilai
		09-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	<0,5	persen
		10-Persentase Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	75	persen
		11-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	76	persen
		12-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Budi Daya	92	nilai
		13-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	81	persen
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	85	persen
		02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	persen
		03-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategi Ditjen PSDKP	81	persen
		04-Unit Kerja Ditjen. PSDKP berpredikat menuju WBK	16	unit
		05-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	92	nilai
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	81,5	nilai
		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,5	nilai
		09-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	87	indeks
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100	persen
		11-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen. PSDKP	80	nilai
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Ditjen. PSDKP	76	persen
		13-Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran	100	persen
		14-Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA	100	persen
		15-Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PSDKP	95	persen
		16-Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		17-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	85	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		18-Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		19-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	nilai
		20-Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	nilai
		21-Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		22-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	indeks
		23-Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		24-Tingkat pemahaman peserta pelatihan/bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	nilai
		25-Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	83	persen
		26-Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	inovasi
		27-Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100	persen
		28-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	nilai
		29-Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60	nilai
		30-Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	indeks
		31-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem	95	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		manajemen pengetahuan yang terstandar unit kerja lingkup Ditjen PSDKP		
		32-Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PSDKP	82,5	persen
		33-Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	75	nilai
		34-Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	80	persen
		35-Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani	80	persen
		36-Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	indeks
2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	01-Indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Ditjen PDSPKP	92	nilai
		02-Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen PDSPKP	87	indeks
		03-Penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP	86	nilai
		04-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen PDSPKP	3,5	nilai
		05-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP	85	persen
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen PDSPKP	<0,5	persen
		07-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP	81	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	100	persen
		09-Persentase unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan di lingkungan Ditjen PDSPKP	100	persen
		10-Nilai kinerja perencanaan anggaran di lingkungan Ditjen PDSPKP	81,5	nilai
		11-Tingkat kepatuhan pengelolaan data di lingkungan Ditjen PDSPKP	96	persen
		12-Nilai pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen PDSPKP	80	nilai
		13-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP di lingkungan Ditjen PDSPKP	76	persen
		14-Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan	≤5	persen
		15-Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup Ditjen PDSPKP	100	persen
		16-Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup DJPDSPKP	100	persen
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	01-Terwujudnya layanan Dukungan manajerial yang baik lingkup ditjen pengelolaan kelautan dan ruang laut	01-Nilai PM SAKIP Ditjen PKRL	88	nilai
		02-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL	92	nilai
		03-Nilai kinerja perencanaan anggaran DJPKRL	81,5	nilai

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		04-Indeks profesionalitas ASN DJPKRL	87	indeks
		05-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan DJPKRL	<0,5	persen
		06-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL	85	persen
		07-Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan DJPKRL	8	unit kerja
		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP DJPKRL	3,5	nilai
		09-Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis DJPKRL	81	persen
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPKRL	76	persen
		11-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	100	persen
		12-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPKRL	91	persen
		13-Nilai pengawasan kearsipan internal DJPKRL	80	nilai
2378-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP	85	persen
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	≤0,5	persen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
		03-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPSDMKP	81	persen
		04-Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPSDMKP	17	unit kerja
		05-Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	88	nilai
		06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	92	nilai
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPSDMKP	81,5	nilai
		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPSDMKP	3,5	nilai
		09-Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	87	indeks
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	100	persen
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDMKP	80	nilai
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	76	persen
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan badan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP	85	persen
		02-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	<0,5	persen
		03-Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP	81	indeks

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN		
		04-unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	2	unit kerja		
		05-Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86	nilai		
		06-Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	nilai		
		07-Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP	81,50	nilai		
		08-Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,5	nilai		
		09-Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP	87	indeks		
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	100	persen		
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	80	nilai		
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP	76	persen		
		13-Indeks survey kepuasan masyarakat lingkup BPPMHKP	3,36	indeks		
		4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	01-Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	01-Aparatur KKP yang diberikan beasiswa	167	orang
				02-Aparatur KKP yang diberikan izin belajar	68	orang
03-Aparatur KKP yang mendapat pendidikan dan pelatihan (diklat)	4.525			orang		

E. Dukungan terhadap Prioritas Nasional

PN yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
Prioritas Nasional #2: memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
	Program Kualitas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	Program Dukungan Manajemen
Prioritas Nasional #5: melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Prioritas Nasional #8: memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Program Kualitas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 91 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2025

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
01-Sekretariat Jenderal	
WA-Program Dukungan Manajemen	
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama	
AEC-Kerja sama	
002-Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	2.252.372
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
957-Layanan Hukum	7.900.000
969-Layanan Bantuan Hukum	600.000
PEC-Kerja sama	
001-Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	5.500.000
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.250.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	11.383.782
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	
AEA-Koordinasi	
001-Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar Mitra dan Stakeholder Kelautan dan Perikanan	10.099.963
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	1.390.000
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.867.500

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.680.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	6.224.628
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	
BMB-Komunikasi Publik	
001-Layanan Komunikasi Publik	12.191.014
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	3.571.622
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.206.000
959-Layanan Protokoler	28.623.778
962-Layanan Umum	55.084.270
994-Layanan Perkantoran	301.756.848
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	15.669.766
971-Layanan Prasarana Internal	11.649.051
2329-Pengelolaan Data dan Informasi	
BMA-Data dan Informasi Publik	
001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	3.648.560
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.092.495
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
001-Sistem Informasi Pemerintahan	12.233.365
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Layanan Data Kelautan dan Perikanan	4.600.000
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.000.000
002-Sarana Data Citra Satelit Radar	606.731
RCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.459.766
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	8.644.323
BIF-Pengawasan dan Pengendalian Layanan	
001-Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1.950.434
BMA-Data dan Informasi Publik	
001-Layanan Teknologi Informasi LPMUKP	497.600
CAN-Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Layanan Pengadaan Perangkat TIK	120.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
962-Layanan Umum	3.168.205
994-Layanan Perkantoran	22.779.369
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	35.000
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	
001-Laporan Pengelolaan Keuangan	746.502
002-Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	594.144
003-Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	171.730
02-Inspektorat Jenderal	
WA-Program Dukungan Manajemen	
2335-Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	206.800
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	720.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	526.667
961-Layanan Reformasi Kinerja	120.960
965-Layanan Audit Internal	28.760.269
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	155.127
2336-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.375.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
956-Layanan BMN	125.802
957-Layanan Hukum	197.482
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	214.725
962-Layanan Umum	336.881
963-Layanan Data dan Informasi	952.450
994-Layanan Perkantoran	43.592.339
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	1.845.500
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	516.624
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.266.543
03-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
002-Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	1.000.000
003-Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	550.000
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	500.000
ACA-Perizinan Produk	
001-Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	1.250.000
ADC-Sertifikasi Produk	
001-Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	750.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	1.512.087
BKB-Pemantauan Produk	
001-Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	250.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya (TP)	-
PCA-Perizinan Produk	
001-Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	261.350

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
002-Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbikan	-
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500.000
002-Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	1.250.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	476.563
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	15.276.822
003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	26.700.000
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	1.800.000
BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	2.000.000
002-Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	27.312.383
004-Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	1.000.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanan	-
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	1.500.000
002-Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	113.600
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	550.000
002-Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	22.025.605
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	336.000.000
004-Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	263.692.000
005-Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
006-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	70.000.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
ACA-Perizinan Produk	
001-Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.175.000
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	-
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap (TP)	1.100.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	4.000.000
PCA-Perizinan Produk	
001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	475.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	600.000
002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	1.000.000
003-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.000.000
004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	500.000
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	800.000
002-Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	-
005-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project (Lautra)</i>	1.000.000
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	400.000
002-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	-
003-Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	1.000.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	3.500.000
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Perairan Darat	500.000
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas	500.000
003-Rekomendasi kebijakan alokasi SDI	500.000
BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk	250.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	400.000
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	500.000
003-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	2.000.000
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	400.000
004-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dikelola kelembagaannya - <i>Ocean for Prosperity Project (Lautra)</i>	9.000.000
QKB-Pemantauan Produk	
001-Laporan Data Log Book penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
002-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	-
WA-Program Dukungan Manajemen	
2342-Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
955-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8.000.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	2.500.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
957-Layanan Hukum	2.000.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.300.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.000.000
962-Layanan Umum	800.000
963-Layanan Data dan Informasi	12.126.350
994-Layanan Perkantoran	366.744.447
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	12.000.000
971-Layanan Prasarana Internal	8.000.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	3.978.623
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12.503.000
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.296.265
955-Layanan Manajemen Keuangan	9.935.480
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	700.000
04-Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
7021-Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	
ACA-Perizinan Produk	
001-Rekomendasi teknis untuk perizinan usaha perikanan budi daya	
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
002-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	14.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	1.000.000
QED-Bantuan Tanaman	
002-Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	2.625.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	9.350.000
002-Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	10.000.000
003-Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	-

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
7022-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	76.928
002-Unit Budi daya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	185.000
003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	102.500
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U01-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau	34.385
U01-Sampel Residu Ikan Air Payau Layanan UPT	224.808
U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau Layanan UPT	751.355
U02-Sampel Obat Ikan Ikan Air Payau	17.226
U03-Sampel Mutu Pakan Ikan Air Payau	29.400
U03-Sampel Patologi Ikan Air Payau Layanan UPT	117.612
U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau Layanan UPT	375.360
U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau Layanan UPT	661.500
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	1.000.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air payau yang akan disertifikasi	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat	-
QEL-Bantuan Hewan	
U02-Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	979.232
U03-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	19.396
U07-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	726.344
U08-Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	2.083.068
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	625.000
002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	420.000
U03-Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Payau (AMU/AMR) yang diuji	137.511
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	560.101

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
002-Calon Induk Unggul Udang yang diproduksi	7.832.940
004-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1.230.876
005-Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	676.413
006-Benih Udang yang Diproduksi	1.793.520
007-Ikan Konsumsi Hasil Budi Daya yang Diproduksi	8.504.189
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Klaster kawasan Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng	-
002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	6.250.000
003-Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP)	400.000.000
004-Prasarana produksi perikanan budi daya di UPT	-
006-Budi Daya Udang Terintegrasi - ISF	-
008-Kluster Komoditas Unggulan Air Payau Berbasis Kawasan	-
7023-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	
AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	
001-Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan budi daya	11.000.000
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	46.122
002-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	8.000
003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	102.500
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U01-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Laut	8.993
U01-Sampel Residu Ikan Air Laut Layanan UPT	102.986
U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut Layanan UPT	224.884
U03-Sampel Patologi Ikan Air Laut Layanan UPT	52.272
U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut Layanan UPT	178.848
U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT	192.080
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	1.000.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	4.500.000
QEL-Bantuan Hewan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
U04-Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	-
U05-Calon Induk Unggul Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	-
U09-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	174.574
U10-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	10.646.932
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	140.000
U02-Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	68.625
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	13.317
002-Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	2.710.048
003-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	181.900
004-Benih Kepiting yang diproduksi	170.811
005-Benih Ikan Laut yang diproduksi	990.706
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan	10.000.000
7024-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	
ACA-Perizinan Produk	
001-Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	300.000
BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	
001-Unit Pembenihan Ikan yang dibina penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	376.950
002-Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	293.000
003-Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik	182.500
BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
U01-Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Tawar	37.103
U01-Sampel Residu Ikan Air Tawar Layanan UPT	210.213
U02-Sampel Kualitas Air Ikan Air Tawar Layanan UPT	400.633
U02-Sampel Obat Ikan Ikan Air Tawar	17.232
U03-Sampel Mutu Pakan Ikan Air Tawar	48.026
U03-Sampel Patologi Ikan Air Tawar Layanan UPT	52.773
U04-Sampel Mikrobiologi Ikan Air Tawar Layanan UPT	248.257
U05-Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Tawar Layanan UPT	241.251

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	1.000.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air tawar yang akan disertifikasi	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	41.950.000
002-Kampung Perikanan Budi Daya yang dikembangkan	-
QEL-Bantuan Hewan	
U01-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1.961.372
U06-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	9.271.165
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	375.000
002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	140.000
U03-Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	96.075
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	6.389.459
002-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1.921.700
003-Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	2.220.550
004-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	-
005-Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia (TOSCA) - Hibah GEF	12.964.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	-
002-Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia	-
WA-Program Dukungan Manajemen	
2348-Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPB	
AEC-Layanan Kerjasama	
001-Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya	1.519.013
CAN-Sarana Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.775.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	600.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
957-Layanan Hukum	700.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.745.871
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	800.000
962-Layanan Umum	4.193.166
963-Layanan Data dan Informasi	4.300.000
994-Layanan Perkantoran	315.519.520
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	300.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
001-Layanan Manajemen SDM	3.934.033
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.786.186
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.865.371
955-Layanan Manajemen Keuangan	6.806.973
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	380.000
05-Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur, Kriteria	
001-NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220.000
BKB-Pemantauan Produk	
001- Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau	1.183.000
CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	900.000
CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pendukung yang dibangun	-
FBA-Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547.000
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001-Operasi Kapal Pengawas	310.528.588
002-Operasi Pesawat Patroli	40.000.000
003-Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	9.828.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kapal pengawas	-
002- <i>Speedboat</i> pengawas	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dibangun	8.968.000
RCG-OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
001-Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	58.849.447
2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	264.000
AEA-Koordinasi	
001-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	2.754.000
AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur	
001-NSPK bidang Penanganan Pelanggaran	194.000
BCB-Perkara Hukum Lembaga	
001-Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	300.000
BCE-Penanganan Perkara	
001-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana	2.000.000
002-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	2.330.000
003-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1.098.000
BKB-Pemantauan Produk	
001-Penanganan Perkara TPKP yang dipantau	1.650.000
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	200.000
002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	322.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
ACA-Perizinan Produk	
001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1.511.000
AEA-Kordinasi	
001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	1.732.000
002-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	1.559.150
AFA-Norma, Standard, Kriteria, Prosedur	
001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	198.000
002-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	355.000
BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1.995.952
002-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	679.690
BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	
001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	150.000
002-Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	400.000
BKB-Pemantauan Produk	
001-Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	2.998.988
002-Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	1.595.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	454.508
002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	2.216.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha)	
001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	7.654.000
002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9.532.000
RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3.811.000
2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	242.000
002-Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	264.000
003-Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	264.000
004-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	270.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
BKB-Pemantauan Produk	
001-Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	330.500
BMB-Komunikasi Publik	
001-Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	663.987
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	8.900.000
WA-Program Dukungan Manajemen	
2355-Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	
AEC-Kerja sama	
001-Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.600.000
CAN-Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.800.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	1.112.000
957-Layanan Hukum	790.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.374.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	869.000
962-Layanan Umum	10.533.584
963-Layanan Data dan Informasi	1.185.000
969-Layanan Bantuan Hukum	42.976
994-Layanan Perkantoran	280.009.193
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	4.280.000
971-Layanan Prasarana Internal	1.200.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	3.425.000
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	6.670.000
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.555.200
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.450.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	5.760.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
961-Layanan Reformasi Kinerja	5.000.000
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.240.000
06-Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing PKP	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha Pemasaran yang dibina	810.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
003-Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	515.950
PDA-Standarisasi Produk	
001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	540.000
PEE-Kemitraan	
001-Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	200.000
002-Kerjasama pemasaran rumput laut	150.000
PEH-Promosi	
001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	31.874.000
002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	3.376.000
003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	900.000
004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	1.200.000
005-Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	800.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
001-Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	400.000
002-Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	300.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Peralatan Pemasaran	6.979.500
003-Kendaraan Pemasaran Ikan	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	400.000
002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	400.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	38.000.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
001-Bursa Ikan	-
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
ADA-Standardisasi Produk	
001-Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	705.000
BMA-Data dan Informasi Publik	
002-Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan	400.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	6.053.500
QDI-Falitasi dan pembinaan Industri	
001-Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	2.650.050
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana sistem rantai dingin hasil KP	2.046.000
002-Sarana Pengolahan Hasil KP	4.974.500
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibangun	-
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
ADA-Standardisasi Produk	
001-Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil kelautan dan perikanan	122.153
002-Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	250.000
003-Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	525.000
AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	
001-Masyarakat yang menerima diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	300.000
DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	
001-Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	300.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	450.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Badan Usaha yang difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	360.979
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.991.944

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pendukung Operasional Gudang beku	1.000.000
7025-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	400.000
AEE-Kemitraan	
001-Kemitraan dalam rangka pengadaan, distribusi dan penyimpanan	1.125.000
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	481.950
BMA-Data dan Informasi Publik	
051-Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	600.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
004-Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	500.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)	450.000
QEG-Bantuan Perlatan/Sarana	
001-Sarana Penyimpanan Produk KP	2.300.000
002-Sarana Distribusi Logistik Produk KP	-
RBQ -Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Gudang Beku dan Kelengkapannya	-
7026-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
ACD-Perizinan Lembaga	
001-Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	375.000
PEH-Promosi	
001-Promosi usaha dan investasi KP	1.400.000
QDB- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
001- Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	440.000
QDG- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	654.000
002-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	6.150.000
RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Prasarana Kawasan Hilirisasi KP	3.600.000
WA-Program Dukungan Manajemen	
2361-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP	
AEC-Kerja sama	
001-Layanan Kerja Sama	898.000
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
051-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PDSPKP yang disediakan	-
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
957-Layanan Hukum	1.200.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.559.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	800.000
962-Layanan Umum	3.991.043
963-Layanan Data dan Informasi	2.000.000
969-Layanan Bantuan Hukum	210.000
994-Layanan Perkantoran	106.621.051
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana dan Prasana Internal	-
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	800.000
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.800.000
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.110.000
955-Layanan Manajemen Keuangan	1.630.000
956-Layanan Barang Milik Negera	1.390.000
961-Layanan Reformasi Kinerja	800.000
07-Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362-Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	805.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Biota Perairan	-

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
003-Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	-
004-Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	-
PCA-Perizinan Produk	
001-Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	-
002-Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	6.960.084
PEE-Kemitraan	
001-Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	550.296
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	3.331.218
002-Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	4.480.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	800.000
002-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	890.000
002-Oceans for Prosperity Project - Lautra	283.744.000
003-Kawasan Konservasi yang dihitung Neraca Sumberdaya	-
REB-Konservasi Jenis/Spesies	
001-Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES (kumulatif)	4.072.690
002-Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	-
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	500.000
002-Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	800.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi	
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	-
PEE-Kemitraan	
001-Jejarang dan Kemitraan Pengendalian Perubahan Iklim	-
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	557.680
002-Dokumen NSPK Pengendalian Perubahan Iklim	-
003-Dokumen NSPK Mitigasi Bencana	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	141.680
002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	985.830
003-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Bantuan Pengembangan Kawasan Karbon Biru	
002-Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	
003-Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih	701.870
004-Bantuan Pusat Rehabilitasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir	
RBH-Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	
001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
002-Prasarana penanggulangan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi	398.770
002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	
003-Kawasan padang lamun yang direhabilitasi	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
ABW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	2.220.650
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	3.585.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	233.841
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	2.000.000
002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	2.000.000
003-Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	4.000.000
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	4.200.000
005-Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	3.000.000
006-Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan	3.500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	8.550.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Korporasi Petambak Garam	
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Wisata Bahari	
002-Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	
003-Sarana niaga garam rakyat	4.000.000
004-Sarana produksi biofarmakologi	
RAI-Sarana Pengembangan Kawasan	
001-Lahan Garam yang difasilitasi	
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.000.000
002-Masyarakat Pemanfaat Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	-
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	8.600.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.599.999
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000
002-Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	381.938
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7.000.000
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.500.000
2366-Penataan Ruang Laut	
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	
007-Rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	8.200.000
008-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL di daerah	3.900.000
009-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL yang beresiko rendah	6.000.000
010-Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	2.300.000
PBW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	3.000.000
002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam RTR KSN	3.250.000
003-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	3.500.000
007-Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1.250.000
008-Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.000.000
009-Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	3.100.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	1.440.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1.200.000
002-Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000
002-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000
003-Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	1.000.000
WA-Program Dukungan Manajemen	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
2367-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
AEC-Kerjasama	
051-Layanan Kerjasama	2.569.000
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Perangkat Pengolah Data dan Informasi	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	1.154.074
957-Layanan Hukum	3.607.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.743.394
960-Layanan Manajemen Organisasi	2.966.345
962-Layanan Umum	5.456.506
963-Layanan Data dan Informasi	1.273.180
994-Layanan Perkantoran	174.137.173
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	
971-Layanan Prasarana Internal	-
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	2.385.332
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.017.740
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.263.534
955-Layanan Manajemen Keuangan	3.062.765
961-Layanan Reformasi Kinerja	426.576
12-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
122-Inovasi yang Diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan	100.000
ADF-Sertifikasi Lembaga	
141-Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan	713.500
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan	82.500
DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
431-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	435.600
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
641-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	-
002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	-
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
711-Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1.236.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
002-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4.972.121
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
831-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	32.685.702
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
121-Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	4.210.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
161-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	300.000
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
241-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	-
PDE-Akreditasi Lembaga	
541-Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.920.000
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
545-Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
643-Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	1.348.000
QGC-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	
671-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	17.255.600
RAA-Sarana Bidang Pendidikan	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
711-Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	9.666.360
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
715-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	450.000
RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200.000
RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	
725-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18.101.453
SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	
811-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	133.846.232
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
126-Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	38.000
128-Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	38.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
166-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan KP	200.000
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
246-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	-
DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
436-Penyuluh Perikanan yang bersertifikat kompetensi	50.000
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
646-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
646-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	27.000.000
648-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi	1.791.405
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	
696-Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	37.682
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
716-Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	250.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
726-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
WA-Program Dukungan Manajemen	
2378-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
AEC-Kerja sama	
964-Layanan Kerja Sama	2.500.000
BMA-Informasi dan Komunikasi Publik	
291-Data dan Informasi Publik Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
311-Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-
CBT-Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
321-Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	927.231
957-Layanan Hukum	478.900
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.173.695
959-Layanan Protokoler	-
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	600.000
962-Layanan Umum	5.412.958
963-Layanan Data dan Informasi	811.012
969-Layanan Bantuan Hukum	21.100
994-Layanan Perkantoran	1.012.638.604
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	7.751.059
971-Layanan Prasarana Internal	5.000.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	827.137
968-Layanan Pendidikan Kedinasan	-
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.998.380
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.930.020
955-Layanan Manajemen Keuangan	3.147.917
961-Layanan Reformasi Kinerja	-
965-Layanan Audit Internal	-
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	760.675
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
461-Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	150.000
4345-Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	-
971-Layanan Prasarana Internal	-
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	12.139.360
13-Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer	300.000
002-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen	300.000
BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	700.000
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	2.100.000
002-Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	3.900.000
PDF-Sertifikasi Lembaga	
001-Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	2.000.000
002-Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	3.750.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	750.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.000.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan	
001-Sarana Pengujian Mutu	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan	
001-Prasarana Pengujian Mutu	500.000
7010-Manajemen Mutu	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	600.000
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	200.000
DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	500.000
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	3.500.000
002-Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	2.100.351
PDD-Standarisasi Lembaga	
001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.400.000
002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.400.000
003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	700.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	6.875.000
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	500.000
WA-Program Dukungan Manajemen	
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
CAN-Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP	200.000

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP000)
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	
956-Layanan BMN	500.000
957-Layanan Hukum	300.000
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	550.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	550.000
962-Layanan Umum	9.600.000
963-Layanan Data dan Informasi	500.000
994-Layanan Perkantoran	286.930.430
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951-Layanan Sarana Internal	200.000
971-Layanan Prasarana Internal	300.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	
954-Layanan Manajemen SDM	511.016
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.000.000
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	532.939
955-Layanan Manajemen Keuangan	2.100.000
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	300.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

**RINCIAN PRIORITAS NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
Prioritas Nasional 2 - memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	
01 - Sekretariat Jenderal	
WA - Program Dukungan Manajemen	
2322 - Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	
PEC - Kerjasama	
001 - Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	5.500.000
2329 - Pengelolaan Data dan Informasi	
QMA - Data dan Informasi Publik	
001 - Layanan Data Kelautan dan Perikanan	4.600.000
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.000.000
002 - Sarana Data Citra Satelit Radar	606.731
RCL - OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001 - OM Sarana Data Citra Satelit Radar	4.459.766
03 - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2337 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	
PCA - Perizinan Produk	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	261.350
002-Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	-
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi	500.000
002-Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	1.250.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	476.563
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	-
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	
002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	15.276.822
003-Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	26.700.000
2328- 2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
001-Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	1.500.000
002-Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	113.600
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	550.000
002-Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	22.025.605
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
003-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	336.000.000
004-Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>Eco Fishing Port</i>	263.692.000
005-Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
006-Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II	70.000.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-
2339-Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan	4.000.000
PCA-Perizinan Produk	
001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	475.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	600.000
002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	1.000.000
003-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.000.000
004-Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	500.000
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	800.000
002-Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	-
005-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	1.000.000
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	
001-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	400.000
002-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	-
003-Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	1.000.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	3.500.000
2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	400.000
002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	500.000
003-Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan	2.000.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	
001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	400.000
004-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaanya - <i>Ocean for Prosperity Project (Lautra)</i>	9.000.000
QKB-Pemantauan Produk	
001-Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
002-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	-
04-Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
7022-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	1.000.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	4.500.000
QEL-Bantuan Hewan	
U04-Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	-
U05-Calon Induk Unggul Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	-
U09-Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	174.574
U10-Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	10.646.932
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut yang diuji	140.000
U02-Sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	68.625
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	13.317
002-Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	2.710.048
003-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	181.900
004-Benih Kepiting yang diproduksi	170.811

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
005-Benih Ikan Laut yang diproduksi	990.706
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan	10.000.000
7024-Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	1.000.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Rekomendasi bidang lahan budi daya ikan air tawar yang akan disertifikasi	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	41.950.000
002-Kampung Perikanan Budi Daya yang dikembangkan	-
QEL-Bantuan Hewan	
U01-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1.961.372
U06-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	9.271.165
QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit	
001-Sampel Monitoring Residu Ikan Air Tawar yang diuji	375.000
002-Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Tawar yang diuji	140.000
U03-Sampel <i>Surveillance</i> Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	96.075
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	6.389.459
002-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1.921.700
003-Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	2.220.550
004-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	-
005- <i>Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia</i> (TOSCA) - Hibah GEF	12.964.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	-
002- <i>Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia</i>	-
05-Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	
001-Operasi Kapal Pengawas	310.528.588
002-Operasi Pesawat Patroli	40.000.000
003-Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	9.828.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Kapal pengawas	-
002- <i>Speedboat</i> pengawas	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dibangun	8.968.000
RCG-OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
001-Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	58.849.447
2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha)	
001-Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	7.654.000
002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9.532.000
RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3.811.000
2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	8.900.000
06-Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
003-Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	515.950
PDA-Standarisasi Produk	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	540.000
PEE-Kemitraan	
001-Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	200.000
PEH-Promosi	
001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	31.874.000
002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	3.376.000
003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	900.000
004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	1.200.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
001-Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	300.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Peralatan Pemasaran	6.979.500
003-Kendaraan Pemasaran Ikan	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	400.000
002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	400.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	38.000.000
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	
001-Bursa Ikan	-
2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
QDG -Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-Pelaku Usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	6.053.500
QDI-Falitasi dan pembinaan Industri	
001-Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	2.650.050
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana sistem rantai dingin hasil KP	2.046.000
002-Sarana Pengolahan Hasil KP	4.974.500

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dibangun	-
5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	450.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Badan Usaha yang difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	360.979
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan	1.991.944
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Pendukung Operasional Gudang beku	1.000.000
7025-Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
004-Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	500.000
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	
001-Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)	450.000
QEG-Bantuan Perlatan/Sarana	
001-Sarana Penyimpanan Produk KP	2.300.000
002-Sarana Distribusi Logistik Produk KP	-
RBQ -Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Gudang Beku dan Kelengkapannya	-
7026-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEH-Promosi	
001-Promosi usaha dan investasi KP	1.400.000
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
001-Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	440.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	
001-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha	654.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
002-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	6.150.000
RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan	
001-Prasarana Kawasan Hilirisasi KP	3.600.000
07-Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	
2362-Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	805.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Biota Perairan	-
003-Rekomendasi Peningkatan Luas Kawasan Konservasi	-
004-Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi	-
PCA-Perizinan Produk	
001-Perizinan Produk Konservasi Ekosistem	-
002-Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	6.960.084
PEE-Kemitraan	
001-Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	550.296
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	-
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	3.331.218
002-Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	3.480.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	800.000
002-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	890.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
002-Oceans for Prosperity Project - Lautra	283.744.000
003-Kawasan Konservasi yang dihitung Neraca Sumberdaya	-
REB-Konservasi Jenis/Spesies	
001-Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES (kumulatif)	4.072.690
002-Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	-
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	500.000
002-Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	800.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi	-
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	557.680
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	141.680
002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	985.830
003-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
001-Bantuan Pengembangan Kawasan Karbon Biru	-
003-Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih	701.870
004-Bantuan Pusat Rehabilitasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi	398.770
003-Kawasan padang lamun yang direhabilitasi	-
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	2.000.000
002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	2.000.000
003-Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam	4.000.000
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	4.200.000
005-Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut	3.000.000
006-Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan	3.500.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan	8.550.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Korporasi Petambak Garam	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana Wisata Bahari	-
003-Sarana niaga garam rakyat	4.000.000
004-Sarana produksi biofarmakologi	-
RAI-Sarana Pengembangan Kawasan	
001-Lahan Garam yang difasilitasi	-
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.000.000
002-Masyarakat Pemanfaat Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya	-
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	8.600.000
002-Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.599.999
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000
002-Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	381.938
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7.000.000
QMA-Data dan Informasi Publik	
001-Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.000.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.500.000
2366-Penataan Ruang Laut	
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	
007-Rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	8.200.000
008-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL di daerah	3.900.000
009-Rekomendasi kebijakan verifikasi KKPRL yang beresiko rendah	6.000.000
010-Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	2.300.000
PBW-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	3.000.000
002-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam RTR KSN	3.250.000
003-Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR	3.500.000
007-Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1.250.000
008-Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.000.000
009-Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	3.100.000
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	1.440.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1.200.000
002-Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	-

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
001-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000
002-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000
003-Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	1.000.000
12-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
2375-Pelatihan Kelautan dan Perikanan	
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
641-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV)	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	-
002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	-
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
711-Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1.236.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
002-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4.972.121
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	
831-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	32.685.702
2376-Pendidikan Kelautan dan Perikanan	
PDE-Akreditasi Lembaga	
541-Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.920.000
PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM	
545-Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
643-Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	1.348.000
QGC-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	
671-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	17.255.600

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
RAA-Sarana Bidang Pendidikan	
711-Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan	9.666.360
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
715-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	450.000
RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	
721-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200.000
RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	
725-Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18.101.453
SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	
811-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	133.846.232
7020-Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
646-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	500.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
646-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	27.000.000
648-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi	1.791.405
QKA-Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	
696-Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	37.682
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
716-Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	250.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	
726-Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500.000
13-Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
PDC-Sertifikasi Produk	
001-Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	2.000.000
002-Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	4.000.000
PDF-Sertifikasi Lembaga	
001-Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	1.880.350
002-Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	3.869.650
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	750.000
QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	
001-Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	-
002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.000.000
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan	
001-Sarana Pengujian Mutu	500.000
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan	
001-Prasarana Pengujian Mutu	500.000
7010-Manajemen Mutu	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	3.500.000
002-Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	2.100.351
PDD-Standarisasi Lembaga	
001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.400.000
002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.400.000
003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	700.000
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	6.875.000

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	
001-Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem, dan regulasi	500.000
Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
04-Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
7021-Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	
001-Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	1.000.000
QED-Bantuan Tanaman	
002-Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	2.625.000
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
001-Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	9.350.000
002-Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - ' <i>Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>	10.000.000
003-Klaster Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun bagi masyarakat	-
06-Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
2357-Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
PEE-Kemitraan	
002-Kerjasama pemasaran rumput laut	150.000
PEH-Promosi	
005-Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	800.000
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	
002-Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	300.000
Prioritas Nasional 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
07-Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
001-Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	-
PEE-Kemitraan	
001-Jejarang dan Kemitraan Pengendalian Perubahan Iklim	-
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
002-Dokumen NSPK Pengendalian Perubahan Iklim	-
003-Dokumen NSPK Mitigasi Bencana	-
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	141.680
002-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	985.830
003-Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap Dampak Perubahan Iklim	-
QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	
002-Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	-
RBH-Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	
001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	-
RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	
002-Prasarana penanggulangan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	-
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	-
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
2363-Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	
004-Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT	-
QEG-Bantuan Peralatan/Sarana	
002-Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	-
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	

PRIORITAS NASIONAL/ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN (RP 000)
001-Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000
003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

**RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
PER PROGRAM DAN PER UNIT ORGANISASI ESELON I TAHUN 2025**

ANGGARAN TA 2025 (RP. 000)

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PROGRAM					JUMLAH
		PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	SETJEN	-	-	-	-	571.248.818	571.248.818
2	ITJEN	-	-	-	-	81.913.169	81.913.169
3	DITJEN PT	808.370.410	-	-	-	451.884.165	1.260.254.575
4	DITJEN PB	581.614.521	-	-	-	356.225.133	937.839.654
5	DITJEN PSDKP	490.212.810	-	-	-	336.895.953	827.108.763
6	DITJEN PDSPKP	-	127.450.526	-	-	127.809.094	255.259.620
7	DITJEN PKRL	107.311.429	-	310.219.118	-	206.062.739	623.593.286
8	BPPSDMKP	-	-	-	259.428.155	1.061.268.048	1.320.696.203
9	BPPMHKP	-	33.575.351	-	-	309.074.385	342.649.736

ANGGARAN TA 2025 (RP. 000)

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PROGRAM					JUMLAH
		PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	
JUMLAH		1.987.509.170	161.025.877	310.219.118	259.428.155	3.502.381.504	6.220.563.824

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAN www.politeknikaup.ac.id SUREL Politeknikaup@kkp.go.id

21 April 2025

Yth. Kepala Pusat Pendidikan KP
di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor: B.2010/POLTEK.AUP/TU.210/IV/2025

No	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Satu Buku	Untuk dipergunakan seperlunya

Diterima tanggal 22 April 2025

Penerima :
Nama Jabatan :
Analisis Monev dan
Pelaporan

Tanda Tangan :


Nama Lengkap :
Desianti Yuanita

Pengirim:

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ani Leilani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAN www.politeknikaup.ac.id SUREL Politeknikaup@kcp.go.id

21 April 2025

Yth. Kepala Pusat Pendidikan KP
di Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.2010/POLTEK.AUP/TU.210/IV/2025

No	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025	Satu Buku	Untuk dipergunakan seperlunya

Diterima tanggal April 2025

Penerima :

Nama Jabatan :

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :

Pengirim:

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ani Leilani



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2025

POLITEKNIK AHLI
USAHA PERIKANAN



#AUPWAVE

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Politeknik AUP pada Triwulan I Tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja Politeknik AUP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik AUP menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Politeknik AUP.

Secara umum capaian sasaran kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025 ini telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun diharapkan dapat terjadi optimalisasi dari peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Politeknik AUP pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Politeknik AUP dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas tenaga dan fikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan masukan kegiatan Politeknik AUP selanjutnya.

Jakarta, 21 April 2025
Direktur Politeknik AUP,



Ani Leilani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia.....	9
1.5 Potensi dan Permasalahan	11
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Rencana Kerja Tahunan	20
2.3 Perjanjian Kinerja	21
2.4 Pengukuran Kinerja.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama Politeknik AUP	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	53
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Politeknik AUP	54
BAB IV. PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP Tahun 2024 (Per 9 Januari 2025).....	v
Tabel 2. Keragaan SDM ASN Politeknik AUP.....	9
Tabel 3. Keragaan SDM ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 4. Keragaan SDM ASN berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 5. Keragaan SDM ASN berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 6. Keragaan SDM Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 7. Rekap Anggaran Rencana Kerja Tahunan Politeknik AUP Tahun 2025...	20
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Politeknik AUP Tahun 2025	21
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Politeknik AUP Tahun 2025	23
Tabel 10. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel 11. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	40
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	41
Tabel 13. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	43
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	46
Tabel 15. Capaian Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%)	51
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	52
Tabel 17. Tabel Realisasi Anggaran Politeknik AUP s.d triwulan I tahun 2025.....	53
Tabel 18. Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2024	56
Tabel 19. Capaian Kinerja tahun 2024	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025	x
Gambar 2. Struktur Organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan	8
Gambar 3. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025	24
Gambar 4. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja triwulan I tahun 2025 Politeknik AUP merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik AUP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2025. Politeknik AUP telah menetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025 yang berpedoman pada Perjanjian Kerja Pusat Pendidikan KP. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP di triwulan I tahun 2025 sebesar 108,24%.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada *Dashboard* kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NPSS diatas 100%. *Dashboard* kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realisasi dari 19 IKU Politeknik AUP adalah:

Tabel 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025 (Per 16 April 2025)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436		
		2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512		
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891		
		4	Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741		
		5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	100			
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100			
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6			
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1			
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1			
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60			
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85	85	86,67	101,96
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81			
		14	Indeks Profesionalitas ASN	84			

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
	Politeknik AUP (Indeks)				
	15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	80	100	120
	16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80			
	17 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92			
	18 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5			
	19 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100	100	100	100

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP pada triwulan I tahun 2025 sebesar 108,24%, yang dapat dilihat pada Dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada dashboard kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NPSS diatas 100%. Dashboard kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 3 (tiga) IKU Politeknik AUP pada hitungan capaian adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%), capaian 86,67% (101,96%);
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%), capaian 100% (120%);
3. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%), capaian 100% (100%);

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai Politeknik AUP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, maka Politeknik AUP sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPPSDM KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas. Setiap penyelenggara negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas, Politeknik AUP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Politeknik AUP diwajibkan untuk:

- a. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
- b. Menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Politeknik AUP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2024 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Politeknik AUP Interim triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang dilaporkan pada akhir Triwulan sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Politeknik AUP triwulan I Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi beberapa tujuan yaitu:

- a. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik AUP triwulan I tahun 2025 menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi di satu sisi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat di sisi lain;
- b. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Politeknik AUP;
- c. Sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Politeknik AUP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik AUP memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Politeknik AUP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- b. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. Pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
- h. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- j. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya;
- k. Pelaksanaan pengawasan internal.

Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, maka Politeknik AUP sebagai UPT BPPSDM KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yang menuntut azas akuntabilitas.

a. Kedudukan

- a.1. Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik AUP adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada sekretaris

badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- a.2. Pembinaan Politeknik AUP secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri.
- a.3. Politeknik AUP sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Direktur.

b. Tugas Pokok

Politeknik AUP mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Politeknik AUP terdiri atas:

c.1. Direktur dan Wakil Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud merupakan unsur pemimpin Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik AUP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, direktur menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
4. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
5. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
6. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
7. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data;
8. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
9. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan;
10. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya; dan

11. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik AUP.

c.2. Wakil Direktur

Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur. Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur terdiri atas:

1. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik selanjutnya disebut Wakil Direktur I.

Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.

2. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, dan data.

3. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter.

c.3. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.

c.4. Senat;

Senat sebagaimana dimaksud merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

c.5. Dewan Penyantun.

Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik AUP.

c.6. Program Studi

Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP. Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Program Studi dipimpin oleh ketua. Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas ketua dibantu oleh sekretaris.

c.7. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh kepala. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c.8. Pusat Penjaminan Mutu.

Pusat Penjaminan Mutu merupakan unsur pendukung akademik Politeknik AUP dibidang penjaminan mutu. Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh kepala. Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan

menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

c.9. Subbagian Umum

Subbagian Umum merupakan unsur pelaksana administrasi dibidang ketatausahaan. Subbagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c.10. Unit Penunjang

Unit Penunjang merupakan unsur penunjang Politeknik AUP untuk menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP. Unit Penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur III. Unit Penunjang terdiri atas:

1. Unit Pembangunan Karakter

Unit Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter dan pengelolaan asrama taruna.

2. Unit Perpustakaan

Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan melayani pengguna jasa perpustakaan

3. Unit Laboratorium;

Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk laboratorium, bengkel, kapal latih, tambak/kolam, dan *hatchery* secara terpadu.

4. Unit Teknologi Informatika

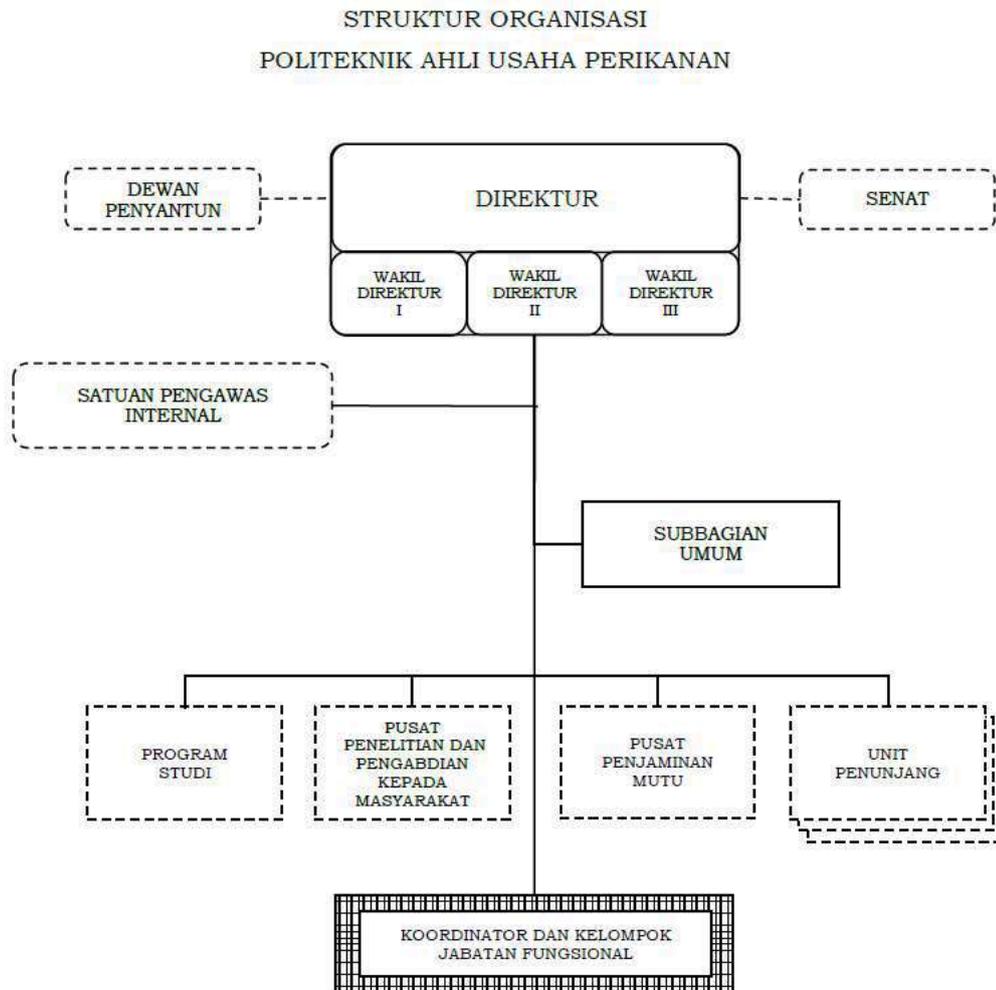
Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.

5. Unit Layanan Uji Kompetensi.

Unit Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.

c.11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Politeknik AUP. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Politeknik AUP.



Gambar 2. Struktur Organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan

1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan berkualitas. SDM Politeknik Ahli Usaha Perikanan terdiri atas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Saat ini Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki SDM sebanyak 377 orang yang terdiri atas 292 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) 39 orang Tenaga Non ASN dan 46 orang PJLP (data per 31 Maret 2025). Keragaan SDM ASN berdasarkan jenis jabatannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Keragaan SDM ASN Politeknik AUP

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Kepala Subbagian Umum	1	0,34
2	Dosen	180	61,64
3	Dokter Umum	3	1,03
4	Dokter Gigi	1	0,34
5	Analisis SDM Aparatur	1	0,34
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	0,34
7	Arsiparis Ahli Pertama	1	0,34
8	Pranata Hubungan Masyarakat	1	0,34
9	Pranata Laboratorium Pendidikan	3	1,03
10	Pranata Komputer	3	1,03
11	Pustakawan	3	1,03
12	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	2	0,68
13	Perawat	3	1,03
14	Perawat Gigi	1	0,34
15	Apoteker	1	0,34
16	Fungsional Umum	87	29,79
Jumlah		292	100

Sedangkan keragaan SDM ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keragaan SDM ASN berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-laki	203	69,52
2	Perempuan	89	30,48
Jumlah		292	100

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh SDM ASN Politeknik Ahli Usaha Perikanan, paling banyak S-2 (55,14%), kemudian diikuti

oleh SLTA/DI/DII (15,07%), S-3 (11,99%), S-1/D-IV (9,59%), D-III (5,14%) serta SLTP (2,05%) dan SD (1,03%). Distribusi jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Keragaan SDM ASN berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	S3	35	11,99
2	S2	161	55,14
3	S1/D4	28	9,59
4	D3	15	5,14
5	SLTA/D1/D2	44	15,07
6	SLTP	6	2,05
7	SD	3	1,03
Jumlah		292	100

Berdasarkan golongan, SDM ASN paling banyak golongan III, yaitu 50,68%, diikuti dengan urutan distribusi golongan IV sebanyak 36,99%, golongan II sebanyak 11,99% dan golongan I sebanyak 0,34%. Keragaan PNS berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Keragaan SDM ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	108	36,99
2	III	148	50,68
3	II	32	11,99
4	I	1	0,34
Jumlah		292	100

Keragaan SDM PNS Politeknik Ahli Usaha Perikanan menurut jabatan adalah sebagai berikut: Jabatan Struktural sebanyak 1 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 204 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 87 orang. Keragaan PNS berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Keragaan SDM Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Struktural	1	0,34
2	Fungsional Tertentu	204	69,86
3	Fungsional Umum	87	29,79
Jumlah		292	100

1.5 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Keberadaan Politeknik AUP sangat penting dan strategis bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam hal pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, karena:

1. Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat besar dan memerlukan sumberdaya manusia yang profesional dan produktif, dengan kemampuan bisnis;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan Revolusi Biru yaitu perubahan mendasar cara berfikir dari orientasi daratan menjadi orientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui program yang terintegrasi;
3. Meningkatkan SDM kelautan dan perikanan pada perguruan tinggi vokasi yang lebih menitikberatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dilengkapi dengan kompetensi yang bersertifikat, kemudian penerapan teknologi yang relevan dan terjual untuk mengantisipasi tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang;
4. Politeknik AUP merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Program Pascasarjana Terapan di bidang kelautan dan perikanan satu-satunya di Indonesia;
5. Okupasi lulusan Politeknik AUP di sektor kelautan dan perikanan sangat luas. Secara garis besar okupasi yang diisi lulusan menurut catatan selama ini adalah Aparatur Sipil Negara diberbagai unit kerja baik struktural maupun fungsional, perusahaan, pengusaha, konsultan, perbankan dan media.

Beberapa keunggulan dan karakteristik yang dimiliki Politeknik AUP adalah:

1. Keunggulan komparatif
 - a) Penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan rasio kegiatan praktik jauh lebih banyak dibanding teori (70% : 30%);
 - b) Penerapan pembinaan kehidupan kampus dengan kedisiplinan yang tinggi, sehingga para lulusan menjadi pekerja keras, produktif dan memiliki daya juang yang tinggi;

- c) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan yang memenuhi standar internasional sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - d) Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk setiap Program Studi.
2. Keunggulan Kompetitif
- a) Lulusan unggul karena memiliki kecerdasan yang produktif dan kemampuan beradaptasi serta ketahanan fisik dan mental yang tinggi untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri;
 - b) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang kelautan dan perikanan;
 - c) Memenuhi kualifikasi standar internasional (kemampuan mengoperasikan dan manajemen serta skill yang mumpuni);
 - d) Memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2000.

Model pendidikan di Politeknik AUP didesain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, baik dalam aspek bisnis, teknologi terapan, kemasyarakatan serta kedisiplinan. Dengan karakteristik lulusan yang demikian, ke depan dapat lahir generasi baru pelaku usaha (*Start-up*) kelautan dan perikanan dari lulusan Politeknik AUP, sehingga menjadi aktor utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

b. Permasalahan

Permasalahan sekaligus peluang sektor kelautan dan perikanan meliputi berbagai aspek dan sangat dituntut kesiapan sumberdaya manusia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan kebijakan pengembangan SDM unggul dimasa kini dan masa datang. Politeknik AUP merupakan aset strategis menghadapi permasalahan kelautan dan perikanan, karena muara dari permasalahan ini pada prinsipnya adalah kelemahan sumberdaya manusia pelaku utama kelautan dan perikanan. Permasalahan dan peluang sektor kelautan dan perikanan itu meliputi:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya ikan di perairan laut dan budidaya ikan untuk dikelola sebagai sumber pendapatan;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi KP masih banyak keterbatasan;
3. Mindset lulusan masih ingin jadi Aparatur Sipil Negara;

4. SDM lulusan belum menjadi aktor utama dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta Unit Kerja lainnya di sektor kelautan dan perikanan;
5. Teknologi terapan yang dihasilkan masih belum komersial di masyarakat dan DUDI;
6. Proses inkubator oleh perusahaan bagi taruna dan lulusan untuk menjadi *Start-up* masih minim;
7. Transfer teknologi dan peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan masih kurang;
8. Ketatnya persaingan dunia kerja dan kebijakan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi para lulusan Politeknik AUP belum mendukung. Permasalahan yang secara khusus terjadi di Politeknik AUP yang perlu segera dilakukan pembenahan adalah:
 1. Lulusan Politeknik AUP belum menjadi prioritas pilihan bagi *stakeholder* kelautan dan perikanan;
 2. Politeknik AUP masih belum menjadi Badan Layanan Umum (BLU);
 3. Pascasarjana Terapan S3 belum dibuka;
 4. Tata kelola Pendidikan Vokasi belum sepenuhnya mengacu pada PP 62/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan;
 5. Jejaring kerja dalam dan luar Negeri yang masih terbatas; Pelayanan Birokrasi untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi vokasi belum Optimal.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Politeknik AUP sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dan laporan, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2025;
- b. **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Politeknik AUP seperti tugas dan fungsi serta struktur organisasi Politeknik AUP;

- c. **BAB II Perencanaan Kinerja**, menyajikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Politeknik AUP tahun 2025, serta Pengukuran Kinerja;
- d. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini menjelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
- e. **BAB IV Penutup**, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja, permasalahan dan rekomendasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam situasi demikian, Politeknik AUP harus lebih mampu menjadi jembatan antara proses pendidikan dengan dunia kerja dan kebutuhan pasar kerja secara nyata. Hal ini ditegaskan dalam Permen KP Nomor 90/PERMEN-KP/2020 Pasal 2 yang mana tugas Politeknik AUP adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu Politeknik AUP yang menyelenggarakan pendidikan vokasional harus merancang kurikulum dan implementasinya berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menjadi okupasi pekerjaan bagi lulusan sehingga menjadi aktor Utama di Sektor Kelautan Perikanan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas lulusan di Politeknik AUP sangat perlu terus dikembangkan pada kemampuan berwirausaha yang berdaya saing tinggi dalam bidang kelautan dan perikanan, dengan kompetensi dan sertifikasi yang melekat di dalamnya. Pengembangan kemampuan berwirausaha pada pendidikan di Politeknik AUP harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, baik dari kurikulumnya, penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikannya serta keilmuannya. Oleh karena itu lulusan Politeknik AUP mempunyai kemampuan mengembangkan wirausaha di bidang penangkapan ikan, mesin perikanan, budidaya, pembenihan, pengolahan dan pemasaran serta pengelolaan sumberdaya perairan dan penyuluhan.

Lulusan yang menjadi pengusaha pemula di bidang kelautan dan perikanan saat ini masih dirasakan sangat kurang, baik dalam jumlah maupun kualitas. Oleh karena itu pengelolaan pendidikan di Politeknik AUP yang berorientasi wirausaha mutlak dilaksanakan untuk pemanfaatan potensi

kelautan dan perikanan yang lebih optimal dan mampu menjadi raja di negeri sendiri, tanpa terus menerus menjadi pekerja.

Peran strategis Politeknik AUP meliputi:

- A. Menetapkan kurikulum vokasi perikanan berbasis usaha;
- B. Meng-up grading dosen untuk melaksanakan pendidikan vokasi;
- C. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan mode vokasi;
- D. Menjalin kemitraan yang sinergi dengan unit bisnis;
- E. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya;
- F. Menghasilkan inovasi teknologi komersial;
- G. Menyediakan galery (hard & soft) teknologi yang dihasilkan;
- H. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra;
- I. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra;
- J. Memfasilitasi terjadinya inkubasi start up bisnis perikanan di desa mitra;
- K. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- L. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- M. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- N. Menyelenggarakan pembinaan taruna dan tata kehidupan kampus untuk mewujudkan lulusan unggul dan kehidupan kampus yang edukatif dan produktif serta suasana kampus yang nyaman dan asri.

A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”.

B. Misi

Misi Politeknik AUP adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 8 (Delapan) misi Presiden yang dituangkan ke dalam 8 (Delapan) Asta Cita, KKP mendukung 2 (Dua) misi yaitu:

1. Misi Asta Cita ke-2 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan
2. Misi ke-4 yakni Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan tujuan Indonesia Emas 2045, yang memiliki arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, Politeknik AUP mendukung misi Asta Cita ke – 4 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Politeknik AUP mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berwirausaha di pemerintahan, swasta, dan unit kerja lainnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan;
2. Politeknik AUP memiliki tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara Internasional;
3. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam rangka mendukung peserta didik yang dapat berdaya saing.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Politeknik AUP dengan memperhatikan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusdik KP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Kegiatan Pusdik KP adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan Dan Perikanan Yang Kompeten;
2. SK2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan;
3. SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
4. SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar;
5. SK5 Aparatur yang Dididik dan Dilatih;
6. SK6 Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Dengan memperhatikan sasaran strategis Pusdik KP dimaksud, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai Politeknik AUP pada tahun 2025-2029 dengan mengacu pada sasaran kegiatan Pusdik KP adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten;
2. SK2 Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan;
3. SK3 Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan;
4. SK4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker.

Menjabarkan misi Sasaran Kegiatan Pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten", dengan indikator kinerja:

1. Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) dengan target 436 orang sampai dengan tahun 2025;
2. Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang) dengan target 512 orang di tahun 2025;

3. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang) dengan target pada tahun 2025 sebanyak 2.891 orang;
4. Nilai PNBP Satker Politeknik AUP (Rp Miliar) dengan target pada tahun 2025 sebanyak 2,741 miliar;
5. Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan) dengan target pada tahun 2025 sebanyak 5 dokumen;
6. Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%) dengan target pada tahun 2025 sebesar 100%;
7. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%) dengan target 100% pada tahun 2025.

Menjabarkan misi Sasaran Kegiatan Kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah "Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket) dengan target di tahun 2025 sebanyak 6 paket;
2. Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok) target 1 unit sampai dengan tahun 2025.

Menjabarkan misi Sasaran Kegiatan Ketiga (SK-3) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga) target 1 sampai dengan tahun 2025;
2. Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang) target 60 orang sampai dengan tahun 2025.

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Politeknik AUP melalui Sasaran Kegiatan Kelima (SK-4) adalah "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker", dengan indikator kinerja:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) dan disampaikan dengan target 85% sampai dengan tahun 2025;

2. Penilaian mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai) dengan target pada tahun 2025 sebesar nilai 81;
3. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (indeks) dengan target 84 sampai dengan tahun 2025;
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) dengan target 80% sampai dengan tahun 2025;
5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%) target 80% di tahun 2025;
6. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Politeknik AUP (Nilai) dengan target 92 sampai dengan tahun 2025;
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai) dengan target 71,5 sampai dengan tahun 2025;
8. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%) dengan target 100% sampai dengan tahun 2025;

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Politeknik AUP tahun 2025 adalah Program Pengembangan dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp. 114.865.893.000,- dengan rincian kegiatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Rekap Anggaran Rencana Kerja Tahunan Politeknik AUP Tahun 2025

NO	Jenis Belanja	Anggaran (Rp. 000)
Anggaran Total		114.865.893
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi KP	48.433.852
	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	140.000
	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	282.000
	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	180.000
	Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi, Pengabdian Kepada Masyarakat	70.000
	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	47.761.852
2	Program Dukungan Manajemen Satker	66.432.041
	Layanan Umum	42.500
	Layanan Perkantoran	66.347.041
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	42.500

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Politeknik AUP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran kegiatan Politeknik AUP. Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Politeknik AUP mengalami perubahan yaitu terdapat penambahan 3 (tiga) IKU antara lain, 1) Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang), 2) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%), dan 3) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%). IKU Politeknik AUP pada Perjanjian Kinerja (PK) Level 3 2025 per 30 Januari tahun 2024, terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Politeknik AUP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436
		2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891
		4	Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741
		5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	kelautan dan perikanan	11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81
		14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5
		19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100

2.4 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework*. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework*.

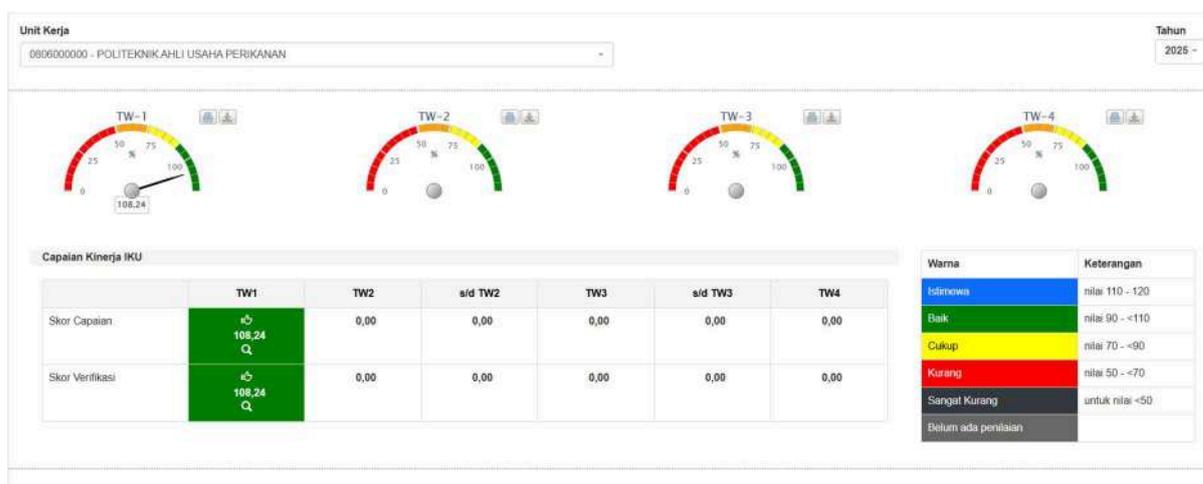
2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup Politeknik AUP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran telah ditugaskan kepada Tim Pengelolaan Kinerja Politeknik AUP untuk menyusun LKj triwulan dan LKj tahun 2024. Selanjutnya Tim Pengelolaan Kinerja Politeknik AUP melaporkan kepada tim monev Pusdik KP dan tim monev BPPSDM KP yang kemudian akan merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan pada lingkup BPPSDM KP.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama Politeknik AUP

Pengukuran capaian kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP pada triwulan I tahun 2025 sebesar 108,24%, yang dapat dilihat pada tangkapan layar *dashboard* kinerja dibawah ini:



Gambar 3. Capaian Kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada *dashboard* kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NPSS di atas 100%. *Dashboard* kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran capaian kinerja di atas terlihat nilai pencapaian sasaran kegiatan (NPSS) sampai dengan triwulan I tahun 2025 tercapai sebesar 108,24%, yang berasal dari capaian sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%), capaian 86,67% (101,96%);
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%), capaian 100% (120%);

3. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%), capaian 100% (100%);

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2015 dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPSDM KP yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2025 dapat tercapai. Capaian Kinerja pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436			
		2 Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512			
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891			
		4 Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741			
		5 Kerjasama Politeknik AUP yang	5			

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
			disepakati (Kesepakatan)			
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang besertifikasi kompetensi (%)	100		
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100		
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6		
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1		
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1		
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60		
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85	85	86,67
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81		

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
	14 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84			
	15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	80	100	120
	16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80			
	17 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92			
	18 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5			
	19 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1 :

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur tingkat keberhasilan Politeknik AUP dalam menyiapkan lulusan yang mampu bersaing dan langsung terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, maupun Dunia Kerja (DU/DI). IKU ini menjadi tolok ukur efektivitas proses pendidikan vokasi di lingkungan kelautan dan perikanan, baik dari sisi kurikulum, pembelajaran praktik, hingga kerja sama dengan mitra industri.

Terserapnya lulusan ke DU/DI menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki telah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini tidak terlepas dari

penerapan program pendidikan berbasis kerjasama dengan dunia industri, pelaksanaan magang industri, serta peningkatan *soft skill* dan sertifikasi kompetensi peserta didik.

Capaian IKU ini juga menjadi cerminan keberhasilan Politeknik AUP dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap bekerja, khususnya di sektor kelautan dan perikanan yang strategis. Semakin tinggi angka serapan lulusan, semakin besar pula kontribusi Politeknik AUP dalam mendukung pertumbuhan ekonomi biru dan kemandirian sektor perikanan nasional.

Adapun progres capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Lulusan Politeknik AUP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%) pada triwulan I 2025 masih belum dapat dihitung dikarenakan belum terdapat taruna yang lulus tahun ini dan terserap di DU/DI. Saat ini Politeknik AUP masih mengidentifikasi kembali jumlah lulusan peserta didik tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 2 :

Jumlah lulusan Politeknik AUP (orang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk mengukur jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Politeknik AUP sesuai dengan waktu dan standar yang telah ditetapkan. IKU jumlah lulusan mencerminkan efektivitas proses pembelajaran, ketepatan waktu studi, serta kemampuan institusi dalam membimbing mahasiswa hingga lulus.

Tingginya jumlah lulusan menjadi indikator positif bahwa proses akademik dan dukungan institusional berjalan dengan baik, mulai dari penerimaan mahasiswa, penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, hingga layanan akademik dan non-akademik.

Selain itu, pencapaian jumlah lulusan juga menjadi dasar dalam penguatan kontribusi Politeknik AUP terhadap pembangunan sumber daya manusia unggul di sektor kelautan dan perikanan. Setiap lulusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter dan integritas yang siap menjawab tantangan dunia kerja.

Dengan menjaga kualitas dan kuantitas lulusan, Politeknik AUP terus berkomitmen dalam menghasilkan tenaga profesional yang mendukung kemajuan ekonomi biru Indonesia.

Sampai dengan periode penyusunan laporan kinerja saat ini, IKU Jumlah Lulusan Politeknik AUP (orang) masih berada dalam tahap verifikasi dan validasi data oleh unit Pusat Pelayanan Akademik (PPA). Proses ini dilakukan untuk memastikan ketepatan data lulusan yang akan dilaporkan, baik dari sisi jumlah, status kelulusan, maupun kelengkapan administrasi yang menyertainya.

Meski data final belum dapat disampaikan, proses verifikasi ini menunjukkan bahwa tahapan pemenuhan IKU ini telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Diharapkan setelah proses validasi selesai, data yang tersedia dapat mencerminkan capaian kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 3 :

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (orang)

Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan dari proses pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik/guru. Tugas inilah yang diemban oleh Politeknik AUP untuk mengembangkan peserta didik sesuai potensi mereka yang tepat di dunia kelautan dan perikanan. Politeknik AUP memiliki program studi yang sesuai dengan permintaan di dunia usaha/dunia industri, dengan program studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Permesinan Perikanan (MP), Teknologi

Pengolahan Hasil Perikanan (TPH), Teknologi Akuakultur (TAK), Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan (TPS) dan Penyuluhan Perikanan (PP).

Berdasarkan verifikasi data dari unit PPA, sampai dengan bulan April tahun 2025 tercatat sebanyak 2.848 orang peserta didik yang aktif mengikuti program pendidikan vokasi di Politeknik AUP. Jumlah ini menjadi gambaran awal terhadap potensi capaian IKU yang berkaitan dengan kompetensi lulusan, seiring dengan berjalannya proses pembelajaran, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas peserta didik. Selanjutnya, proses penilaian terhadap kompetensi akan dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah peserta yang telah memenuhi kriteria kompetensi sesuai standar yang berlaku.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 4 :

Nilai PNBP Satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)

Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada KKP dan terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya (Non SDA), dan PNBP BLU. Sesuai PP 85 Tahun 2021 terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, Pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, Pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, analisis data kelautan dan perikanan, sertifikasi, hasil samping kegiatan tuisi, tanda masuk karcis masuk Kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi, denda administratif dan ganti kerugian.

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik AUP hingga triwulan I tahun 2025 menunjukkan progres yang positif. Berdasarkan data keuangan satuan kerja Politeknik AUP, nilai PNBP yang berhasil dihimpun sampai dengan bulan April tahun 2025 mencapai Rp. 547.931.906.

Angka ini mencerminkan kontribusi awal Politeknik AUP dalam mendukung peningkatan pendapatan negara melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan layanan lainnya. Ke depan, nilai ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan optimalisasi program-program yang

berpotensi menghasilkan PNBP, termasuk kerja sama dengan mitra industri dan masyarakat.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 5 :

Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Kemitraan dan/atau Kerjasama yang dijalin dan/atau masih dilaksanakan antara Satuan Kerja lingkup Politeknik AUP dengan pihak mitra. Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara Politeknik AUP dengan pihak mitra dengan durasi pelaksanaan tertentu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Penerimaan lulusan Pendidikan Vokasi KP di Dunia Industri;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan keilmuan dalam kerangka tri dharma perguruan tinggi;
4. Pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Politeknik AUP;
5. Peningkatan pelayanan publik atas Pendidikan KP.
6. Penerimaan lulusan Satuan Pendidikan KP di Dunia Industri;
7. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait jumlah kerja sama yang disepakati, Politeknik AUP terus mendorong sinergi strategis dengan pihak eksternal. Hingga saat ini, Politeknik AUP telah berhasil menjalin 2 (dua) kerja sama resmi yang ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama dengan:

1. PT. Sejahtera Falam Indonesia
2. PT. Mega Baruna Fisheries

Kedua kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperluas jaringan kemitraan yang mendukung penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, serta membuka peluang pengembangan kompetensi peserta didik melalui program magang, pelatihan, maupun penelitian terapan.

Progres ini menunjukkan komitmen Politeknik AUP dalam meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan vokasi melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri ataupun dunia kerja.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 6 :

Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik Tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang Kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan, maka sistem penilaian hasil belajar yang disusun pun harus menggunakan model penilaian berbasis kompetensi (*competency-based assessment*). Di samping itu upaya standarisasi sistem uji kompetensi/penilaian berbasis kompetensi perlu dilakukan untuk mendapatkan kualitas proses dan hasil yang diharapkan sesuai dengan persyaratan bukti standar kompetensi, dimanapun, kapanpun serta siapapun penilai (asesor) yang melaksanakan uji kompetensi tersebut untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang dan dapat diraih setiap waktu. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dilakukan untuk mengetahui tingkat kecakapan taruna. Tujuan dari UKK adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi taruna sesuai dengan bidang keahlian yang ditempuh, antara lain:

1. Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (ANKAPIN-I, BST)
2. Program Studi Mesin Perikanan (ATKAPIN-I, BST)
3. Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (HACCP, SPI)
4. Program Studi Teknologi Akuakultur (CPIB)
5. Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (MPAG, MPAD, AMDAL).
6. Program Studi Penyuluhan Perikanan (Sertifikat Pembenuhan, Pembesaran, Pengolahan dan Penyuluhan).

Progres terhadap IKU persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi saat ini masih dalam tahap pelaksanaan. Unit Lembaga Sertifikasi

Profesi (LSP) Politeknik AUP masih terus menjalankan proses sertifikasi terhadap peserta didik di berbagai program studi.

Pelaksanaan sertifikasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai standar industri, serta meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Hasil akhir dari proses ini akan menjadi dasar penentuan persentase lulusan bersertifikat yang dilaporkan sebagai capaian IKU. Dengan komitmen dan dukungan dari seluruh unit terkait, diharapkan target pencapaian indikator ini dapat terealisasi secara optimal di akhir tahun.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 7 :

Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)

Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur seberapa besar proporsi peserta didik baru di Politeknik AUP yang berasal dari keluarga pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan, dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Capaian IKU ini menjadi tolok ukur komitmen Politeknik AUP dalam mendukung pemerataan akses pendidikan vokasi kepada anak-anak pelaku utama, sekaligus sebagai bentuk afirmasi terhadap kelompok masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam sektor kelautan dan perikanan nasional.

Semakin tinggi persentase anak pelaku utama yang diterima, semakin besar pula kontribusi institusi dalam membangun generasi penerus pelaku usaha perikanan yang berpendidikan, berkompeten, dan mampu membawa perubahan positif bagi komunitasnya. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang inklusif dan relevan, Politeknik AUP mendorong terciptanya transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga pelaku utama di seluruh Indonesia.

IKU ini juga menunjukkan peran aktif Politeknik AUP dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemenuhan hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas.

Progres pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP saat ini

masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan PENTARU tahun akademik 2025 - 2026.

Tahap persiapan ini mencakup perencanaan mekanisme seleksi, penyusunan kriteria afirmatif, serta koordinasi dengan instansi dan *stakeholder* terkait untuk memastikan akses yang lebih besar bagi anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini merupakan komitmen Politeknik AUP dalam mendukung pemerataan akses pendidikan vokasi, khususnya bagi keluarga pelaku utama yang berperan langsung dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Capaian IKU ini akan ditentukan setelah proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru selesai dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan 2 :

Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama 8 :

Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)

Indikator Kinerja Utama Penelitian terapan pendidikan tinggi KP di Politeknik AUP (unit) menunjukkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian terapan. Sebagai Perguruan Tinggi kedinasan dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik AUP mengemban tugas untuk mendukung visi dan misi KKP serta mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Upaya merealisasikan tugas Politeknik AUP sebagai suatu Perguruan Tinggi, terdapat sebuah pusat yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas mengemban 2 (dua) dari substansi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki sebuah pedoman kegiatan yang disusun dalam bentuk proposal yang nantinya digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan tugas, monitoring selama kegiatan berlangsung serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, Politeknik AUP saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan. Progres terkini meliputi penyusunan tim pelaksana yang akan menggarap *roadmap* literasi terapan serta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Selain itu, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh program studi guna membahas arah penyusunan proposal 2 (dua) kegiatan tersebut. Saat ini, proposal kegiatan sedang disesuaikan kembali untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi dan kualitas kajian yang direncanakan.

Langkah-langkah awal ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kajian yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan aktual dunia pendidikan vokasi di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran Kegiatan 2 :

Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama 9 :

Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Kelompok)

Indikator Kinerja Utama Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik AUP (paket) menunjukkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian terapan. Sebagai perguruan tinggi kedinasan dibawah naungan kementerian kelautan dan perikanan, Politeknik AUP mengemban tugas untuk mendukung visi dan misi KKP serta mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya merealisasikan tugas Politeknik AUP sebagai suatu perguruan tinggi, terdapat sebuah pusat yaitu pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas mengemban 2 (dua) dari substansi tridharma perguruan tinggi yaitu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki sebuah pedoman kegiatan yang disusun dalam bentuk proposal yang nantinya digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan tugas, monitoring selama kegiatan berlangsung serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, Politeknik AUP saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan. Progres terkini meliputi penyusunan tim pelaksana yang akan menggarap *roadmap* literasi terapan serta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Selain itu, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh program studi guna membahas arah penyusunan proposal 2 (dua) kegiatan tersebut.

Saat ini, proposal kegiatan sedang disesuaikan kembali untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi dan kualitas kegiatan PKM yang direncanakan.

Langkah-langkah awal ini menjadi fondasi penting dalam memastikan output yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan aktual dunia pendidikan vokasi di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran Kegiatan 3 :

Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 10 :

Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur jumlah dan kualitas unit kelembagaan pendidikan kelautan dan perikanan di Politeknik AUP yang telah memperoleh status akreditasi dari lembaga yang berwenang, seperti BAN-PT atau LAM-PTKes. IKU ini mencerminkan sejauh mana institusi mampu memenuhi standar mutu pendidikan tinggi secara kelembagaan.

Akreditasi merupakan pengakuan formal terhadap mutu tata kelola, kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta luaran dari program pendidikan yang dijalankan. Oleh karena itu, pencapaian akreditasi bukan hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bukti komitmen Politeknik AUP dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Semakin banyak lembaga atau program studi yang terakreditasi, semakin kuat pula daya saing Politeknik AUP sebagai institusi vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini juga memberikan jaminan mutu kepada peserta didik, orang tua, dan mitra industri bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Dengan terus mendorong akreditasi kelembagaan, Politeknik AUP memperkuat fondasi institusi dalam mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global di sektor kelautan dan perikanan.

Adapun progres Indikator Kinerja Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah berhasil mempertahankan status akreditasi Lembaga yang dikeluarkan oleh BAN - PT. Progres sampai dengan saat ini sebagai berikut:

1. Pada akhir tahun 2024, telah diajukan reakreditasi untuk prodi TPS, TPH, PP dan MP. progres capaian saat ini status submission untuk prodi TPH, dan TPS dalam tahap “submit dokumen” namun hingga saat ini belum ada respon dari BAN-PT.
2. Prodi PP telah memasuki tahap menunggu proses akreditasi, dokumen reakreditasi telah diterima dan diperiksa oleh BAN_PT. Prodi PP juga sudah bersiap diri dengan menyiapkan data dukung apabila sewaktu-waktu berubah status menjadi AL. Dana AL sebelumnya telah mengalami efisiensi, namun untuk mengantisipasi perubahan proses akreditasi, pusmintu telah mengajukan memo untuk memunculkan kembali dana AL untuk prodi PP.
3. Prodi MP posisi submission di SAPTO BAN-PT dalam posisi Revisi dokumen. Hal ini terjadi karena MP masih terdaftar di LAM TEKNIK. Sebelum proses pengajuan reakreditasi telah mengajukan keluar dari LAM Teknik dan kembali ke BAN-PT, proses telah disetujui oleh BAN-PT. Kami juga sudah bersurat ke LAM-Teknik terkait kasus tersebut, dan telah direspon. Apabila dokumen akreditasi telah masuk ke BAN-PT maka proses akan dilanjutkan oleh BAN-PT.
4. Selain akreditasi, juga terdapat sertifikasi ISO yaitu ISO 21001:2018 dan 9001:2015. ISO 21001:2018 telah dilakukan surveilance 1 pada awal tahun 2025 dan telah mendapatkan surat keterangan bahwa sertifikasi ISO 21001:2018 terhadap Politeknik AUP masih dapat diakui. Begitu juga untuk ISO 9001:2015 masih berlaku, dan kemungkinan akan dilakukan surveilance kedua pada akhir tahun 2025.
5. Untuk prodi TPI dan Pascasarjana telah naik peringkat menjadi unggul, sedangkan prodi TAK telah lulus pemantauan oleh BAN PT sehingga status akreditasi tetap sama dengan hasil sebelumnya yaitu unggul.

Sasaran Kegiatan 3 :

Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 11 :

Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi profesi pendidik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, target Politeknik AUP sebanyak 3 orang dosen yang eligible untuk mendapatkan sertifikasi dosen sehingga jumlah pendidik yang didorong untuk mendapatkan sertifikasi sebanyak 3 orang. Syarat Sertifikasi bagi dosen adalah :

- 1) Memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk dokter pendidik klinis (Dokdiknis) atau NIDK untuk dosen paruh waktu;
- 2) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;

- 3) Memiliki pangkat/golongan-ruang atau inpassing bagi dosen non-ASN;
- 4) Memiliki mas kerja sebagai Dosen sekurang – kurangnya 2 tahun secara berturut – turut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen;
- 5) Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut – turut;
- 6) Memenuhi nilai ambang batas (Passing Grade) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
- 7) Memenuhi nilai ambang batas (*Passing Grade*) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek; dan
Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau *Applied Approach* (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi tenaga pendidik di Politeknik AUP belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan secara nasional, di mana alokasi dana untuk kegiatan sertifikasi masih dalam status blokir.

Kondisi ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan pelatihan dan asesmen sertifikasi kompetensi bagi dosen, yang seharusnya menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan di bidang kelautan dan perikanan. Meskipun demikian, Politeknik AUP tetap melakukan langkah-langkah persiapan administratif dan pendataan tenaga pendidik yang belum mengikuti pelaksanaan sertifikasi, agar proses dapat segera dilaksanakan begitu anggaran tersedia.

Selain itu, koordinasi dengan unit terkait terus dilakukan untuk mempercepat pembukaan blokir anggaran dan merencanakan penyesuaian jadwal pelaksanaan sertifikasi. Dengan kesiapan internal yang terus dijaga, Politeknik AUP optimis bahwa target indikator ini dapat dikejar pada triwulan berikutnya apabila kondisi fiskal sudah memungkinkan.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 12 :

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)

Indikator Kinerja ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

kepada Politeknik AUP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Politeknik AUP yang menjadi objek pengawasan. Capaian atas indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Politeknik AUP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah mencapai target yaitu 100%. Hasil capaian tindak lanjut ini juga bisa dilihat di aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Rekomendasi) yang dapat dibuka melalui sidak.kkp.go.id. Tercapainya Nilai Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan keberhasilan dan hasil dari kerja sama dari seluruh pegawai serta pengendalian intern Politeknik AUP.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yakni 86,67% dari temuan awal 30 dan telah ditindaklanjuti 26 berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor: B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP”.

Faktor-faktor keberhasilan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti melakukan tindak lanjut temuan yaitu dengan 1) Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam percepatan penyelesaian temuan, 2) Sistem pengendalian internal yang aktif, 3) Dukungan dari Tim Inspektorat Jenderal KKP, dan 4) Evaluasi dan pelaporan secara berkala.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya IKK ini adalah sebagai berikut 1) Selalu melakukan koordinasi dengan tim Setba dan Itjen KKP terkait rekomendasi yang statusnya belum tuntas, 2) Rapat tindak lanjut rekomendasi / temuan, 3) Menginfokan ke masing-masing Penanggung Jawab temuan untuk segera melakukan percepatan penyelesaian temuan, dan 4) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

Gambaran capaian pada IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) sebagai berikut:

IKK 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)									
Realisasi TW I				Triwulan I 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
86,67	100	75	82	85	86,67	101,96	5,70	85	101,96

Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP menunjukkan tren yang dinamis dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, capaian berada pada angka 86,67%, mencerminkan adanya respons positif terhadap rekomendasi pengawasan. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, yang mencapai 100%, menandakan bahwa seluruh rekomendasi telah dimanfaatkan secara maksimal dalam proses perbaikan kinerja institusi.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan ke angka 75% yang menyesuaikan dengan target pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 75%. Hal ini dapat dikatakan bukan penurunan yang disebabkan karena suatu kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

Memasuki tahun 2024, terdapat perbaikan dengan capaian sebesar 82%, menunjukkan adanya upaya evaluasi dan penyesuaian sistem tindak lanjut agar lebih efektif dan responsif terhadap temuan pengawasan.

Pada Triwulan I tahun 2025, capaian IKU kembali meningkat ke angka 86,67%, menyamai capaian tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa Politeknik AUP telah berada pada jalur yang positif dalam meningkatkan pemanfaatan hasil pengawasan untuk mendorong perbaikan kinerja institusi. Jika tren ini terus dipertahankan dan ditingkatkan hingga akhir tahun, maka capaian tahun 2025 berpotensi melampaui tahun sebelumnya dan mendekati capaian optimal sebagaimana pada tahun 2022

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra KKP Tahun 2025, capaian pada tahun 2025 telah mencapai 101,96%.

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	% Capaian TW I
1	Politeknik AUP Jakarta	86,67%
2	Politeknik KP Karawang	100%
3	Politeknik KP Bone	95,45%
4	Politeknik KP Pangandaran	91,67%

Capaian IKU terkait persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja antar satuan pendidikan menunjukkan variasi kinerja yang positif, dengan mayoritas satuan pendidikan mencapai angka di atas 85%.

Politeknik KP Karawang mencatat capaian tertinggi, yaitu 100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara optimal dan dijadikan dasar perbaikan kinerja di seluruh unit kerja. Sementara itu, Politeknik KP Bone menyusul dengan capaian 95,45%, disusul oleh Politeknik KP Pangandaran dengan capaian 91,67%.

Politeknik AUP memperoleh capaian sebesar 86,67%, yang walaupun belum mencapai angka maksimal, tetap menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi terhadap hasil pengawasan sebagai instrumen perbaikan tata kelola dan operasional lembaga.

Capaian Politeknik AUP berada pada urutan keempat di antara empat satuan pendidikan tersebut. Hal ini menjadi cerminan bahwa mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan telah berjalan dengan baik hanya saja memang belum secara keseluruhan dapat diselesaikan (26 dari 30 rekomendasi). Dalam upaya peningkatan, Politeknik AUP berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas unit kerja, mempercepat eksekusi rencana aksi, serta meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi.

Pada tahun anggaran 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak memperoleh alokasi anggaran secara langsung dikarenakan kebijakan efisiensi. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan terkait pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengintegrasikannya ke dalam kegiatan yang relevan.

Tidak adanya anggaran khusus tidak serta-merta menjadi hambatan dalam pencapaian target IKU. Justru hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Politeknik AUP untuk mengoptimalkan koordinasi, pemanfaatan SDM, serta kolaborasi antar bagian dalam mewujudkan perbaikan kinerja berbasis rekomendasi pengawasan. Ke depan, akan dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan capaian IKU ini secara lebih terstruktur dan terencana.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 13 :

Penilaian mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja. Evaluasi dilaksanakan tahunan dimana evaluasi telah dilaksanakan secara mandiri oleh Politeknik AUP.

IKU Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP merupakan bagian dari upaya institusi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat perguruan tinggi.

Penilaian mandiri ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Politeknik AUP telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan program yang dilakukan. Proses penilaian ini melibatkan pengumpulan data kinerja yang telah dicapai, yang kemudian dianalisis untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana dan harapan.

Dengan adanya IKU Penilaian Mandiri SAKIP, Politeknik AUP dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kinerja. Penilaian ini juga mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang responsif dan transparan, sesuai dengan visi dan misi institusi. Selain itu, IKU ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif.

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, penilaian mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Politeknik AUP belum dilaksanakan. Meskipun demikian, unit kerja telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan penilaian tersebut, antara lain:

- Pemutakhiran dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan.
- Penguatan pemahaman tim terkait prinsip dan indikator penilaian SAKIP melalui sosialisasi internal.
- Evaluasi awal terhadap kelengkapan dan konsistensi dokumen pendukung.

Pelaksanaan penilaian mandiri masih menunggu informasi dari Sekretariat BPPSDM KP, dengan harapan dapat mencerminkan akuntabilitas kinerja yang semakin baik dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Politeknik AUP.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 14 :

Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk mengukur profesionalitas ASN lingkup Politeknik AUP berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin (Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2018).

Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara menghitung indeks berdasarkan bobot 4 (empat) komponen yang telah ditetapkan meliputi : (1) Kualifikasi (Bobot 25%); (2) Kompetensi (Bobot 40%); Kinerja (Bobot 30%) dan (4) Disiplin (Bobot 5%). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP diperoleh dari total nilai IPA pegawai Politeknik AUP merupakan penjumlahan dari IPA pegawai Politeknik AUP yang menduduki

jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Nilai IPA Politeknik AUP dapat kita lihat pada website <http://ropeg.kkp.go.id>.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Politeknik AUP masih belum dapat diketahui karena data resmi dari Biro Kepegawaian belum tersedia. Meskipun demikian, Politeknik AUP tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN melalui berbagai upaya strategis, antara lain:

- Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
- Peningkatan pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk perbaikan manajemen SDM.
- Penguatan sistem merit dalam proses rekrutmen, mutasi, dan promosi jabatan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai indeks yang akan diumumkan pada periode selanjutnya.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 15 :

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan kesiapan unit kerja dalam merencanakan serta mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara total nilai paket pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan total nilai anggaran pengadaan yang direncanakan dalam DIPA.

Semakin tinggi persentase RUP yang diumumkan, menunjukkan semakin baiknya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam perencanaan pengadaan. Hal ini juga menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Politeknik AUP berkomitmen untuk menyampaikan seluruh rencana pengadaan secara tepat waktu dan lengkap melalui SIRUP, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan sebagai upaya untuk memperkuat integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yakni 100% dari RUP Pasca Revisi sebesar Rp 14,399,211,000 dan telah diumumkan sebesar Rp 14,399,211,000 berdasarkan Surat Biro Umum dan PBJ, Sekretariat Jenderal KKP Nomor: 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025.

Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah 1) Komitmen pimpinan dan seluruh tim PBJ, 2) Perencanaan anggaran yang tepat waktu dan terintegrasi, dan 3) Kompetensi SDM pengelola PBJ.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah sebagai berikut 1) Koordinasi Rutin antar Unit Pengelola Anggaran dan PBJ, 2) Penyusunan dan Konsolidasi Rencana Kebutuhan Pengadaan, 3) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan RUP ke SIRUP, dan 4) Monitoring dan evaluasi berkala proses input RUP.

Gambaran capaian pada IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) sebagai berikut:

IKK 12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)									
Realisasi TW I				Triwulan I 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
				80	100	120	-	80	120

Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada SIRUP merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Oleh karena itu, data capaian IKU ini belum tersedia untuk periode Triwulan I tahun 2021 hingga 2024 dan belum dapat dibandingkan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Politeknik AUP berhasil mencapai angka 100% dalam pengumuman RUP pada SIRUP. Capaian ini menunjukkan

komitmen dan keseriusan unit kerja dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, serta kesiapan dalam melaksanakan perencanaan pengadaan secara tertib dan tepat waktu.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi yang solid, kesiapan dokumen perencanaan, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola pengadaan yang terus dilakukan sejak awal tahun 2025. Diharapkan, capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di periode berikutnya guna mendukung tata kelola pengadaan yang lebih baik.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra KKP Tahun 2025, capaian pada tahun 2025 telah mencapai 120%.

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	Target	% Capaian TW I
1	Politeknik AUP Jakarta	80	100
2	Politeknik KP Sidoarjo	80	100
3	Politeknik KP Bitung	80	100
4	Politeknik KP Sorong	80	100
5	Politeknik KP Karawang	80	100
6	Politeknik KP Kupang	80	100
7	Politeknik KP Bone	80	100
8	Politeknik KP Jembrana	80	100
9	Politeknik KP Pangandaran	80	100
10	Politeknik KP Dumai	80	100

Pada Triwulan I Tahun 2025, seluruh satuan pendidikan di lingkungan Pusat Pendidikan KP berhasil mencapai target 100% untuk IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi seluruh unit kerja dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan.

Capaian 100% ini juga menjadi indikator kesiapan pelaksanaan program/kegiatan sejak awal tahun, yang berkontribusi terhadap kelancaran realisasi anggaran dan pencapaian output strategis institusi secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai target IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.177.981.000,- dan pada triwulan I telah terealisasi atas

capaian IKU ini sebesar Rp. 625.419.321,- atau sebesar 53%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKU ini yaitu sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 67%.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 16 :

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana satuan kerja mematuhi ketentuan dan regulasi terkait pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pencatatan, hingga penghapusan.

Untuk Politeknik AUP, capaian indikator ini merupakan IKU baru yang mencerminkan keseriusan institusi dalam menjaga tata kelola aset negara secara tertib, akuntabel, dan transparan. Tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya menunjukkan integritas dalam pengelolaan aset, tetapi juga mendukung optimalisasi penggunaan BMN guna mendukung kegiatan pendidikan dan operasional kampus.

Penilaian indikator ini umumnya mencakup aspek kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian data dalam aplikasi SIMAK-BMN, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal. Oleh karena itu, capaian IKU ini menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

Progres IKU ini pada triwulan I tahun 2025, capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Politeknik AUP masih berada dalam tahap pengelolaan dan penyelesaian. Meskipun proses belum sepenuhnya rampung, sejumlah langkah strategis telah dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan dan peningkatan kualitas pengelolaan BMN.

Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan antara lain pemutakhiran data BMN dalam aplikasi SIMAK-BMN, penyesuaian dokumen legalitas aset, serta peningkatan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk pemenuhan kelengkapan administrasi. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan teknis terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan BMN di lingkungan satuan kerja.

Meskipun belum mencapai angka maksimal, progres yang dicapai sejauh ini menunjukkan arah perbaikan yang positif. Dengan komitmen yang terus diperkuat dan dukungan seluruh unit pelaksana, Politeknik AUP optimis bahwa target kepatuhan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 17 :

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja untuk setiap indikator. Untuk mengetahui nilai kinerja pelaksanaan anggaran Politeknik AUP dapat dilihat pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) Kementerian Keuangan. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Sampai dengan akhir Maret 2025, capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik AUP menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, dengan nilai capaian sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang optimal, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

IKPA sendiri merupakan indikator komposit yang mencakup berbagai aspek seperti ketepatan waktu penyampaian revisi anggaran, penyerapan anggaran, deviasi halaman III DIPA, penggunaan kontrak payung, serta tingkat penyelesaian tagihan. Nilai maksimal yang diraih menunjukkan bahwa seluruh proses tersebut telah dijalankan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Capaian 100% pada triwulan I ini menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan anggaran di periode selanjutnya. Hal ini juga menjadi bukti sinergi yang baik

antara perencana anggaran, PPK, bendahara, dan seluruh tim pelaksana di satuan kerja, dalam mendorong tata kelola keuangan negara yang profesional dan akuntabel.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 18 :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Cara menghitung indikator kinerja utama Politeknik AUP dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L melalui pengukuran aspek:

- a. Penyerapan anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran Politeknik AUP dengan akumulasi pagu anggaran Politeknik AUP;
- b. Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan Politeknik AUP rencana penarikan dana bulanan Politeknik AUP dengan jumlah bulan;
- c. Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;

Tingkat Efisiensi (TE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Hingga triwulan I tahun 2025, Politeknik AUP masih berada dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari proses penilaian. Nilai akhir dari indikator ini baru akan tersedia pada akhir tahun anggaran, karena

penilaiannya mencakup keseluruhan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian anggaran sepanjang tahun berjalan.

Meskipun demikian, sejumlah indikator awal telah menunjukkan arah yang positif. Proses penyusunan perencanaan telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan siklus anggaran, penyusunan TOR dan RAB semakin tertib, serta keterlibatan unit kerja dalam proses perencanaan makin meningkat. Selain itu, pelaksanaan revisi anggaran juga berjalan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan dan prioritas kegiatan.

Dengan dasar pelaksanaan yang baik sejak awal tahun, Politeknik AUP optimis bahwa capaian nilai kinerja perencanaan anggaran di akhir tahun akan mencerminkan kualitas tata kelola yang akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan institusi.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 19 :

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)

Layanan dukungan manajemen internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata Kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Adapun IKK ini menargetkan dokumen atas layanan – layanan dukungan manajemen dalam rangka mendukung kegiatan teknis di Politeknik AUP. Formula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

- a. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- b. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Capaian IKU ini di triwulan I tahun 2025 telah mencapai target dengan nilai capaian adalah sebesar 24,5% dari target capaian yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 24,5% dengan bentuk pengumpulan dokumen berupa laporan dari beberapa layanan pada dukungan manajemen.

Faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah 1). Implementasi terhadap dokumen layanan yang telah direncanakan sesuai dengan RKAKL; 2). Keterlibatan seluruh pegawai unit dukungan manajemen teknis dalam menyelesaikan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan layanan-layanan manajemen; 3). Fasilitas yang mendukung para pegawai dalam mengimplementasikan tugas terkait layanan - layanan manajemen.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: 1). Koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pegawai lingkup dukungan manajemen teknis terkait implementasi dari perencanaan terhadap layanan - layanan manajemen; dan 2). Menyiapkan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas terkait implementasi layanan - layanan manajemen.

Gambaran capaian pada IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) sebagai berikut:

IKK 19. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)									
Realisasi TW I				Triwulan I 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	100	24,5	24,5	100,00	-75,50	100	100,00

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis di Politeknik AUP menunjukkan konsistensi yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan I tahun 2025, capaian IKU mencapai angka 24,5% dari target 24,5%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan manajemen teknis dan strategis yang direncanakan berjalan dengan sangat baik dan mendapat dukungan penuh dari pihak manajemen.

Jika dilihat pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2021, 2022 dan 2023, data capaian IKU tidak tersedia, sehingga perbandingan dengan tahun tersebut

tidak dapat dilakukan. Namun, berdasarkan capaian di tahun 2024, Politeknik AUP menunjukkan hasil yang sangat stabil, dengan capaian 100% di tahun tersebut. Ini menggambarkan bahwa Politeknik AUP memiliki konsistensi yang tinggi dalam memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan strategis dan manajemen teknis, yang sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan institusi.

Secara keseluruhan, capaian yang konsisten 100% menunjukkan komitmen Politeknik AUP untuk mendukung sepenuhnya manajemen teknis dan kegiatan strategis, yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi institusi.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra KKP Tahun 2025, capaian pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai 100%.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Pendidikan KP	Target	Capaian	% Capaian
1	Politeknik AUP	24,50	24,50	100,00%
2	Politeknik KP Sidoarjo	25,00	25,00	100,00%
3	Politeknik KP Bitung	24,00	24,00	100,00%
4	Politeknik KP Sorong	17,00	17,00	100,00%
5	Politeknik KP Karawang	26,00	26,00	100,00%
6	Politeknik KP Kupang	29,00	29,00	100,00%
7	Politeknik KP Bone	21,00	21,00	100,00%
8	Politeknik KP Dumai	16,00	16,00	100,00%
9	Politeknik KP Pangandaran	18,75	18,75	100,00%
10	Politeknik KP Jembrana	24,20	24,20	100,00%
11	AK KP Wakatobi	23,00	23,00	100,00%
12	SUPM Ladang	22,00	22,00	100,00%
13	SUPM Pariaman	22,00	22,00	100,00%
14	SUPM Kotaagung	21,00	21,00	100,00%
15	SUPM Tegal	24,00	24,00	100,00%
16	SUPM Pontianak	24,00	24,00	100,00%
17	SUPM Waiheru	25,00	25,00	100,00%
18	SUPM Sorong	28,00	28,00	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, Politeknik AUP berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 100%. Begitu juga dengan satuan Pendidikan lainnya yang dapat mencapai targetnya di triwulan I tahun 2025. Capaian 100,00% yang merata di seluruh satuan pendidikan ini, mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan dukungan manajemen yang efektif dan efisien. Dengan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa setiap satuan pendidikan telah menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung berbagai kebijakan strategis, baik dalam aspek perencanaan, pengelolaan sumber daya, maupun implementasi

kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan akademik.

Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi capaian ini dan terus meningkatkan inovasi dalam sistem dukungan manajemen agar tetap relevan dengan dinamika perkembangan pendidikan serta kebutuhan industri.

Dalam rangka mencapai target IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.299.374.000,- dan pada triwulan I telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 2.080.713.259,- atau sebesar 22%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKK ini yaitu sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 78%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang mengandung arti bahwa proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dimana di setiap kegiatan sudah ada pelaporannya secara terperinci, terlebih sekarang menggunakan system lelang yang di setiap kegiatannya pasti ada data keuangan dan juga pelaporannya oleh rekanan lelang.

Pada awal tahun 2025, pagu anggaran politeknik AUP ditetapkan sebesar Rp114,865,893,000. Namun, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp 23,468,678,000, sehingga pagu efektif atau pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp91.397.215.000. Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, realisasi anggaran yang telah dicapai adalah sebesar Rp 31,233,445,297 atau setara dengan 34,17% dari total pagu setelah dikurangi blokir sehingga sisa anggaran sebesar Rp 60,163,769,703. Tabel berikut menggambarkan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan pada Politeknik AUP Jakarta triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 17. Tabel Realisasi Anggaran Politeknik AUP s.d triwulan I tahun 2025

NO	Jenis Belanja	Pagu Sebelum Blokir	Blokir	Pagu Dikurangi Blokir	Aplikasi OM SPAN (Sebelum Blokir)		Aplikasi SAKTI (dikurangi blokir)	
					Realisasi	%	Realisasi	%
(Rp. 000)								
1	Program Pendidikan	48.433.852	20.488.897	27.944.955	8.933.363	18%	8.933.363	31,97

	dan Pelatihan Vokasi KP							
	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	140.000	127.500	12.500	-	-	-	-
	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	282.000	182.900	99.100	99.072	35%	99.072	54%
	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	180.000	180.000	-	-	-	-	-
	Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi, Pengabdian Kepada Masyarakat	70.000	44.000	26.000	-	-	-	-
	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	47.761.852	19.954.497	27.807.355	8.834.290	18%	8.834.290	31%
2	Program Dukungan Manajemen Satker	66.432.041	2.979.781	63.452.260	22.300.081	34%	22.300.081	35,14
	Layanan Umum	42.500	39.800	2.700	2.700	6%	2.700	100%
	Layanan Perkantoran	66.347.041	2.901.371	63.445.670	22.297.381	33%	22.297.381	35%
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	42.500	38.610	3.890	-	-	-	-

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Politeknik AUP

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk Politeknik AUP. Tujuan yang

dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Politeknik AUP sudah melaksanakan kegiatan dan kinerja dalam satu tahun anggaran, dengan rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per IKU di triwulan I tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 18. Perhitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Capaian	Persentase Capaian	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran Setelah Blokir (Rp.)	Realisasi Anggaran Setelah Blokir (Rp.)	Persentase Realisasi	Efisiensi	
SK.1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten									
1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436	-	-	Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan	316.350.000	217.050.000	68,61%	32,39%
2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512	-	-	Penyelenggaraan Pengajaran dan Perkuliahan	1.504.634.000	313.108.139	20,81%	79,19%
3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2891	-	-	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	24.033.655.000	5.929.035.996	25%	75%
4	Nilai PNBPN satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741	-	-	Penyelenggaraan Praktik TEFA PNBPN	1.098.047.000	-	-	100%
5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	-	-	Sertifikasi Peserta Didik	275.870.000	Rp6.981.618	2,53%	97,47%

7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100	-	-	Dukungan kegiatan penerimaan peserta didik	306.750.000	Rp3.690.000	1,20%	98,80%
SK.2 Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan									
8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6	-	-	Penelitian Terapan KP	12.500.000	Rp -	-	100%
9	Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1	-	-	Pengabdian Kepada Masyarakat	26.000.000	-	-	100%
SK.3 Terselenggaranya tata kelola Pendidikan kelautan dan perikanan									
10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1	-	-	Fasilitasi Penjaminan Mutu Satuan Pendidikabn KP	99.100.000	99.072.500	99,97%	0,3%
11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60	-	-	Sertifikasi Profesi dan SDM	-	-	-	-
SK.4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85	86,67	101,96	-	-	-	-	-

13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81	-	-	-	-	-	-	-
14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84	-	-	-	-	-	-	-
15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	100	120	Pemeliharaan Kantor/Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	1.177.981.000	625.419.321	53%	47%
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80	-	-	Layanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	2.700.000	2.700.000	100%	0%
17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92	-	-	Layanan Keuangan	3.890.000	-	-%	100%
18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5	-	-	Layanan Perkantoran/Gaji dan tunjangan	52.968.315.000	13.719.241.309	26%	74%
19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	24,5	24,5	100	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.299.374.000	2.080.713.259	22%	78%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa IKU belum disertakan dengan anggaran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan kepada seluruh Instansi Pemerintahan. Selama periode triwulan I tahun 2025, dengan total realisasi anggaran sebesar 25,16%, sudah mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,24%,

dan sudah memiliki efisiensi sebesar 74,84. Angka tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2025, efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik, sudah mencapai tujuan dan sasaran, dan sudah mencapai output yang telah diharapkan meskipun dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran dan terdapat beberapa indikator kinerja yang belum maksimal.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP pada triwulan I tahun 2025 sebesar 108,24 %, yang dapat dilihat pada *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tahun 2024, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada *dashboard* kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NSS diatas 100%. *Dashboard* kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Politeknik AUP pada tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 19. Capaian Kinerja triwulan I tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia	436			

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
		1 Industri atau Dunia Kerja (Orang)				
		2 Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512			
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891			
		4 Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741			
		5 Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5			
		6 Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	100			
		7 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100			
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8 Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6			
		9 Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1			
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10 Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1			

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	%
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60			
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85	85	86,67	101,96
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81			
		14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84			
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	80	100	120
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80			
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92			
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5			
		19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100	100	100	100

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja utama pada triwulan I tahun 2025 diantaranya :

1. Pengumpulan data dukung dari masing-masing penanggung jawab IKU yang kurang tertib dan tidak sesuai manual IKU;
2. Terus melakukan monitoring terhadap Indikator Kinerja yang target dan capaiannya semesteran dan Tahunan.

Sehingga dengan permasalahan tersebut, rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Menjadwalkan rapat pengukuran capaian lebih awal kepada semua penanggung jawab IKU lingkup Politeknik AUP, sebelum jadwal yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan KP guna mempermudah verifikasi dan validasi capaian dan pendokumentasian data dukung;
 - 1) Mengawal progres capaian kinerja yang periode pengukurannya semesteran dan tahunan. Jika tidak ada perkembangan kinerja sampai dengan triwulan tiga, maka perlu ada strategi pencapaian dan menyusun justifikasi pencapaian IKU dari masing-masing penanggung jawab IKU.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
POLITEKNIK AUP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ani Leilani**

Jabatan : Direktur Politeknik AUP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Direktur Politeknik AUP
Jakarta

Ani Leilani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
POLITEKNIK AUP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436
		2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891
		4	Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741
		5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81
		14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	48.433.852.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	66.432.041.000
Total Anggaran Politeknik AUP Tahun 2025		114.865.893.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Direktur Politeknik
AUP Jakarta

Ani Leilani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAN www.politeknikaup.ac.id SUREL Politeknikaup@kkp.go.id

21 Juli 2025

Yth. Kepala Pusat Pendidikan KP
di Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.4508/POLTEK.AUP/TU.210/VII/2025

No	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025	Satu Buku	Untuk dipergunakan seperlunya

Diterima tanggal 21 Juli 2025

Penerima :
Nama Jabatan :
Analisis Monev dan Pelaporan

Tanda Tangan :


Nama Lengkap :
Desianti Yuanita

Pengirim:
Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ani Leilani



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025

POLITEKNIK AHLI
USAHA PERIKANAN



#AUPWAVE

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Politeknik AUP pada Triwulan II Tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja Politeknik AUP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik AUP menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Politeknik AUP.

Secara umum capaian sasaran kinerja Politeknik AUP Triwulan II Tahun 2025 ini telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun diharapkan dapat terjadi optimalisasi dari peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan Politeknik AUP pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Politeknik AUP dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas tenaga dan fikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan masukan kegiatan Politeknik AUP selanjutnya.

Jakarta, 21 Juli 2025
Direktur Politeknik AUP,



Au Eeliani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia.....	9
1.5 Potensi dan Permasalahan	11
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Rencana Kerja Tahunan	20
2.3 Perjanjian Kinerja	21
2.4 Pengukuran Kinerja.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama Politeknik AUP	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	59
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Politeknik AUP	61
BAB IV. PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP Tahun 2024 (Per 15 Juli 2025)	v
Tabel 2. Keragaan SDM ASN Politeknik AUP	9
Tabel 3. Keragaan SDM ASN berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 4. Keragaan SDM ASN berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 5. Keragaan SDM ASN berdasarkan Golongan	10
Tabel 6. Keragaan SDM Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 7. Rekap Anggaran Rencana Kerja Tahunan Politeknik AUP Tahun 2025...	20
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Politeknik AUP Tahun 2025	21
Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025	25
Tabel 10. Capaian Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	30
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	31
Tabel 12. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	41
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	42
Tabel 14. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (indeks)	45
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	47
Tabel 16. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	49
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	50
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	53
Tabel 19. Perbandingan Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	54
Tabel 20. Capaian Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%)	57

Tabel 21. Perbandingan Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP	58
Tabel 22. Tabel Realisasi Anggaran Politeknik AUP s.d triwulan I tahun 2025	53
Tabel 23. Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Politeknik AUP Triwulan II Tahun 2024	56
Tabel 24. Capaian Kinerja triwulan II tahun 2025	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025	x
Gambar 2. Struktur Organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan	8
Gambar 3. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025	24
Gambar 4. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan I Tahun 2025	69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja triwulan II tahun 2025 Politeknik AUP merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik AUP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2025. Politeknik AUP telah menetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025 yang berpedoman pada Perjanjian Kerja Pusat Pendidikan KP. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP di triwulan II tahun 2025 sebesar 105,54%.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada *Dashboard* kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NPSS diatas 100%. *Dashboard* kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realisasi dari 19 IKU Politeknik AUP adalah:

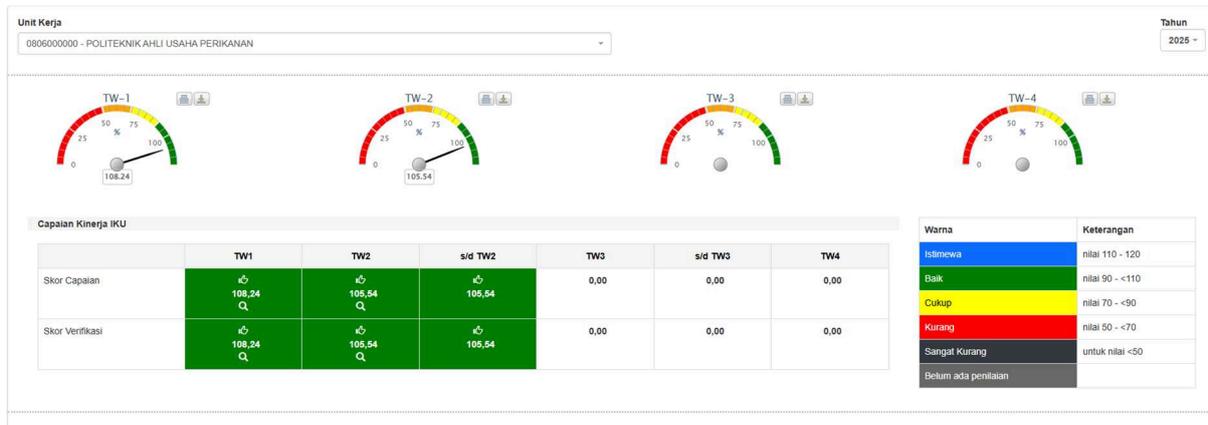
Tabel 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP Triwulan II Tahun 2025 (Per 15 Juli 2025)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436			
		2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512			
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891	2.816	2.844	100,99
		4	Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741			
		5	Kerjasama Politeknik AUP yang	5			

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
			disepakati (Kesepakatan)				
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang besertifikasi kompetensi (%)	100			
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100			
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6			
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1			
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1			
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60			
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85	85	90,91	106,95
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81			

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
	14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84	75	78,91	105,21
	15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	80	100	120
	16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80			
	17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92	84	96,49	114,87
	18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5			
	19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100	100	100	100

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP pada triwulan II tahun 2025 sebesar 105,54%, yang dapat dilihat pada Dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja Politeknik AUP triwulan II tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada dashboard kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NPSS diatas 100%. Dashboard kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 3 (tiga) IKU Politeknik AUP pada hitungan capaian adalah:

1. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Politeknik AUP yang Kompeten (Orang), capaian 2.844 orang (100,99%);
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%), capaian 90,91% (106,95%);
3. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks), capaian 78,91 (105,21%);
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%), capaian 100% (120%);
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai), capaian 96,49 (114,87%);
6. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%), capaian 100% (100%);

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai Politeknik AUP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, maka Politeknik AUP sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPPSDM KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas. Setiap penyelenggara negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas, Politeknik AUP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Politeknik AUP diwajibkan untuk:

- a. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
- b. Menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Politeknik AUP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2024 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Politeknik AUP Interim triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang dilaporkan pada akhir Triwulan sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Politeknik AUP triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Politeknik AUP triwulan II Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi beberapa tujuan yaitu:

- a. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik AUP triwulan II tahun 2025 menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi di satu sisi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat di sisi lain;
- b. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Politeknik AUP;
- c. Sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Politeknik AUP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik AUP memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Politeknik AUP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- b. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. Pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
- h. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- j. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya;
- k. Pelaksanaan pengawasan internal.

Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, maka Politeknik AUP sebagai UPT BPPSDM KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yang menuntut azas akuntabilitas.

a. Kedudukan

- a.1. Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik AUP adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada sekretaris

badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- a.2. Pembinaan Politeknik AUP secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri.
- a.3. Politeknik AUP sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Direktur.

b. Tugas Pokok

Politeknik AUP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Politeknik AUP terdiri atas:

c.1. Direktur dan Wakil Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud merupakan unsur pemimpin Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik AUP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, direktur menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
4. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
5. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
6. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
7. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data;
8. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
9. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan;
10. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya; dan

11. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik AUP.

c.2. Wakil Direktur

Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur. Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur terdiri atas:

1. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik selanjutnya disebut Wakil Direktur I.

Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.

2. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, dan data.

3. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter.

c.3. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.

c.4. Senat;

Senat sebagaimana dimaksud merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

c.5. Dewan Penyantun.

Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik AUP.

c.6. Program Studi

Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP. Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Program Studi dipimpin oleh ketua. Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas ketua dibantu oleh sekretaris.

c.7. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh kepala. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c.8. Pusat Penjaminan Mutu.

Pusat Penjaminan Mutu merupakan unsur pendukung akademik Politeknik AUP dibidang penjaminan mutu. Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh kepala. Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan

menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

c.9. Subbagian Umum

Subbagian Umum merupakan unsur pelaksana administrasi dibidang ketatausahaan. Subbagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c.10. Unit Penunjang

Unit Penunjang merupakan unsur penunjang Politeknik AUP untuk menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP. Unit Penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur III. Unit Penunjang terdiri atas:

1. Unit Pembangunan Karakter

Unit Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter dan pengelolaan asrama taruna.

2. Unit Perpustakaan

Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan melayani pengguna jasa perpustakaan

3. Unit Laboratorium;

Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk laboratorium, bengkel, kapal latih, tambak/kolam, dan *hatchery* secara terpadu.

4. Unit Teknologi Informatika

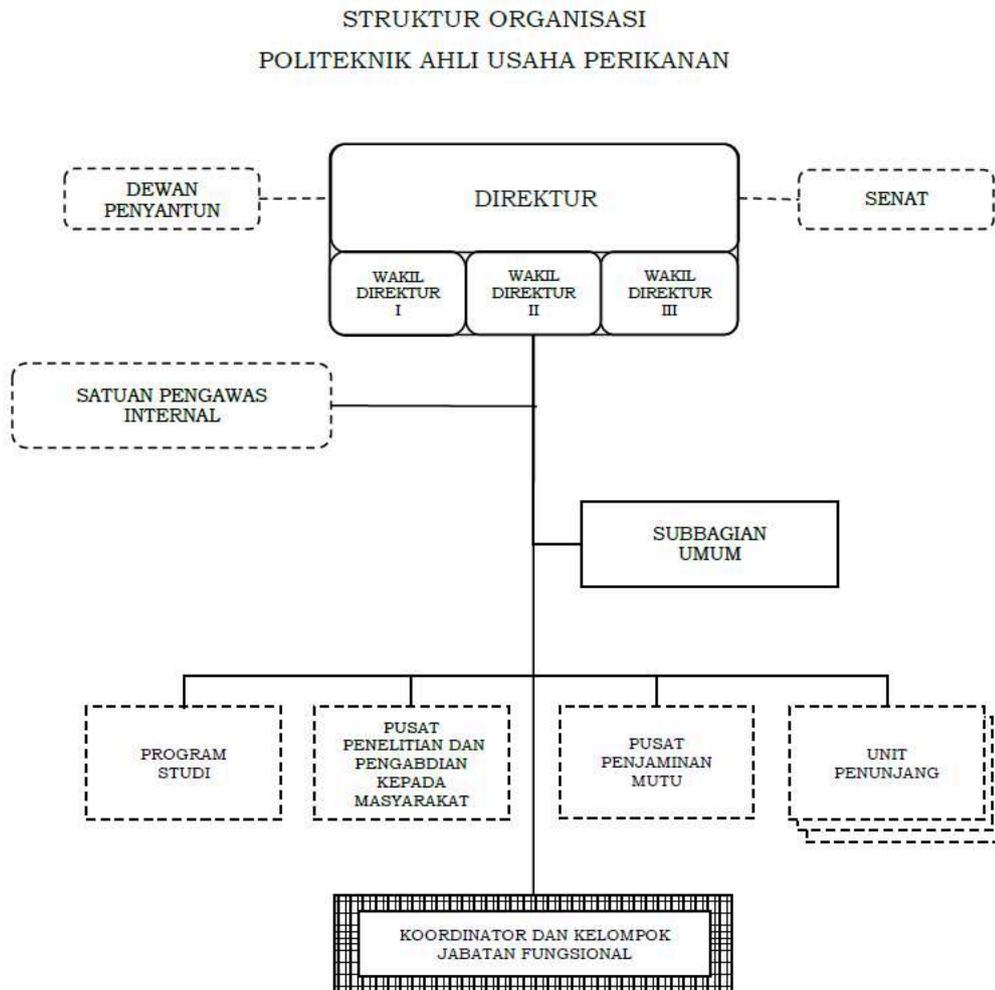
Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.

5. Unit Layanan Uji Kompetensi.

Unit Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.

c.1.1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Politeknik AUP. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Politeknik AUP.



Gambar 2. Struktur Organisasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan

1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan berkualitas. SDM Politeknik Ahli Usaha Perikanan terdiri atas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Saat ini Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki SDM sebanyak 368 orang yang terdiri atas 283 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) 39 orang Tenaga Non ASN dan 46 orang PJLP (data per 30 Juni 2025). Keragaan SDM ASN berdasarkan jenis jabatannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Keragaan SDM ASN Politeknik AUP

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Kepala Subbagian Umum	1	0,35
2	Dosen	174	61,48
3	Dokter Umum	3	1,06
4	Dokter Gigi	1	0,35
5	Analisis SDM Aparatur	1	0,35
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	0,35
7	Arsiparis Ahli Pertama	1	0,35
8	Pranata Hubungan Masyarakat	1	0,35
9	Pranata Laboratorium Pendidikan	3	1,06
10	Pranata Komputer	3	1,06
11	Pustakawan	3	1,06
12	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	2	0,71
13	Perawat	3	1,06
14	Perawat Gigi	1	0,35
15	Apoteker	1	0,35
16	Fungsional Umum	83	29,33
17	Perekam Medis Terampil	1	0,35
Jumlah		283	100

Sedangkan keragaan SDM ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keragaan SDM ASN berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-laki	195	68,90
2	Perempuan	88	31,10
Jumlah		283	100

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh SDM ASN Politeknik Ahli Usaha Perikanan, paling banyak S-2 (55,48%), kemudian diikuti oleh SLTA/DI/DII (14,13%), S-3 (12,01%), S-1/D-IV (9,54%), D-III (5,65%) serta SLTP (2,12%) dan SD (1,06%). Distribusi jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Keragaan SDM ASN berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	S3	34	12,01
2	S2	157	55,48
3	S1/D4	27	9,54
4	D3	16	5,65
5	SLTA/D1/D2	40	14,13
6	SLTP	6	2,12
7	SD	3	1,06
Jumlah		283	100

Berdasarkan golongan, SDM ASN paling banyak golongan III, yaitu 51,24%, diikuti dengan urutan distribusi golongan IV sebanyak 36,75%, golongan II sebanyak 11,66% dan golongan I sebanyak 0,35%. Keragaan PNS berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Keragaan SDM ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	104	36,75
2	III	145	51,24
3	II	33	11,66
4	I	1	0,35
Jumlah		283	100

Keragaan SDM PNS Politeknik Ahli Usaha Perikanan menurut jabatan adalah sebagai berikut: Jabatan Struktural sebanyak 1 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 199 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 83 orang. Keragaan PNS berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Keragaan SDM Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Struktural	1	0,35
2	Fungsional Tertentu	199	70,32
3	Fungsional Umum	83	29,33
Jumlah		283	100

1.5 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Keberadaan Politeknik AUP sangat penting dan strategis bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam hal pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, karena:

1. Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat besar dan memerlukan sumberdaya manusia yang profesional dan produktif, dengan kemampuan bisnis;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan Revolusi Biru yaitu perubahan mendasar cara berfikir dari orientasi daratan menjadi orientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui program yang terintegrasi;
3. Meningkatkan SDM kelautan dan perikanan pada perguruan tinggi vokasi yang lebih menitikberatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dilengkapi dengan kompetensi yang bersertifikat, kemudian penerapan teknologi yang relevan dan terjual untuk mengantisipasi tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang;
4. Politeknik AUP merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Program Pascasarjana Terapan di bidang kelautan dan perikanan satu-satunya di Indonesia;
5. Okupasi lulusan Politeknik AUP di sektor kelautan dan perikanan sangat luas. Secara garis besar okupasi yang diisi lulusan menurut catatan selama ini adalah Aparatur Sipil Negara diberbagai unit kerja baik struktural maupun fungsional, perusahaan, pengusaha, konsultan, perbankan dan media.

Beberapa keunggulan dan karakteristik yang dimiliki Politeknik AUP adalah:

1. Keunggulan komparatif
 - a) Penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan rasio kegiatan praktik jauh lebih banyak dibanding teori (70% : 30%);
 - b) Penerapan pembinaan kehidupan kampus dengan kedisiplinan yang tinggi, sehingga para lulusan menjadi pekerja keras, produktif dan memiliki daya juang yang tinggi;

- c) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan yang memenuhi standar internasional sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - d) Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk setiap Program Studi.
2. Keunggulan Kompetitif
- a) Lulusan unggul karena memiliki kecerdasan yang produktif dan kemampuan beradaptasi serta ketahanan fisik dan mental yang tinggi untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri;
 - b) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang kelautan dan perikanan;
 - c) Memenuhi kualifikasi standar internasional (kemampuan mengoperasikan dan manajemen serta skill yang mumpuni);
 - d) Memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2000.

Model pendidikan di Politeknik AUP didesain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, baik dalam aspek bisnis, teknologi terapan, kemasyarakatan serta kedisiplinan. Dengan karakteristik lulusan yang demikian, ke depan dapat lahir generasi baru pelaku usaha (*Start-up*) kelautan dan perikanan dari lulusan Politeknik AUP, sehingga menjadi aktor utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

b. Permasalahan

Permasalahan sekaligus peluang sektor kelautan dan perikanan meliputi berbagai aspek dan sangat dituntut kesiapan sumberdaya manusia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan kebijakan pengembangan SDM unggul dimasa kini dan masa datang. Politeknik AUP merupakan aset strategis menghadapi permasalahan kelautan dan perikanan, karena muara dari permasalahan ini pada prinsipnya adalah kelemahan sumberdaya manusia pelaku utama kelautan dan perikanan. Permasalahan dan peluang sektor kelautan dan perikanan itu meliputi:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya ikan di perairan laut dan budidaya ikan untuk dikelola sebagai sumber pendapatan;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi KP masih banyak keterbatasan;
3. Mindset lulusan masih ingin jadi Aparatur Sipil Negara;

4. SDM lulusan belum menjadi aktor utama dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta Unit Kerja lainnya di sektor kelautan dan perikanan;
5. Teknologi terapan yang dihasilkan masih belum komersial di masyarakat dan DUDI;
6. Proses inkubator oleh perusahaan bagi taruna dan lulusan untuk menjadi *Start-up* masih minim;
7. Transfer teknologi dan peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan masih kurang;
8. Ketatnya persaingan dunia kerja dan kebijakan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi para lulusan Politeknik AUP belum mendukung. Permasalahan yang secara khusus terjadi di Politeknik AUP yang perlu segera dilakukan pembenahan adalah:
 1. Lulusan Politeknik AUP belum menjadi prioritas pilihan bagi *stakeholder* kelautan dan perikanan;
 2. Politeknik AUP masih belum menjadi Badan Layanan Umum (BLU);
 3. Pascasarjana Terapan S3 belum dibuka;
 4. Tata kelola Pendidikan Vokasi belum sepenuhnya mengacu pada PP 62/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan;
 5. Jejaring kerja dalam dan luar Negeri yang masih terbatas; Pelayanan Birokrasi untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi vokasi belum Optimal.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Politeknik AUP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dan laporan, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan II Tahun 2025;
- b. **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Politeknik AUP seperti tugas dan fungsi serta struktur organisasi Politeknik AUP;

- c. **BAB II Perencanaan Kinerja**, menyajikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Politeknik AUP tahun 2025, serta Pengukuran Kinerja;
- d. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini menjelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
- e. **BAB IV Penutup**, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja, permasalahan dan rekomendasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam situasi demikian, Politeknik AUP harus lebih mampu menjadi jembatan antara proses pendidikan dengan dunia kerja dan kebutuhan pasar kerja secara nyata. Hal ini ditegaskan dalam Permen KP Nomor 90/PERMEN-KP/2020 Pasal 2 yang mana tugas Politeknik AUP adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu Politeknik AUP yang menyelenggarakan pendidikan vokasional harus merancang kurikulum dan implementasinya berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menjadi okupasi pekerjaan bagi lulusan sehingga menjadi aktor Utama di Sektor Kelautan Perikanan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas lulusan di Politeknik AUP sangat perlu terus dikembangkan pada kemampuan berwirausaha yang berdaya saing tinggi dalam bidang kelautan dan perikanan, dengan kompetensi dan sertifikasi yang melekat di dalamnya. Pengembangan kemampuan berwirausaha pada pendidikan di Politeknik AUP harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, baik dari kurikulumnya, penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikannya serta keilmuannya. Oleh karena itu lulusan Politeknik AUP mempunyai kemampuan mengembangkan wirausaha di bidang penangkapan ikan, mesin perikanan, budidaya, pembenihan, pengolahan dan pemasaran serta pengelolaan sumberdaya perairan dan penyuluhan.

Lulusan yang menjadi pengusaha pemula di bidang kelautan dan perikanan saat ini masih dirasakan sangat kurang, baik dalam jumlah maupun kualitas. Oleh karena itu pengelolaan pendidikan di Politeknik AUP yang berorientasi wirausaha mutlak dilaksanakan untuk pemanfaatan potensi

kelautan dan perikanan yang lebih optimal dan mampu menjadi raja di negeri sendiri, tanpa terus menerus menjadi pekerja.

Peran strategis Politeknik AUP meliputi:

- A. Menetapkan kurikulum vokasi perikanan berbasis usaha;
- B. Meng-up grading dosen untuk melaksanakan pendidikan vokasi;
- C. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan mode vokasi;
- D. Menjalin kemitraan yang sinergi dengan unit bisnis;
- E. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya;
- F. Menghasilkan inovasi teknologi komersial;
- G. Menyediakan galery (hard & soft) teknologi yang dihasilkan;
- H. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra;
- I. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra;
- J. Memfasilitasi terjadinya inkubasi start up bisnis perikanan di desa mitra;
- K. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- L. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- M. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- N. Menyelenggarakan pembinaan taruna dan tata kehidupan kampus untuk mewujudkan lulusan unggul dan kehidupan kampus yang edukatif dan produktif serta suasana kampus yang nyaman dan asri.

A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”.

B. Misi

Misi Politeknik AUP adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 8 (Delapan) misi Presiden yang dituangkan ke dalam 8 (Delapan) Asta Cita, KKP mendukung 2 (Dua) misi yaitu:

1. Misi Asta Cita ke-2 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan
2. Misi ke-4 yakni Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan tujuan Indonesia Emas 2045, yang memiliki arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, Politeknik AUP mendukung misi Asta Cita ke – 4 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Politeknik AUP mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berwirausaha di pemerintahan, swasta, dan unit kerja lainnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan;
2. Politeknik AUP memiliki tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara Internasional;
3. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam rangka mendukung peserta didik yang dapat berdaya saing.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Politeknik AUP dengan memperhatikan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusdik KP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Kegiatan Pusdik KP adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan Dan Perikanan Yang Kompeten;
2. SK2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan;
3. SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
4. SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar;
5. SK5 Aparatur yang Dididik dan Dilatih;
6. SK6 Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Dengan memperhatikan sasaran strategis Pusdik KP dimaksud, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai Politeknik AUP pada tahun 2025-2029 dengan mengacu pada sasaran kegiatan Pusdik KP adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten;
2. SK2 Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan;
3. SK3 Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan;
4. SK4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker.

Menjabarkan misi Sasaran Kegiatan Pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten", dengan indikator kinerja:

1. Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) dengan target 436 orang sampai dengan tahun 2025;
2. Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang) dengan target 512 orang di tahun 2025;

3. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang) dengan target pada tahun 2025 sebanyak 2.891 orang;
4. Nilai PNBP Satker Politeknik AUP (Rp Miliar) dengan target pada tahun 2025 sebanyak 2,741 miliar;
5. Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan) dengan target pada tahun 2025 sebanyak 5 dokumen;
6. Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%) dengan target pada tahun 2025 sebesar 100%;
7. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%) dengan target 100% pada tahun 2025.

Menjabarkan misi Sasaran Kegiatan Kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah "Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket) dengan target di tahun 2025 sebanyak 6 paket;
2. Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok) target 1 unit sampai dengan tahun 2025.

Menjabarkan misi Sasaran Kegiatan Ketiga (SK-3) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga) target 1 sampai dengan tahun 2025;
2. Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang) target 60 orang sampai dengan tahun 2025.

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Politeknik AUP melalui Sasaran Kegiatan Kelima (SK-4) adalah "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker", dengan indikator kinerja:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) dan disampaikan dengan target 85% sampai dengan tahun 2025;

2. Penilaian mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai) dengan target pada tahun 2025 sebesar nilai 81;
3. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (indeks) dengan target 84 sampai dengan tahun 2025;
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) dengan target 80% sampai dengan tahun 2025;
5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%) target 80% di tahun 2025;
6. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Politeknik AUP (Nilai) dengan target 92 sampai dengan tahun 2025;
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai) dengan target 71,5 sampai dengan tahun 2025;
8. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%) dengan target 100% sampai dengan tahun 2025;

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Politeknik AUP tahun 2025 adalah Program Pengembangan dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp. 114.865.893.000,- dengan rincian kegiatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Rekap Anggaran Rencana Kerja Tahunan Politeknik AUP Tahun 2025

NO	Jenis Belanja	Anggaran (Rp. 000)
Anggaran Total		114.865.893
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi KP	48.433.852
	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	140.000
	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	282.000
	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	180.000
	Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi, Pengabdian Kepada Masyarakat	70.000
	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	47.761.852
2	Program Dukungan Manajemen Satker	66.432.041
	Layanan Umum	42.500
	Layanan Perkantoran	66.347.041
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	42.500

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Politeknik AUP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran kegiatan Politeknik AUP. Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Politeknik AUP mengalami perubahan dari tahun 2024 yaitu terdapat penambahan 3 (tiga) IKU antara lain, 1) Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang), 2) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%), dan 3) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%). IKU Politeknik AUP pada Perjanjian Kinerja (PK) Level 3 2025 per 30 Januari tahun 2025, terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Politeknik AUP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436
		2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891
		4	Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741
		5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	kelautan dan perikanan	11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81
		14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5
		19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100

2.4 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Politeknik AUP triwulan II tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework*. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework*.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup Politeknik AUP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran telah ditugaskan kepada Tim Pengelolaan Kinerja Politeknik AUP untuk menyusun LKj triwulan dan LKj tahun 2024. Selanjutnya Tim Pengelolaan Kinerja Politeknik AUP melaporkan kepada tim monev Pusdik KP dan tim monev BPPSDM KP yang kemudian akan merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan pada lingkup BPPSDM KP.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama Politeknik AUP

Pengukuran capaian kinerja Politeknik AUP triwulan I tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP pada triwulan II tahun 2025 sebesar 105,54%, yang dapat dilihat pada tangkapan layar *dashboard* kinerja dibawah ini:



Gambar 3. Capaian Kinerja Politeknik AUP triwulan II tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada *dashboard* kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NPSS di atas 100%. *Dashboard* kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran kegiatan telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran capaian kinerja di atas terlihat nilai pencapaian sasaran kegiatan (NPSS) sampai dengan triwulan II tahun 2025 tercapai sebesar 105,54%, yang berasal dari capaian sebagai berikut:

1. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Politeknik AUP yang Kompeten (Orang), capaian 2.844 orang (100,99%);
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%), capaian 90,91% (106,95%);

3. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks), capaian 78,91 (105,21%);
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%), capaian 100% (120%);
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai), capaian 96,49 (114,87%);
6. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%), capaian 100% (100%);

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2015 dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPSDM KP yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2025 dapat tercapai. Capaian Kinerja pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436			
		2 Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512			
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan	2.891	2.816	2.844	100,99

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
		Politeknik AUP yang kompeten (Orang)				
		4 Nilai PNPB satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741			
		5 Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5			
		6 Persentase lulusan Politeknik AUP yang besertifikasi kompetensi (%)	100			
		7 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100			
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8 Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6			
		9 Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1			
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10 Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1			
		11 Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60			
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan	12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang	85	85	90,91	106,95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
Manajemen Eselon I dan Satker		dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)				
	13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81			
	14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84	75	78,91	105,21
	15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	80	100	120
	16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80			
	17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92	84	96,49	114,87
	18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5			
	19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1 :

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur tingkat keberhasilan Politeknik AUP dalam menyiapkan lulusan yang mampu bersaing

dan langsung terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, maupun Dunia Kerja (DU/DI). IKU ini menjadi tolok ukur efektivitas proses pendidikan vokasi di lingkungan kelautan dan perikanan, baik dari sisi kurikulum, pembelajaran praktik, hingga kerja sama dengan mitra industri.

Terserapnya lulusan ke DU/DI menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki telah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini tidak terlepas dari penerapan program pendidikan berbasis kerjasama dengan dunia industri, pelaksanaan magang industri, serta peningkatan *soft skill* dan sertifikasi kompetensi peserta didik.

Capaian IKU ini juga menjadi cerminan keberhasilan Politeknik AUP dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap bekerja, khususnya di sektor kelautan dan perikanan yang strategis. Semakin tinggi angka serapan lulusan, semakin besar pula kontribusi Politeknik AUP dalam mendukung pertumbuhan ekonomi biru dan kemandirian sektor perikanan nasional.

Adapun progres capaian Indikator Kinerja Utama Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang) sampai dengan triwulan II 2025 mencapai 94 orang atau 21,5% dari target 436 orang. Saat ini Politeknik AUP masih mengidentifikasi kembali jumlah lulusan peserta didik tahun 2025.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 2 :

Jumlah lulusan Politeknik AUP (orang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk mengukur jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Politeknik AUP sesuai dengan waktu dan standar yang telah ditetapkan. IKU jumlah lulusan mencerminkan efektivitas proses pembelajaran, ketepatan waktu studi, serta kemampuan institusi dalam membimbing mahasiswa hingga lulus.

Tingginya jumlah lulusan menjadi indikator positif bahwa proses akademik dan dukungan institusional berjalan dengan baik, mulai dari penerimaan mahasiswa, penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, hingga layanan akademik dan non-akademik.

Selain itu, pencapaian jumlah lulusan juga menjadi dasar dalam penguatan kontribusi Politeknik AUP terhadap pembangunan sumber daya

manusia unggul di sektor kelautan dan perikanan. Setiap lulusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter dan integritas yang siap menjawab tantangan dunia kerja.

Dengan menjaga kualitas dan kuantitas lulusan, Politeknik AUP terus berkomitmen dalam menghasilkan tenaga profesional yang mendukung kemajuan ekonomi biru Indonesia.

Jumlah lulusan program studi D4 Politeknik AUP tercatat sebanyak 506 orang dari target 512 orang. Capaian ini menunjukkan tingkat penyelesaian studi yang tinggi, meskipun masih terdapat beberapa mahasiswa yang dalam proses revisi akhir sehingga belum dapat dihitung sebagai lulusan resmi. Politeknik AUP terus mendorong percepatan penyelesaian proses akademik agar target lulusan dapat segera tercapai secara penuh.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 3 :

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (orang)

Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan dari proses pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik/guru. Tugas inilah yang diemban oleh Politeknik AUP untuk mengembangkan peserta didik sesuai potensi mereka yang tepat di dunia kelautan dan perikanan. Politeknik AUP memiliki program studi yang sesuai dengan permintaan di dunia usaha/dunia industri, dengan program studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Permesinan Perikanan (MP), Teknologi

Pengolahan Hasil Perikanan (TPH), Teknologi Akuakultur (TAK), Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan (TPS) dan Penyuluhan Perikanan (PP).

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang) yang telah ditetapkan pada triwulan II 2024 adalah sebesar 2.816 dan IKU ini telah tercapai sebanyak 2.844 orang (100,99%) berdasarkan surat penyampaian capaian kinerja Politeknik AUP Nomor B.3922/POLTEK.AUP/TU.210/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Data Dukung Indikator Kinerja Utama Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Politeknik AUP yang Kompeten (Orang).

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurikulum pendidikan yang telah diterbitkan oleh Pusdik KP;
- 2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten;
- 3) Adanya sistem yang memudahkan penerimaan taruna baru; dan
- 4) Dukungan sarana serta prasarana yang memadai.

Adapun kegiatan yang mendukung IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Proses belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum mencakup 70% praktik dan 30% teori; dan
- 2) Sosialisasi kegiatan penerimaan taruna/i baru di zona wilayah cakupan PoliteknikAUP secara menyeluruh.

Selain faktor dan kegiatan di atas, Politeknik AUP juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pada peserta didik untuk menjadikan para peserta didik menjadi lebih kompeten.

Gambaran capaian pada IKK Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)

IKK 3. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)									
Realisasi TW II				Triwulan II 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
1.528	1.498	2.158	2.663	2.816	2.844	100,99	6,80	2.891	98,37

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa capaian IKK Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II Tahun 2025 sebesar 2.816 Orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang memiliki capaian sebanyak 2.663 orang, maka capaian Politeknik AUP pada Tahun 2025 lebih besar. Berdasarkan data dari operator akademik Politeknik AUP, dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah peserta didik yang aktif pada per Januari tahun 2025 adalah sebesar 2.870 sampai dengan semester genap tahun 2024 dan pada semester ganjil berkurang menjadi 2.844 dengan data sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta didik yang *drop out* (DO) sebanyak 40 orang, 12 orang masih tunda, dan 14 orang ber status tunda masuk, sehingga jumlah peserta didik yang dinyatakan aktif sebanyak 2.844 orang ;
- 2) Kebijakan DO yang dikeluarkan oleh Politeknik AUP kepada sejumlah taruna dikarenakan alasan indisipliner dan meninggalkan Kampus Politeknik AUP.

Begitu juga jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang memiliki capaian sebanyak 1.528 orang, Tahun 2022 sebanyak 1.498 orang dan Tahun 2023 sebanyak 2.158 orang, maka jumlah capaian pada IKK Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten pada Tahun 2025 jauh lebih besar yaitu dengan jumlah 2.844 orang.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra BPPSDM Tahun 2025, capaian triwulan II Tahun 2025 telah mencapai 98,7%.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	Target TW II	Capaian TW II	%
1	Politeknik AUP	2816	2844	100,99%
2	Politeknik KP Sidoarjo	570	580	101,75%
3	Politeknik KP Bitung	475	482	101,47%
4	Politeknik KP Sorong	350	374	106,86%
5	Politeknik KP Karawang	274	279	101,82%
6	Politeknik KP Bone	657	659	100,30%
7	Politeknik KP Kupang	500	524	104,80%
8	Politeknik KP Dumai	266	276	103,76%
9	Politeknik KP Pangandaran	268	268	100,00%
10	Politeknik KP Jembrana	360	363	100,83%
11	AK Wakatobi	43	42	97,67%

Pada tabel di atas, menggambarkan bahwa sebagian besar satuan Pendidikan tinggi KP yang setara di lingkup Pusdik KP sudah mencapai target pada IKK Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten di triwulan II tahun 2025. Dari 11 satuan pendidikan yang setara di lingkup Pusdik KP, sebanyak 9 satuan pendidikan tercapai di atas 100 . Politeknik AUP mendapatkan persentase capaian sebesar 100,99% yang menjadi capaian paling sedikit jika dibandingkan dengan Politeknik KP Sidoarjo (101,75%), Politeknik KP Bitung (101,47%) dan Politeknik KP Sorong (106,86%). Dalam hal jumlah lulusan peserta didik, memang Politeknik AUP memiliki jumlah yang paling banyak (2.844 orang), hal ini dikarenakan jumlah peserta didik Politeknik AUP memiliki jumlah peserta didik terbanyak diantara satuan didik lainnya.

Dalam rangka mencapai target IKK Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten, Politeknik AUP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 39.772.091.000,- dan pada triwulan II telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 10.082.620.743,- atau sebesar 25%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKK ini yaitu sebesar 100,99% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 75,01%.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 4 :

Nilai PNBP Satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)

Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada KKP dan terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya (Non SDA), dan PNBP BLU. Sesuai PP 85 Tahun 2021 terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, Pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, Pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, analisis data kelautan dan perikanan, sertifikasi, hasil samping kegiatan tuis, tanda masuk karcis masuk Kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi, denda administratif dan ganti kerugian.

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik AUP hingga triwulan II tahun 2025 menunjukkan progres yang positif. Berdasarkan data keuangan satuan kerja Politeknik AUP, nilai PNBP yang berhasil dihimpun sampai dengan bulan Juni tahun 2025 mencapai Rp. 804.463.081.

Angka ini mencerminkan kontribusi awal Politeknik AUP dalam mendukung peningkatan pendapatan negara melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan layanan lainnya. Ke depan, nilai ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan optimalisasi program-program yang berpotensi menghasilkan PNBP, termasuk kerja sama dengan mitra industri dan masyarakat.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 5 :

Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Kemitraan dan/atau Kerjasama yang dijalin dan/atau masih dilaksanakan antara Satuan Kerja lingkup Politeknik AUP dengan pihak mitra. Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara Politeknik AUP dengan pihak mitra dengan durasi pelaksanaan tertentu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Penerimaan lulusan Pendidikan Vokasi KP di Dunia Industri;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan keilmuan dalam kerangka tri dharma perguruan tinggi;
4. Pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Politeknik AUP;
5. Peningkatan pelayanan publik atas Pendidikan KP.
6. Penerimaan lulusan Satuan Pendidikan KP di Dunia Industri;
7. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait jumlah kerja sama yang disepakati, Politeknik AUP terus mendorong sinergi strategis dengan pihak eksternal. Hingga saat ini, Politeknik AUP telah

berhasil menjalin 2 (dua) kerja sama resmi yang ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama dengan:

1. PT. Sejahtera Falam Indonesia
2. PT. Mega Baruna Fisheries

Kedua kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperluas jaringan kemitraan yang mendukung penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, serta membuka peluang pengembangan kompetensi peserta didik melalui program magang, pelatihan, maupun penelitian terapan. Sampai dengan periode triwulan II tahun 2025, Politeknik AUP kembali berkoordinasi dengan PT. Sinar Abadi Cemerlang terkait persiapan pelaksanaan Kerjasama.

Progres ini menunjukkan komitmen Politeknik AUP dalam meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan vokasi melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri ataupun dunia kerja.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 6 :

Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik Tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang Kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan, maka sistem penilaian hasil belajar yang disusun pun harus menggunakan model penilaian berbasis kompetensi (*competency-based assessment*). Di samping itu upaya standarisasi sistem uji kompetensi/penilaian berbasis kompetensi perlu dilakukan untuk mendapatkan kualitas proses dan hasil yang diharapkan sesuai dengan persyaratan bukti standar kompetensi, dimanapun, kapanpun serta siapapun penilai (asesor) yang melaksanakan uji kompetensi tersebut untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang dan dapat diraih setiap waktu. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dilakukan untuk mengetahui tingkat kecakapan taruna. Tujuan dari UKK adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi taruna sesuai dengan bidang keahlian yang ditempuh, antara lain:

1. Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (ANKAPIN-I, BST)

2. Program Studi Mesin Perikanan (ATKAPIN-I, BST)
3. Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (HACCP, SPI)
4. Program Studi Teknologi Akuakultur (CPIB)
5. Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (MPAG, MPAD, AMDAL).
6. Program Studi Penyuluhan Perikanan (Sertifikat Pembenuhan, Pembesaran, Pengolahan dan Penyuluhan).

Progres terhadap IKU persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi saat ini mencapai 100%. Unit Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik AUP masih terus menjalankan proses sertifikasi terhadap peserta didik di berbagai program studi.

Pelaksanaan sertifikasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai standar industri, serta meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Hasil akhir dari proses ini akan menjadi dasar penentuan persentase lulusan bersertifikat yang dilaporkan sebagai capaian IKU. Dengan komitmen dan dukungan dari seluruh unit terkait, diharapkan target pencapaian indikator ini dapat terealisasi secara optimal di akhir tahun.

Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 7 :

Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)

Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur seberapa besar proporsi peserta didik baru di Politeknik AUP yang berasal dari keluarga pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan, dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Capaian IKU ini menjadi tolok ukur komitmen Politeknik AUP dalam mendukung pemerataan akses pendidikan vokasi kepada anak-anak pelaku utama, sekaligus sebagai bentuk afirmasi terhadap kelompok masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam sektor kelautan dan perikanan nasional.

Semakin tinggi persentase anak pelaku utama yang diterima, semakin besar pula kontribusi institusi dalam membangun generasi penerus pelaku usaha perikanan yang berpendidikan, berkompeten, dan mampu membawa perubahan positif bagi komunitasnya. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang inklusif dan relevan, Politeknik AUP mendorong terciptanya

transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga pelaku utama di seluruh Indonesia.

IKU ini juga menunjukkan peran aktif Politeknik AUP dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemenuhan hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas.

Progres pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP saat ini sedang menunggu hasil pengumuman penerimaan taruna tahun 2025.

Langkah ini merupakan komitmen Politeknik AUP dalam mendukung pemerataan akses pendidikan vokasi, khususnya bagi keluarga pelaku utama yang berperan langsung dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Capaian IKU ini akan ditentukan setelah proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru selesai dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan 2 :

Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama 8 :

Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)

Indikator Kinerja Utama Penelitian terapan pendidikan tinggi KP di Politeknik AUP (unit) menunjukkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian terapan. Sebagai Perguruan Tinggi kedinasan dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik AUP mengemban tugas untuk mendukung visi dan misi KKP serta mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Upaya merealisasikan tugas Politeknik AUP sebagai suatu Perguruan Tinggi, terdapat sebuah pusat yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas mengemban 2 (dua) dari substansi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki sebuah pedoman kegiatan yang disusun dalam bentuk proposal yang nantinya digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan tugas, monitoring selama kegiatan berlangsung serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, Politeknik AUP saat ini masih

berada pada tahap pengusulan proposal pelaksanaan penelitian terapan. Progres terkini sudah dalam tahap pengusulan proposal dalam rangka pelaksanaan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran Kegiatan 2 :

Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama 9 :

Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Kelompok)

Indikator Kinerja Utama Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik AUP (paket) menunjukkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian terapan. Sebagai perguruan tinggi kedinasan dibawah naungan kementerian kelautan dan perikanan, Politeknik AUP mengemban tugas untuk mendukung visi dan misi KKP serta mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya merealisasikan tugas Politeknik AUP sebagai suatu perguruan tinggi, terdapat sebuah pusat yaitu pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas mengemban 2 (dua) dari substansi tridharma perguruan tinggi yaitu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki sebuah pedoman kegiatan yang disusun dalam bentuk proposal yang nantinya digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan tugas, monitoring selama kegiatan berlangsung serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, Politeknik AUP saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan. Progres terkini meliputi penyusunan tim pelaksana yang akan menggarap *roadmap* literasi terapan serta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Selain itu, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh program studi guna membahas arah penyusunan proposal 2 (dua) kegiatan tersebut. Saat ini, proposal kegiatan sedang disesuaikan kembali untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi dan kualitas kegiatan PKM yang direncanakan.

Langkah-langkah awal ini menjadi fondasi penting dalam memastikan output yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan aktual dunia pendidikan vokasi di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran Kegiatan 3 :

Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 10 :

Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur jumlah dan kualitas unit kelembagaan pendidikan kelautan dan perikanan di Politeknik AUP yang telah memperoleh status akreditasi dari lembaga yang berwenang, seperti BAN-PT atau LAM-PTKes. IKU ini mencerminkan sejauh mana institusi mampu memenuhi standar mutu pendidikan tinggi secara kelembagaan.

Akreditasi merupakan pengakuan formal terhadap mutu tata kelola, kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta luaran dari program pendidikan yang dijalankan. Oleh karena itu, pencapaian akreditasi bukan hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bukti komitmen Politeknik AUP dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Semakin banyak lembaga atau program studi yang terakreditasi, semakin kuat pula daya saing Politeknik AUP sebagai institusi vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini juga memberikan jaminan mutu kepada peserta didik, orang tua, dan mitra industri bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Dengan terus mendorong akreditasi kelembagaan, Politeknik AUP memperkuat fondasi institusi dalam mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global di sektor kelautan dan perikanan.

Adapun progres IKU ini sampai dengan Telah terbit dua SK dan sertifikat akreditasi terbaru untuk program studi teknologi Akuakultur (TAK) dan program studi Permesian Perikanan (MP) pada tanggal 20 Mei 2025. program studi TAK memperoleh peringkat akreditasi unggul setelah lolos Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh BAN-PT dan berlaku hingga 1 juni 2030. program studi permesian perikanan mengalami turun peringkat menjadi peringkat B yang berlaku hingga 20 mei 2030, setelah tidak lolos proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAN-PT. program studi MP mengalami kekukangan dosen dengan jenjang akademik Doktor (S3) sehingga

tidak memenuhi persyaratan untuk mempertahankan peringkat A (nilai 10% dari standar 25%).

1. Program studi PP : status pengajuan akreditasi masih di proses AK (setelah mengalami 4 kali perpanjangan proses AK)
2. Program studi TPS : status pengajuan akreditasi masih menunggu proses AK (menunggu penunjukan asesor oleh BAN-PT)
3. Program studi TPH : telah lolos pemantauan dan evaluasi tahap 2 dan menunggu keluarnya surat penetapan dari BAN-PT.

Sasaran Kegiatan 3 :

Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 11 :

Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi profesi pendidik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, target Politeknik AUP sebanyak 3 orang dosen yang eligible untuk mendapatkan sertifikasi dosen sehingga jumlah pendidik yang didorong untuk mendapatkan sertifikasi sebanyak 3 orang. Syarat Sertifikasi bagi dosen adalah :

- 1) Memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk dokter pendidik klinis (Dokdiknis) atau NIDK untuk dosen paruh waktu;
- 2) Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- 3) Memiliki pangkat/golongan-ruang atau inpassing bagi dosen non-ASN;
- 4) Memiliki mas kerja sebagai Dosen sekurang – kurangnya 2 tahun secara berturut – turut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen;
- 5) Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut – turut;
- 6) Memenuhi nilai ambang batas (Passing Grade) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
- 7) Memenuhi nilai ambang batas (*Passing Grade*) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek; dan
Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau *Applied Approach* (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi tenaga pendidik di Politeknik AUP belum dapat direalisasikan. Hal ini

disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan secara nasional, di mana alokasi dana untuk kegiatan sertifikasi masih dalam status blokir.

Kondisi ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan pelatihan dan asesmen sertifikasi kompetensi bagi dosen, yang seharusnya menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan di bidang kelautan dan perikanan. Meskipun demikian, Politeknik AUP tetap melakukan langkah-langkah persiapan administratif dan pendataan tenaga pendidik yang belum mengikuti pelaksanaan sertifikasi, agar proses dapat segera dilaksanakan begitu anggaran tersedia.

Selain itu, koordinasi dengan unit terkait terus dilakukan untuk mempercepat pembukaan blokir anggaran dan merencanakan penyesuaian jadwal pelaksanaan sertifikasi. Dengan kesiapan internal yang terus dijaga, Politeknik AUP optimis bahwa target indikator ini dapat dikejar pada triwulan berikutnya apabila kondisi fiskal sudah memungkinkan.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 12 :

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)

Indikator Kinerja ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Politeknik AUP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Politeknik AUP yang menjadi objek pengawasan. Capaian atas indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Politeknik AUP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah mencapai target yaitu 100%. Hasil capaian tindak lanjut ini juga bisa dilihat di aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Rekomendasi) yang dapat dibuka melalui sidak.kkp.go.id. Tercapainya Nilai Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan keberhasilan dan hasil dari kerja sama dari seluruh pegawai serta pengendalian intern Politeknik AUP.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yakni 90,91% dari temuan

awal 33 dan telah ditindaklanjuti 30 berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor: B.4601/BPPSDM.1/HP.510/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP”.

Faktor-faktor keberhasilan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti melakukan tindak lanjut temuan yaitu dengan 1) Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam percepatan penyelesaian temuan, 2) Sistem pengendalian internal yang aktif, 3) Dukungan dari Tim Inspektorat Jenderal KKP, dan 4) Evaluasi dan pelaporan secara berkala.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya IKK ini adalah sebagai berikut 1) Selalu melakukan koordinasi dengan tim Setba dan Itjen KKP terkait rekomendasi yang statusnya belum tuntas, 2) Rapat tindak lanjut rekomendasi / temuan, 3) Menginfokan ke masing-masing Penanggung Jawab temuan untuk segera melakukan percepatan penyelesaian temuan, dan 4) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

Gambaran capaian pada IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) sebagai berikut:

IKK 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)									
Realisasi TW II				Triwulan II 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
86,67	100	15,38	82	85	90,91	106,95	10,87	85	106,95

Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP menunjukkan tren yang dinamis dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, capaian berada pada angka 86,67%, mencerminkan adanya respons positif terhadap rekomendasi pengawasan. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, yang mencapai 100%,

menandakan bahwa seluruh rekomendasi telah dimanfaatkan secara maksimal dalam proses perbaikan kinerja institusi.

Pada tahun 2023, berada pada angka 15,38%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hasil rekomendasi pengawasan untuk perbaikan kinerja belum optimal, dan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada periode tersebut. Rendahnya capaian ini antara lain disebabkan oleh keterlambatan tindak lanjut atas hasil pengawasan, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan rekomendasi, serta masih perlunya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara internal.

Memasuki tahun 2024, terdapat perbaikan dengan capaian sebesar 82%, menunjukkan adanya upaya evaluasi dan penyesuaian sistem tindak lanjut agar lebih efektif dan responsif terhadap temuan pengawasan.

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian IKU kembali meningkat ke angka 90,91%, lebih tinggi daripada capaian pada triwulan I tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa Politeknik AUP telah berada pada jalur yang positif dalam meningkatkan pemanfaatan hasil pengawasan untuk mendorong perbaikan kinerja institusi. Jika tren ini terus dipertahankan dan ditingkatkan hingga akhir tahun, maka capaian tahun 2025 berpotensi melampaui tahun sebelumnya dan mendekati capaian optimal sebagaimana pada tahun 2022.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra KKP Tahun 2025, capaian pada tahun 2025 telah mencapai 106,95%.

Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	% Capaian TW I
1	Politeknik AUP Jakarta	90,91%
2	Politeknik KP Karawang	100%
3	Politeknik KP Bone	95,45%
4	Politeknik KP Pangandaran	100%
5	Politeknik KP Sidoarjo	100%

Capaian IKU terkait persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja antar satuan pendidikan menunjukkan variasi kinerja yang positif, dengan mayoritas satuan pendidikan mencapai angka di atas 90%.

Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Pangandaran Politeknik KP Sidoarjo mencatat capaian tertinggi, yaitu 100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh

rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara optimal dan dijadikan dasar perbaikan kinerja di seluruh unit kerja. Sementara itu, Politeknik KP Bone menyusul dengan capaian 95,45%, disusul oleh Politeknik AUP dengan capaian 90,91%.

Politeknik AUP memperoleh capaian sebesar 90,91%, yang walaupun belum mencapai angka maksimal, tetap menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi terhadap hasil pengawasan sebagai instrumen perbaikan tata kelola dan operasional lembaga.

Capaian Politeknik AUP berada pada urutan kelima di antara lima satuan pendidikan tersebut. Hal ini menjadi cerminan bahwa mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan telah berjalan dengan baik hanya saja memang belum secara keseluruhan dapat diselesaikan (30 dari 33 rekomendasi). Dalam upaya peningkatan, Politeknik AUP berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas unit kerja, mempercepat eksekusi rencana aksi, serta meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi.

Pada tahun anggaran 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak memperoleh alokasi anggaran secara langsung dikarenakan kebijakan efisiensi. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan terkait pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengintegrasikannya ke dalam kegiatan yang relevan.

Dalam rangka mencapai target IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%), Politeknik AUP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 19.160.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 12.491.000,- atau sebesar 65%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKK ini yaitu sebesar 106,95% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 41,5%.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 13 :

Penilaian mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit kerja merupakan

ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja. Evaluasi dilaksanakan tahunan dimana evaluasi telah dilaksanakan secara mandiri oleh Politeknik AUP.

IKU Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP merupakan bagian dari upaya institusi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat perguruan tinggi.

Penilaian mandiri ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Politeknik AUP telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan program yang dilakukan. Proses penilaian ini melibatkan pengumpulan data kinerja yang telah dicapai, yang kemudian dianalisis untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana dan harapan.

Dengan adanya IKU Penilaian Mandiri SAKIP, Politeknik AUP dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kinerja. Penilaian ini juga mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang responsif dan transparan, sesuai dengan visi dan misi institusi. Selain itu, IKU ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif.

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, penilaian mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Politeknik AUP belum dilaksanakan. Meskipun demikian, unit kerja telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan penilaian tersebut, antara lain:

- Pemutakhiran dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan.
- Penguatan pemahaman tim terkait prinsip dan indikator penilaian SAKIP melalui sosialisasi internal.
- Evaluasi awal terhadap kelengkapan dan konsistensi dokumen pendukung.

Pada tahun 2025, Politeknik AUP telah melaksanakan penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai oleh Tim dari Sekretariat BPPSDM KP sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola yang baik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Politeknik AUP memperoleh skor 83,95, yang mencerminkan kategori "A" (Memuaskan).

Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja di Politeknik AUP telah berjalan secara efektif

dan selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Selain itu, hasil ini juga menjadi bukti bahwa unit kerja telah mampu mengelola anggaran secara efisien, terarah pada pencapaian hasil, dan berorientasi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Ke depan, Politeknik AUP akan terus melakukan penguatan terhadap implementasi SAKIP, termasuk peningkatan kualitas indikator kinerja, pengukuran yang lebih akurat, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk mendukung kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 14 :

Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk mengukur profesionalitas ASN lingkup Politeknik AUP berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin (Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2018).

Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara menghitung indeks berdasarkan bobot 4 (empat) komponen yang telah ditetapkan meliputi : (1) Kualifikasi (Bobot 25%); (2) Kompetensi (Bobot 40%); Kinerja (Bobot 30%) dan (4) Disiplin (Bobot 5%). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP diperoleh dari total nilai IPA pegawai Politeknik AUP merupakan penjumlahan dari IPA pegawai Politeknik AUP yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Nilai IPA Politeknik AUP dapat kita lihat pada website <http://ropeg.kkp.go.id>.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks) pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yakni 78,91 (105,21%) dari target triwulan II yaitu 75 berdasarkan aplikasi IP ASN milik

Biro SDM Aparatur dan Organisasi di alamat <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/962?page=3>.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKK ini adalah profesionalitas ASN lingkup Politeknik AUP dan informasi seminar/diklat yang selalu disampaikan kepada seluruh ASN secara tepat waktu serta keterlibatan para pimpinan dalam penilaian kompetensi SDM.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKK ini melalui peningkatan kompetensi di berbagai pelatihan, webinar/seminar dan konferensi serta dukungan seluruh pegawai di lingkup Politeknik AUP, para operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai. Media sosial Whatsapp menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara *daring* dan luring.

Gambaran capaian pada IKK Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (indeks)

IKK 14. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)									
Realisasi TW II				Triwulan II 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
67,13	68,04	63,03	70	75	78,91	105,21	12,73	84	93,94

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP menunjukkan tren yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian indeks tercatat sebesar 68,04, kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 63,03. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kinerja dan kompetensi ASN pada periode tersebut. Namun, perbaikan mulai terlihat pada tahun 2024, di mana capaian indeks meningkat menjadi 70, mencerminkan upaya peningkatan kompetensi, kualifikasi, serta kinerja ASN yang mulai membuahkan hasil.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi di tahun 2025 dengan capaian sebesar 78,91, yang menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menggambarkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM ASN, penegakan disiplin, serta penguatan budaya kerja profesional di lingkungan Politeknik AUP. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2025 ini meningkat sebesar 15,88 poin, menandakan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan ASN yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren capaian indeks menunjukkan adanya progres positif, meskipun sempat mengalami penurunan, namun pada akhirnya berhasil mencapai target yang lebih optimal di tahun 2025.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra BPPSDMKP Tahun 2024, capaian triwulan II Tahun 2025 telah mencapai 93,94%.

Tabel 15. Perbandingan Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	Target 2023	Capaian 2024	% Capaian
1	Politeknik AUP	75	78,91	105,21%
2	Politeknik KP Sidoarjo	70	84,81	121,16%
3	Politeknik KP Bitung	75	84,61	112,16%
4	Politeknik KP Sorong	70	81,27	116,10%
5	Politeknik KP Karawang	70	84,67	120,96%
6	Politeknik KP Bone	80	83,17	103,96%
7	Politeknik KP Kupang	70	83,53	119,33%
8	Politeknik KP Dumai	70	88,99	127,13%
9	Politeknik KP Pangandaran	70	82,87	118,39%
10	Politeknik KP Jembrana	70	85,99	122,84%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan satuan pendidikan Pusat Pendidikan KP menunjukkan performa yang cukup tinggi dan merata di hampir seluruh satuan pendidikan pada tahun berjalan. Dari 11 satuan pendidikan, seluruhnya mencatatkan nilai di atas angka 78, yang menunjukkan bahwa kompetensi, kualifikasi, dan kinerja ASN di lingkungan Pusat Pendidikan KP secara umum berada pada level profesional yang baik.

Politeknik KP Dumai mencatatkan capaian tertinggi dengan nilai 88,99, diikuti oleh AK Wakatobi (87,55) dan Politeknik KP Jembrana (85,99). Ketiga satuan pendidikan ini menunjukkan keunggulan dalam hal pengelolaan sumber daya ASN, termasuk aspek pengembangan kompetensi dan budaya kerja profesional.

Sementara itu, Politeknik KP Sidoarjo (84,81), Politeknik KP Karawang (84,67), Politeknik KP Bitung (84,61), dan Politeknik KP Kupang (83,53) juga menunjukkan capaian yang sangat baik, memperlihatkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan berhasil menjaga konsistensi kualitas ASN mereka.

Politeknik AUP mencatatkan capaian 78,91, yang meskipun berada pada kisaran yang cukup baik, masih berada di bawah capaian mayoritas satuan pendidikan lainnya. Hal ini menjadi indikator bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam peningkatan kualitas ASN di Politeknik AUP, baik dari sisi kompetensi teknis maupun manajerial.

Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas ASN di lingkup Pusat Pendidikan KP telah berjalan secara efektif, meskipun tetap diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas ASN secara merata di seluruh satuan pendidikan.

Dalam rangka mencapai target IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%), Politeknik AUP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan sampai periode triwulan II tahun 2025 belum dapat terealisasi dikarenakan terdapat blokir anggaran sebesar 80.000.000,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKK ini yaitu sebesar 105,21% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 105,21%.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 15 :

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan kesiapan unit kerja dalam merencanakan serta mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara total nilai paket pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan total nilai anggaran pengadaan yang direncanakan dalam DIPA.

Semakin tinggi persentase RUP yang diumumkan, menunjukkan semakin baiknya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam perencanaan pengadaan. Hal ini juga menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Politeknik AUP berkomitmen untuk menyampaikan seluruh rencana pengadaan secara tepat waktu dan lengkap melalui SIRUP, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan sebagai upaya untuk memperkuat integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target yakni 100% dari RUP Pasca Revisi sebesar Rp 14,399,211,000 dan telah diumumkan sebesar Rp 14,399,211,000 berdasarkan Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP Nomor: B.4633/BPPSDM.1/PL.410/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM KP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II TA. 2025.

Faktor - faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah 1) Komitmen pimpinan dan seluruh tim PBJ, 2) Perencanaan anggaran yang tepat waktu dan terintegrasi, dan 3) Kompetensi SDM pengelola PBJ.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah sebagai berikut 1) Koordinasi Rutin antar Unit Pengelola Anggaran dan PBJ, 2) Penyusunan dan Konsolidasi Rencana Kebutuhan Pengadaan, 3) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan RUP ke SIRUP, dan 4) Monitoring dan evaluasi berkala proses input RUP.

Gambaran capaian pada IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) sebagai berikut:

IKK 12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)									
Realisasi TW II				Triwulan II 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW I 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120	-	80	120

Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada SIRUP merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Oleh karena itu, data capaian

IKU ini belum tersedia untuk periode Triwulan I tahun 2021 hingga 2024 dan belum dapat dibandingkan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Politeknik AUP berhasil mencapai angka 100% dalam pengumuman RUP pada SIRUP. Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan unit kerja dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, serta kesiapan dalam melaksanakan perencanaan pengadaan secara tertib dan tepat waktu.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi yang solid, kesiapan dokumen perencanaan, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola pengadaan yang terus dilakukan sejak awal tahun 2025. Diharapkan, capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di periode berikutnya guna mendukung tata kelola pengadaan yang lebih baik.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra KKP Tahun 2025, capaian pada tahun 2025 telah mencapai 120%.

Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	Target	% Capaian TW I
1	Politeknik AUP Jakarta	80	100
2	Politeknik KP Sidoarjo	80	100
3	Politeknik KP Bitung	80	100
4	Politeknik KP Sorong	80	100
5	Politeknik KP Karawang	80	100
6	Politeknik KP Kupang	80	100
7	Politeknik KP Bone	80	100
8	Politeknik KP Jemberana	80	100
9	Politeknik KP Pangandaran	80	100
10	Politeknik KP Dumai	80	100

Pada Triwulan II Tahun 2025, seluruh satuan pendidikan di lingkungan Pusat Pendidikan KP berhasil mencapai target 100% untuk IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi seluruh unit kerja dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan.

Capaian 100% ini juga menjadi indikator kesiapan pelaksanaan program/kegiatan sejak awal tahun, yang berkontribusi terhadap kelancaran

realisasi anggaran dan pencapaian output strategis institusi secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai target IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.621.981.000,- dan pada triwulan II telah terealisasi atas capaian IKU ini sebesar Rp. 1.102.776.869,- atau sebesar 68%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKU ini yaitu sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 52%.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 16 :

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana satuan kerja mematuhi ketentuan dan regulasi terkait pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pencatatan, hingga penghapusan.

Untuk Politeknik AUP, capaian indikator ini merupakan IKU baru yang mencerminkan keseriusan institusi dalam menjaga tata kelola aset negara secara tertib, akuntabel, dan transparan. Tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya menunjukkan integritas dalam pengelolaan aset, tetapi juga mendukung optimalisasi penggunaan BMN guna mendukung kegiatan pendidikan dan operasional kampus.

Penilaian indikator ini umumnya mencakup aspek kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian data dalam aplikasi SIMAK-BMN, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal. Oleh karena itu, capaian IKU ini menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

Progres IKU ini pada triwulan II tahun 2025, capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Politeknik AUP masih berada dalam tahap pengelolaan dan penyelesaian. Meskipun proses belum sepenuhnya rampung, sejumlah langkah strategis telah dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan dan peningkatan kualitas pengelolaan BMN.

Progres yang telah dilakukan pada IKU ini adalah penyiapan perencanaan terhadap: 1) penetapan status pengguna bangunan dan gedung kampus Politeknik AUP Jakarta, 2) proses reinventarisir pasca penghapusan asset BMN

di Kampus Bogor (eks Deptan), 3) proses penetapan tarif sewa untuk asset Politeknik AUP berupa kapal latihan dan riset Madidihang 03, gedung olahraga terbuka permanen (mini soccer), pemanfaatan kolam latihan gladi tirta..

Meskipun belum mencapai angka maksimal, progres yang dicapai sejauh ini menunjukkan arah perbaikan yang positif. Dengan komitmen yang terus diperkuat dan dukungan seluruh unit pelaksana, Politeknik AUP optimis bahwa target kepatuhan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 17 :

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja untuk setiap indikator. Untuk mengetahui nilai kinerja pelaksanaan anggaran Politeknik AUP dapat dilihat pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) Kementerian Keuangan. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Capaian IKK ini pada triwulan II Tahun 2025 sebesar 96,49% (114,87%) dengan target sebesar 84% berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 2161/SJ.2/KU.130/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerapan anggaran yang sesuai dengan DIPA setiap triwulan;
- 2) Ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan; dan
- 3) ketepatan waktu dalam penyelesaian SPJ UP dan TUP;

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan capaian ini adalah:

- 1) Dilakukannya pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman 3 DIPA setiap Triwulan.
- 2) Adanya koordinasi penyusunan RPD setiap triwulannya dengan Unit Keuangan (Bendahara) dan PPK, dengan pemetaan rencana realisasi anggaran per bulan berupa pembayaran gaji dan tunjangan, LS Kontraktual, LS Non Kontraktual, UP dan TUP serta realisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah.

Gambaran capaian pada IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai) dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai) sebagai berikut:

IKK 17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)									
Realisasi TW II				Triwulan II 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
76,48	80,82	88,49	83	84	96,49	114,87	16,25	92	104,88

Perbandingan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Politeknik AUP menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten dalam pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun. Pada triwulan II tahun 2025, capaian IKU mencapai 96,49, yang merupakan hasil tertinggi dalam lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan strategis, yang melebihi capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencatatkan capaian 83, Politeknik AUP mengalami peningkatan sebesar 13,49 poin. Peningkatan ini mencerminkan upaya perbaikan yang dilakukan sepanjang tahun, termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta penggunaan teknologi yang lebih optimal, seperti aplikasi OM-SPAN.

Pada Tahun 2023, capaian IKU tercatat 88,49, yang lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022, dan masih menunjukkan performa yang stabil dan baik. Sementara itu, pada Tahun 2022, capaian berada pada angka 80,82,

yang menunjukkan adanya peningkatan moderat dibandingkan dengan Tahun 2021, yang memiliki capaian 76,48.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi variasi dalam capaian dari tahun ke tahun, Politeknik AUP berhasil menunjukkan progres yang signifikan dalam mengelola anggaran dan mencapai target kinerja. Peningkatan bertahap ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus memperbaiki proses pelaksanaan anggaran, meningkatkan transparansi, serta memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana yang tersedia.

Dengan capaian 96,49 pada Tahun 2025, Politeknik AUP berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik, mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil yang positif dan dapat menjadi dasar untuk terus mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra Politeknik AUP Tahun 2024, capaian pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai 104,88%.

Tabel 19. Perbandingan Capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	Realisasi
1	Politeknik AUP Jakarta	96,49
2	Politeknik KP Bitung	98,31
3	Politeknik KP Sorong	85,41
4	Politeknik KP Karawang	90,66
5	Politeknik KP Bone	97,87
6	Politeknik KP Kupang	97,03
7	Politeknik KP Dumai	98,32
8	Politeknik KP Pangandaran	98,67
9	Politeknik KP Jembrana	97,06
10	AK Wakatobi	96,03

Berdasarkan data tabel 55, dapat dilihat bahwa seluruh Politeknik KP dapat mencapai seluruh targetnya di triwulan II tahun 2025. Capaian paling tinggi diraih oleh Politeknik KP Pangandaran sebesar 98,67, dan capaian paling rendah diraih oleh Politeknik KP Sorong sebesar 85,41%, dan sedangkan Politeknik AUP sendiri meraih capaian persentase sebesar 96,49%.

Berdasarkan capaian yang telah diraih pada periode saat ini, perlu dievaluasi lebih lanjut agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ke depan, satuan pendidikan dengan capaian tertinggi dapat menjadi contoh dalam strategi pengelolaan

anggaran bagi institusi lain, sementara Politeknik KP Sorong dapat melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di periode mendatang.

Dalam rangka mencapai target IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 42.500.000,- dan sampai triwulan II Tahun 2025 IKU ini belum memiliki nilai realisasi atau sebesar 0% dikarenakan terdapat blokir anggaran sebesar Rp 38.610.000,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKK ini yaitu sebesar 114,87% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 114,87%.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 18 :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Cara menghitung indikator kinerja utama Politeknik AUP dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L melalui pengukuran aspek:

- a. Penyerapan anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran Politeknik AUP dengan akumulasi pagu anggaran Politeknik AUP;
- b. Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan Politeknik AUP rencana penarikan dana bulanan Politeknik AUP dengan jumlah bulan;
- c. Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;

Tingkat Efisiensi (TE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Hingga triwulan II tahun 2025, Politeknik AUP masih berada dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari proses penilaian. Nilai akhir dari indikator ini baru akan tersedia pada akhir tahun anggaran, karena penilaiannya mencakup keseluruhan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian anggaran sepanjang tahun berjalan.

Meskipun demikian, sejumlah indikator awal telah menunjukkan arah yang positif. Proses penyusunan perencanaan telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan siklus anggaran, penyusunan TOR dan RAB semakin tertib, serta keterlibatan unit kerja dalam proses perencanaan makin meningkat. Selain itu, pelaksanaan revisi anggaran juga berjalan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan dan prioritas kegiatan.

Dengan dasar pelaksanaan yang baik sejak awal tahun, Politeknik AUP optimis bahwa capaian nilai kinerja perencanaan anggaran di akhir tahun akan mencerminkan kualitas tata kelola yang akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan institusi.

Sasaran Kegiatan 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 19 :

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)

Layanan dukungan manajemen internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata Kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Adapun IKK ini menargetkan dokumen atas layanan – layanan dukungan manajemen dalam rangka mendukung kegiatan teknis di Politeknik AUP. Formula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

- a. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- b. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

c. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Capaian IKU ini di triwulan I tahun 2025 telah mencapai target dengan nilai capaian adalah sebesar 24,5% dari target capaian yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 24,5% dengan bentuk pengumpulan dokumen berupa laporan dari beberapa layanan pada dukungan manajemen.

Faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah 1). Implementasi terhadap dokumen layanan yang telah direncanakan sesuai dengan RKAKL; 2). Keterlibatan seluruh pegawai unit dukungan manajemen teknis dalam menyelesaikan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan layanan-layanan manajemen; 3). Fasilitas yang mendukung para pegawai dalam mengimplementasikan tugas terkait layanan - layanan manajemen.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: 1). Koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pegawai lingkup dukungan manajemen teknis terkait implementasi dari perencanaan terhadap layanan - layanan manajemen; dan 2). Menyiapkan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas terkait implementasi layanan - layanan manajemen.

Gambaran capaian pada IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Capaian Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) sebagai berikut:

IKK 19. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)									
Realisasi TW II				Triwulan II 2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	100	49	49	100,00	-51,00	100	100,00

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis di Politeknik AUP menunjukkan konsistensi yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan II tahun 2025, capaian IKU mencapai angka 24,5% dari target 24,5%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan manajemen teknis dan strategis yang direncanakan berjalan dengan sangat baik dan mendapat dukungan penuh dari pihak manajemen.

Jika dilihat pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2021, 2022 dan 2023, data capaian IKU tidak tersedia, sehingga perbandingan dengan tahun tersebut tidak dapat dilakukan. Namun, berdasarkan capaian di tahun 2024, Politeknik AUP menunjukkan hasil yang sangat stabil, dengan capaian 100% di tahun tersebut. Ini menggambarkan bahwa Politeknik AUP memiliki konsistensi yang tinggi dalam memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan strategis dan manajemen teknis, yang sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan institusi.

Secara keseluruhan, capaian yang konsisten 100% menunjukkan komitmen Politeknik AUP untuk mendukung sepenuhnya manajemen teknis dan kegiatan strategis, yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi institusi.

Pengukuran perbandingan capaian pada kolom Renstra, jika diukur terhadap target Renstra KKP Tahun 2025, capaian pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai 100%.

Tabel 21. Perbandingan Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) dengan Pendidikan Tinggi Lingkup Pusdik KP

No	Satuan Kerja	Triwulan II 2025		
		Target	Capaian	%
1	Politeknik AUP	49,00	49,00	100,00%
2	Politeknik KP Sidoarjo	50,00	50,00	100,00%
3	Politeknik KP Bitung	48,00	48,00	100,00%
4	Politeknik KP Sorong	45,00	45,00	100,00%
5	Politeknik KP Karawang	52,00	52,00	100,00%
6	Politeknik KP Kupang	52,00	52,00	100,00%
7	Politeknik KP Bone	42,00	42,00	100,00%
8	Politeknik KP Dumai	46,00	46,00	100,00%
9	Politeknik KP Pangandaran	40,63	40,63	100,00%
10	Politeknik KP Jembrana	48,40	48,40	100,00%
11	AK KP Wakatobi	46,00	46,00	100,00%
12	SUPM Ladang	44,00	44,00	100,00%
13	SUPM Pariaman	44,00	44,00	100,00%
14	SUPM Kotaagung	47,00	47,00	100,00%
15	SUPM Tegal	47,00	47,00	100,00%
16	SUPM Waiheru	50,00	50,00	100,00%
17	SUPM Pontianak	48,00	48,00	100,00%
18	SUPM Sorong	44,00	44,00	100,00%
19	Pusat Pendidikan	44,00	44,00	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, Politeknik AUP berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 100%. Begitu juga dengan satuan Pendidikan lainnya yang dapat mencapai targetnya di triwulan II tahun 2025. Capaian 100,00% yang merata di seluruh satuan pendidikan ini, mencerminkan keberhasilan dalam penyediaan dukungan manajemen yang efektif dan efisien. Dengan kondisi ini,

dapat disimpulkan bahwa setiap satuan pendidikan telah menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung berbagai kebijakan strategis, baik dalam aspek perencanaan, pengelolaan sumber daya, maupun implementasi kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan akademik.

Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi capaian ini dan terus meningkatkan inovasi dalam sistem dukungan manajemen agar tetap relevan dengan dinamika perkembangan pendidikan serta kebutuhan industri.

Dalam rangka mencapai target IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lingkup Politeknik AUP (%) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11.756.745.000,- dan pada triwulan I telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 4.345.403.725,- atau sebesar 37%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada IKK ini yaitu sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 63%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang mengandung arti bahwa proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dimana di setiap kegiatan sudah ada pelaporannya secara terperinci, terlebih sekarang menggunakan system lelang yang di setiap kegiatannya pasti ada data keuangan dan juga pelaporannya oleh rekanan lelang.

Pada awal tahun 2025, pagu anggaran politeknik AUP ditetapkan sebesar Rp114.865.893.000. Namun, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 27.246.888.000,- sehingga pagu efektif atau pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 87.619.005.000,- Hingga akhir Triwulan II tahun 2025, terjadi revisi terkait pembukaan blokir anggaran sebesar Rp. 3.778.210.000,- sehingga anggaran hingga per Juli 2025 sebesar Rp. 91.397.215.000,-. Sampai dengan periode Juli 2025, total realisasi anggaran yang telah dicapai adalah sebesar Rp 50,971,411,299,- atau setara dengan 55,77% dari total pagu setelah dikurangi blokir sehingga sisa anggaran sebesar Rp 40,201,836,701,-. Tabel berikut menggambarkan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan pada Politeknik AUP Jakarta triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 22. Tabel Realisasi Anggaran Politeknik AUP s.d triwulan II tahun 2025

NO	Jenis Belanja	Pagu Sebelum Blokir/Revisi	Blokir	Pagu Dikurangi Blokir/Revisi	Aplikasi OM SPAN (Sebelum Blokir)		Aplikasi SAKTI (dikurangi blokir)	
					Realisasi	%	Realisasi	%
		(Rp. 000)						
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi KP	48.433.852	20.668.897	27.764.955	13.430.948	27,73	13.430.948	48,37
	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	140.000	127.500	12.500	-	-	-	-
	Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan	282.000	182.900	99.100	99.072	99,97	99.072	99,97
	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	180.000	180.000	-	-	-	-	-
	Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi, Pengabdian Kepada Masyarakat	70.000	44.000	26.000	-	-	-	-
	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan, Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	47.761.852	18.764.401	28.997.451	13.331.875	27	13.331.875	46
2	Program Dukungan Manajemen Satker	66.432.041	2.979.781	63.452.260	37.540.462	57	37.540.462	59
	Layanan Umum	42.500	39.800	2.700	2.700	6%	2.700	100%
	Layanan Perkantoran	66.347.041	2.901.371	63.445.670	37.537.762	57%	37.537.762	59

Layanan Manajemen Kinerja Internal	42.500	38.610	3.890	-	-	-	-
------------------------------------	--------	--------	-------	---	---	---	---

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Politeknik AUP

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk Politeknik AUP. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Politeknik AUP sudah melaksanakan kegiatan dan kinerja dalam satu tahun anggaran, dengan rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran per IKU di triwulan II tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 23. Perhitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Politeknik AUP Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target TW II 2025	Capaian	Persentase Capaian	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran Setelah Blokir (Rp.)	Realisasi Anggaran Setelah Blokir (Rp.)	Persentase Realisasi	Efisiensi	
SK.1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten									
1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	-	-	-	Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan	316.350.000	217.050.000	68,61%	32,39%
2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	-	-	-	Penyelenggaraan Pengajaran dan Perkuliahan	1.629.449.000	677.882.020	20,81%	79,19%
3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.816	2.844	100,99	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	39.772.091.000	10.082.620.743	25%	75%
4	Nilai PNBPN satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	-	-	-	Penyelenggaraan Praktik TEFA PNBPN	4.962.701.000	2.116.987.441	43%	57%
5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	-	-	-	Fasilitasi Kewirausahaan	78.920.000	-	0%	100%
6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	-	-	-	Sertifikasi Peserta Didik	544.490.000	189.009.368	2,53%	97,47%

7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	-	-	-	Dukungan kegiatan penerimaan peserta didik	428.691.000	28.532.300	1,20%	98,80%
SK.2 Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan									
8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	-	-	-	Penelitian Terapan KP	140.000.000	-	0%	100%
9	Pengabdian Pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	-	-	-	Pengabdian Kepada Masyarakat	70.000.000	-	0%	100%
SK.3 Terselenggaranya tata kelola Pendidikan kelautan dan perikanan									
10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	-	-	-	Fasilitasi Penjaminan Mutu Satuan Pendidikabn KP	282.000.000	99.072.500	35%	65%
11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	-	-	-	Sertifikasi Profesi dan SDM	100.000.000	-	0%	100%
SK.4 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85	90,91	106,95	Penyelenggaraan Satuan Pengawas Internal	19.160.000	12.491.000	65%	35%

13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	-	-	-	Penyelenggaraan Satuan Pengawas Internal	10.000.000	7.303.000	73%	27%
14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	75	78,91	105,21	Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan	80.000.000	-	0%	100%
15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	100	120	Pemeliharaan Kantor/Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	1.621.981.000	1.102.776.869	68%	32%
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	-	-	-	Layanan Tata Usaha dan Kerumahtangaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	42.500.000	2.700.000	6%	0%
17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	84	96,49	114,87	Layanan Keuangan	42.500.000	-	0%	100%
18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	-	-	-	Layanan Perkantoran/Gaji dan tunjangan	52.968.315.000	32.089.582.333	61%	39%
19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	49	49	100	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	11.756.745.000	4.345.403.725	37%	63%

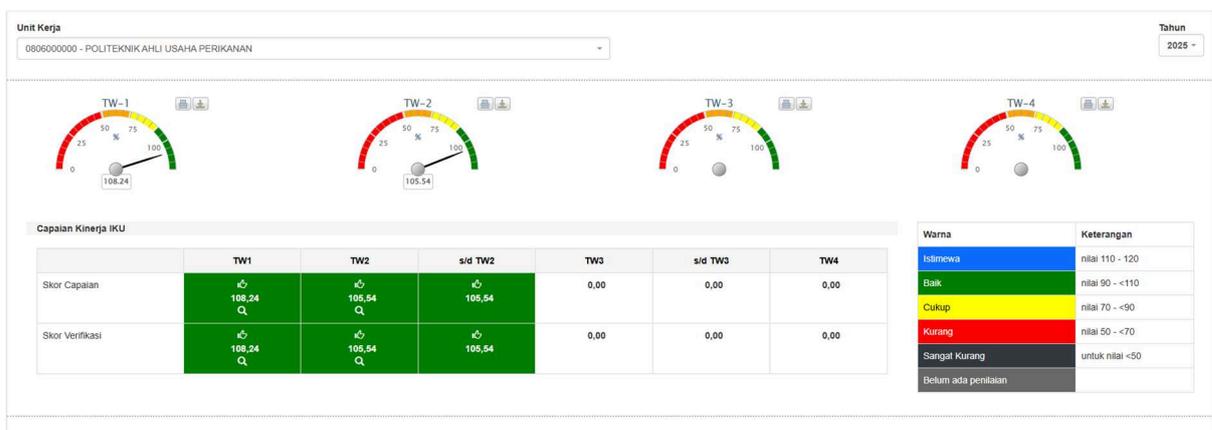
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa anggaran yang telah dialokasikan belum dapat terealisasi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan kepada seluruh Instansi Pemerintahan. Selama periode triwulan II tahun 2025, dengan total realisasi anggaran sebesar 55,77%, sudah mencapai Nilai Kinerja

Organisasi sebesar 105,54%, dan sudah memiliki efisiensi sebesar 49,77%. Angka tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran triwulan II tahun 2025, efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik, sudah mencapai tujuan dan sasaran, dan sudah mencapai output yang telah diharapkan meskipun dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran dan terdapat beberapa indikator kinerja yang belum maksimal.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja Politeknik AUP triwulan II tahun anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja Politeknik AUP pada triwulan II tahun 2025 sebesar 105,54 %, yang dapat dilihat pada *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja Politeknik AUP triwulan II tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025, Politeknik AUP telah berkinerja baik atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada *dashboard* kinerja status warna berwarna hijau dengan nilai NSS diatas 100%. *Dashboard* kinerja berwarna hijau menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Politeknik AUP pada triwulan II tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 24. Capaian Kinerja triwulan II tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia	436			

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
		1 Industri atau Dunia Kerja (Orang)				
		2 Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512			
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891	2.816	2.844	100,99
		4 Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741			
		5 Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5			
		6 Persentase lulusan Politeknik AUP yang besertifikasi kompetensi (%)	100			
		7 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100			
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8 Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6			
		9 Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1			
3	Terselenggaranya tata Kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10 Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1			

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET TW II 2025	REALISASI TW II 2025	%
		11 Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60			
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85	85	90,91	106,95
		13 Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81			
		14 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84	75	78,91	105,21
		15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80	80	100	120
		16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80			
		17 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92	84	96,49	114,87
		18 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5			
		19 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100	100	100	100

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja utama pada triwulan II tahun 2025 diantaranya :

1. Beberapa kegiatan belum dapat terlaksana sesuai dengan ROK yang telah disusun dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran;
2. Pengumpulan data dukung dari masing-masing penanggung jawab IKU yang kurang tertib dan tidak sesuai manual IKU;
3. Belum dilakukan monitoring terhadap Indikator Kinerja yang target dan capaiannya semesteran dan Tahunan.

Sehingga dengan permasalahan tersebut, rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Terkait kegiatan yang belum dapat terlaksana, salah satunya adalah kegiatan sertifikasi profesi, agar diusulkan kepada seluruh tenaga pendidik agar dapat mengikuti pelatihan secara mandiri baik aplikasi KKP maupun di luar KKP;
2. Menjadwalkan rapat pengukuran capaian lebih awal kepada semua penanggung jawab IKU lingkup Politeknik AUP, sebelum jadwal yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan KP guna mempermudah verifikasi dan validasi capaian dan pendokumentasian data dukung;
3. Mengawal progres capaian kinerja yang periode pengukurannya semesteran dan tahunan. Jika tidak ada perkembangan kinerja sampai dengan triwulan tiga, maka perlu ada strategi pencapaian dan menyusun justifikasi pencapaian IKU dari masing-masing penanggung jawab IKU.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
POLITEKNIK AUP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ani Leilani**

Jabatan : Direktur Politeknik AUP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Direktur Politeknik AUP
Jakarta

Ani Leilani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
POLITEKNIK AUP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	436
		2	Jumlah lulusan Politeknik AUP (Orang)	512
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang kompeten (Orang)	2.891
		4	Nilai PNBP satker Politeknik AUP (Rp. Miliar)	2,741
		5	Kerjasama Politeknik AUP yang disepakati (Kesepakatan)	5
		6	Persentase lulusan Politeknik AUP yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik AUP (%)	100
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (Paket)	6
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik AUP (kelompok)	1
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik AUP (Lembaga)	1
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik AUP yang tersertifikasi (Orang)	60
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	85
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik AUP (Nilai)	81
		14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	84
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik AUP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik AUP (%)	80
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	92
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	71,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	100

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	48.433.852.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	66.432.041.000
Total Anggaran Politeknik AUP Tahun 2025		114.865.893.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Direktur Politeknik
AUP Jakarta

Ani Leilani

17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	Timja Dukungan Manajerial	Layanan Keuangan	2378.EBD.955.301.GA	42.500.000	12	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik AUP (Nilai)	Timja Dukungan Manajerial	Layanan Perkantoran/Gaji dan tunjangan	2378.EBA.994.001	52.968.315.000	11	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik AUP (%)	Timja Dukungan Manajerial	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2378.EBA.994.002	12.200.745.000	4	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

Jakarta, Januari 2025
 Direktur Politeknik AUP



Arif Setiadi